

**ANALISIS INDEPENDENSI PROGRAM INVESTIGATIF
BOCOR ALUS POLITIK MEDIA TEMPO PASCA TEROR
KEPALA BABI DAN BANGKAI TIKUS**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat-Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana (S.Sos)
Dalam Ilmu Komunikasi



OLEH :

DITA NOVIANA
NIM.22521011

**PROGRAM STUDI KOMUNIKASI DAN PENYIARAN ISLAM
FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP
TAHUN 2026**

PENGAJUAN SKRIPSI

Perihal : Pengajuan Skripsi

Kepada
Yth. Bapak Rektor IAIN Curup
Di-
Curup

Assalamu 'alaikum warrahmatullahi wabarakatuh

Setelah mengadakan pemeriksaan dan bimbingan terhadap skripsi yang diajukan oleh :

Nama : DITA NOVIANA

NIM : 22521011

Judul : **ANALISIS INDEPENDENSI PROGRAM INVESTIGATIF
BOCOR ALUS MEDIA TEMPO PASCA TEROR KEPALA
BABI DAN BANGKAI TIKUS**

Kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah layak diajukan untuk sidang munaqasah di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

Demikianlah permohonan pengajuan skripsi ini kami ajukan, terima kasih.

Wassalamu 'alaikum warrahmatullahi wabarakatuh

Pembimbing I



Robby Aditya Putra, MA

NIP. 199212232018011002

Curup, 9 Januari 2026

Pembimbing II



Anrial, MA

NIP. 198101032023211012

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Dita Noviana

NIM : 22521011

Prodi : Komunikasi dan Penyiaran Islam

Judul Skripsi : **Analisis Independensi Program Investigatif Bocor Alus Media**

Tempo Sesudah teror Kepala Babi dan Bangkai Tikus

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah di ajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan penulis juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah di ajukan atau dirujuk dalam naskah ini dan disebutkan dalam referensi, apabila di kemudian hari bahwa pernyataan ini ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, semoga dapat digunakan dengan seperhunya.

Curup, 10 Februari 2026

The image shows an official stamp of Universitas Islam Sumatera Utara (UISU) with the text "METERAI PERAKU" and "NIM: 22521011". A handwritten signature is written over the stamp.

Dita Noviana
Nim. 22521011



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP
FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH**

Jalan Dr. A.H. Gani No. 01 Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-21759 Fax 21010
Homepage: <http://www.iaincurup.ac.id> Email: admin@iaincurup.ac.id Kode Pos 39119

PENGESAHAN SKRIPSI MAHASISWA

Nomor : 147/In.34/FU/PP.019/03/2026

Nama : Dita Noviana
NIM : 22521011
Fakultas : Ushuluddin Adab dan Dakwah
Prodi : Komunikasi dan Penyiaran Islam
Judul : Analisis Independensi Program Investigatif Podcast Bocor Alus
Politik Media Tempo Pasca Teror Kepala Babi dan Bangkai
Tikus

Telah dimunaqasyahkan dalam sidang terbuka Institut Agama Islam Negeri Curup, pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 26 Februari 2026
Pukul : 07.30 s/d 09.00 WIB
Tempat : Aula Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah

Dan telah diterima untuk melengkapi sebagai syarat-syarat guna memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos) dalam bidang Ilmu Komunikasi dan Penyiaran Islam.

TINJAUAN

Ketua

Dr. Robby Aditya Patra, M.A.
NIP. 199212232018014002

Sekretaris

Anrial, M.A.
NIP. 198101032023211012

Penguji I

Femalia Valentine, M.A.
NIP. 198801042020122002

Penguji II

Dede Konggoro, M.L.Kom
NIP. 198610282023111015

Mengesahkan,
Dekan Fakultas
Ushuluddin Adab dan Dakwah



Dr. Fakhruddin, S.Ag., M.Pd.I
NIP. 197501122006041009

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Dengan mengucapkan Alhamdulillah segala puji dan syukur penulis senantiasa panjatkan atas kehadiran Allah SWT. karena berkat rahmat dan hidayah serta petunjuk-Nya sehingga penulis berhasil menuntaskan penulisan skripsi dengan judul "*ANALISIS INDEPENDENSI PROGRAM INVESTIGATIF PODCAST BOCOR ALUS POLITIK MEDIA TEMPO SESUDAH TEROR KEPALA BABI DAN BANGKAI TIKUS*". Kemudian tidak lupa penulis mengucapkan sholawat dan salam senantiasa tercurah kepada Rasulullah SAW yang mengantarkan kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang hingga saat ini. Penyusunan skripsi ini dilakukan untuk memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos) di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

Penulis dengan penuh kesadaran menyadari bahwa penulisan tidak dapat terselesaikan tanpa dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penting bagi penulis untuk menyampaikan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini terutama kepada:

1. Prof. Dr. Idi Warsah, M.Pd.I, selaku Rektor IAIN Curup.
2. Prof. Dr. Yusefri, M.Ag. selaku Wakil Rektor I IAIN Curup.
3. Dr. Muhammad Istan, SE. M.Pd, selaku Wakil Rektor II IAIN Curup.
4. Dr. Nelson, S.Ag., M.Pd, selaku Wakil Rektor III IAIN Curup.
5. Dr. Fakhruddin, S.Ag., M.Pd.I, selaku Dekan Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah IAIN Curup.

6. Dr. Robby Aditya Putra, M.A, selaku Ketua Prodi KPI IAIN Curup
Sekaligus Dosen Pembimbing I.
7. Bapak Anrial, M.A selaku Pembimbing II
8. Kedua orang tuaku tercinta yang selalu memberikan motivasi dan support serta do'a yang selalu engkau panjatkan agar urusanku dimudahkan hingga sampai selesai penulisan skripsi ini.
9. Seluruh dosen dan staf IAIN Curup yang telah banyak membantu penulisan dalam berbagai perbaikan skripsi ini hingga selesai.

Penulis menyadari bahwa karya ilmiah ini jauh dari kesempurnaan, karna penulis hanyalah manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan dan khilaf. Penulis juga mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun untuk kebaikan skripsi ini. Atas segala bantuan dari berbagai pihak, penulis ucapkan. terimakasih, semoga Allah SWT. membalas kebaikan dengan nilai pahala yang berlipat ganda disisi-nya. Amin yarobbal alamin.

Terimakasih Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Curup, 10 Februari 2026

Penulis



Dita Noviana

NIM: 22521011

MOTTO

**“ Pada Waktunya, Dunia Hanya Perlu Tahu Kalau Kita
Hebat. Kebahagiaan Tidak Membutuhkan Penilaian
Orang Lain.”**

Fiersa Besari

GARIS WAKTU

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah tak pernah berhenti saya ucapkan atas nikmat serta karunia yang Allah SWT limpahkan selama menjalani masa perkuliahan, sehingga pada tahap ini saya dapat menyelesaikan tugas akhir sebagai syarat kelulusan dari perjalanan yang panjang ini. Skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Skripsi ini saya persembahkan untuk kedua orang tuaku, Bapak Sutomo Subagio dan Ibu Sri Lertari, terimakasih telah membesarkan saya dengan kasih sayang yang tiada kurang - kurangnya, memberikan pengalaman hidup yang tidak bisa di berikan oleh siapapun, serta memberikan semangat perjuangan yang tiada habisnya. Sehingga saya menjadi pribadi yang tak mudah menyerah atas keadaan, bekerja keras dan bertanggung jawab atas diri sendiri. Berada di jenjang Pendidikan Strata 1 dulu tidak pernah sedikitpun terbesit di fikiran saya, namun dengan Keyakinan, Do'a, serta perjuangan kalian lah saya kini berdiri, menempuh pendidikan dengan layak, hingga akhirnya kini anak kalian mampu menyelesaikan perjalanan panjang di dunia pendidikan. Tentu mengalir banyak keringat dan air mata kalian di setiap langkahku, berbakti seumur hidup pun tak akan pernah membayar itu semua. Untuk itu skripsi ini kupersembahkan untuk kedua orang tua hebatku.
2. Kepada kedua adik kandungku, Ditho Khoirul Rofiq & Dawam Assidiq terimakasih kalian sudah membersamai kakak mu ini dalam menyelesaikan jenjang pendidikan Strata 1. Ucapan apa kabar kak, udah makan atau belum, masih ada uang simpanan gak, kapan pulang kerumah kak?, Menjadi semangat kakakmu dalam menyelesaikan pendidikan ini. Terimakasih atas semangat yang setiap hari kalian

ucapkan, semoga kalian menjadi pribadi yang lebih baik lagi kedepannya, Amin.

3. Kepada kedua sahabat saya Fra Fella Hernindah & Siwi Qudsi terima kasih sudah menemani saya dikala susah maupun senang selama menempuh pendidikan, maaf masih sering merepotkan kalian dalam segala urusan. Berkat semangat dari kalian saya bisa menyelesaikan jenjang pendidikan Strata 1 ini dengan penuh rasa saling menghargai dan saling tolong - menolong.
4. Kepada teman Kos saya Griya Staind no 51 Irmatul Mustafidah, terima kasih sudah menjadi bagian dari proses pendidikanku, selama kurang lebih 3,5 tahun ini banyak cerita, banyak pengalaman, serta banyak kenangan. Makan sepiring berdua, keluar kewarung berjalan bersama, memasak bersama, dan setelah ini semuanya tidak bisa terulang kembali namun tetap terkenang karena setiap masa ada orangnya dan setiap orang ada masanya
5. Kepada teman – teman saya kelas KPI adalah KOJI 1A – 8A yang tak bisa saya sebutkan satu persatu, terimakasih telah menemani setiap langkah kecil selama 4 tahun ini. Terima kasih telah menjadi bahu untuk bersandar, telinga untuk mendengar, dan tawa yang tak pernah pudar. Di balik setiap lembar skripsi ini, ada jejak langkah kita bersama yang tak akan pernah pudar oleh waktu. Semoga persahabatan ini abadi, meski tak lagi berjalan dalam lorong yang sama. Sehat-sehatlah dan teruslah hebat kawan-kawanku.
6. Kepada keluarga besar Organisasi LPM Gelora Parrhesia, terima kasih telah menjadi bagian sebagai keluarga yang utuh sewaktu saya di perantauan. Disini saya bisa berproses, menemukan potensi yang ada di

dalam diri saya, menemukan kakak – kakak baru, mendapatkan adik – adik baru sehingga kita bisa saling kompak, dan menyayangi satu sama lain.

7. BANK INDONESIA Keluarga besar GenBI IAIN Curup, terimakasih atas semua cerita dan pengalaman yang sangat amat berharga selama 2 tahun masa bakti ini. Tentu petualangan selama menjadi GenBi akan salalu kukenang.
8. Dosen Pembimbing I dan Dosen Pembimbing II. Terima kasih untuk bimbingan dan ilmu yang kalian berikan selama ini, maaf jika pernah melakukan kesalahan baik yang disengaja maupun tidak disengaja selama proses bimbingan skripsi.
9. Skripsi ini saya persembahkan untuk seseorang yang tak perlu ku sebutkan namanya, yang dulu selalu mendukung, menjadi tempat untuk berkeluh kesah, dan menjadi superhero jikalau saya butuh pertolongan.
10. Dosen FUAD. Terima kasih atas semua ilmu yang diberikan dibangku kuliah selama ini.
11. Dosen Pembimbing Akademik. Terima kasih atas bimbingannya selama ini dari awal hingga akhir perjalanan perkuliahan ini.
12. Kepada semua pihak yang tak bisa disebutkan namanya satu-satu. Terima kasih banyak telah membantu dan memotivasi penulis dalam menyelesaikan studinya dan menjadi sarjana.

ABSTRAK

Dita Noviana NIM. 22521011 — **Analisis Independensi Program Investigatif Podcast Bocor Alus Politik Media Tempo Sesudah Teror Kepala Babi dan Bangkai Tikus** — Skripsi Program Studi Komunikasi Penyiaran Islam.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis independensi Program Investigatif Bocor Alus Tempo Sesudah teror kepala babi dan bangkai tikus, dengan fokus pada dua aspek utama, yaitu implementasi prinsip ideologis jurnalisme dan konsistensi prinsip dasar pemberitaan. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis isi terhadap enam episode podcast, meliputi tiga bulan sebelum teror dan tiga bulan sesudah teror. Data dikumpulkan melalui dokumentasi konten, transkrip dialog, serta penelusuran temuan faktual yang kemudian dianalisis menggunakan kerangka teori independensi media McQuail (2006).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa independensi Bocor Alus Tempo tetap terjaga setelah teror terjadi. Pada level ideologis, redaksi konsisten menjalankan fungsi watchdog, berpihak pada kepentingan publik, bersikap anti-otoritarian, dan menegaskan komitmen terhadap kebebasan pers. Pada level prinsip dasar pemberitaan, tidak ditemukan penurunan standar verifikasi, akurasi, keberimbangan, maupun transparansi sumber. Teror tidak menimbulkan *self-censorship*, melainkan justru memperkuat keberanian redaksi dalam mengkritik kekuasaan.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa independensi media tidak ditentukan oleh absennya tekanan, melainkan oleh kemampuan mempertahankan otonomi profesional di tengah intimidasi. Bocor Alus Tempo terbukti memiliki resiliensi institusional yang kuat sehingga tetap menjalankan mandat jurnalisme publik secara bertanggung jawab.

Kata Kunci: *independensi media, jurnalisme investigatif, Podcat Bocor Alus Politik Media Tempo, teror terhadap pers, McQuail.*

ABSTRACT

Dita Noviana. NIM 22521011. "Analysis of the Independence of the Investigative Program Podcast Bocor Alus Politik by Media Tempo After the Terror of a Pig's Head and Rat Carcasses." Undergraduate Thesis, Islamic Broadcasting Communication Study Program.

This study aims to analyze the independence of the investigative program Bocor Alus Tempo following the terror incident involving a pig's head and rat carcasses, focusing on two main aspects: the implementation of ideological principles of journalism and the consistency of fundamental news values. The research employs a qualitative approach using content analysis of six podcast episodes, consisting of three months before the terror incident and three months after. Data were collected through content documentation, dialogue transcripts, and the identification of factual findings, which were then analyzed using McQuail's (2006) media independence framework.

The findings indicate that the independence of Bocor Alus Tempo remained intact after the terror incident. At the ideological level, the editorial team consistently maintained its watchdog function, upheld public interest, demonstrated an anti-authoritarian stance, and reaffirmed its commitment to press freedom. At the level of fundamental news principles, there was no decline in verification standards, accuracy, balance, or source transparency. Rather than triggering self-censorship, the terror incident strengthened the editorial team's courage to critically examine those in power.

This study concludes that media independence is not determined by the absence of pressure, but by the ability to sustain professional autonomy amid intimidation. Bocor Alus Tempo demonstrates strong institutional resilience in fulfilling its public journalism mandate responsibly.

Keywords: *media independence, investigative journalism, Podcast Bocor Alus Politik MediaTempo, terror against the press, McQuail.*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PENGAJUAN SKRIPSI	ii
KATA PENGANTAR	iv
MOTTO.....	vii
PERSEMBAHAN	viii
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	13
C. Tujuan Penelitian.....	13
D. Manfaat Penelitian.....	14
E. Penelitian Terdahulu.....	17
BAB II LANDASAN TEORITIS	26
A. Media Massa	26
B. Independensi Media	28
C. Investigasi jurnalistik	42
D. Kerangka Berfikir	52
BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....	55
A. Jenis Penelitian	55
B. Lokasi Penelitian	56
C. Objek Penelitian	56
D. Sumber Data.....	57
E. Teknik Pengumpulan Data	65

F. Teknik Analisis Data	67
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	72
A. Gambaran Umum Objek Penelitian Podcast Bocor Alus Politik Tempo	72
1. Podcast Bocor Alus Politik Tempo.....	73
2. Podcast Bocor Alus Politik Tempo Sebagai Program Investigasi.....	76
3. Konteks Teror Kepala Babi dan Bangkai Tikus terhadap Podcast.....	78
B. Hasil Penelitian	82
1. Data Prinsip Ideologis Episode 3 Bulan Sebelum Teror	85
2. Prinsip Ideologis Episode 3 Bulan Sesudah Teror	100
3. Independensi Program Investigatif Bocor Alus Media Tempo dalam Mengimplementasikan Prinsip Ideologis Jurnalisme Sesudah teror Kepala Babi & Bangkai Tikus	117
1. Data Prinsip Dasar Pemberitaan 3 Bulan Sebelum Teror.....	128
2. Prinsip Dasar Pemberitaan 3 Bulan Sesudah Teror	145
3. Independensi Program Investigatif Bocor Alus Media Tempo dalam Mempertahankan Prinsip Dasar Pemberitaan Sesudah teror Kepala Babi & Bangkai Tikus	155
BAB V PENUTUP	164
A. KESIMPULAN.....	164
B. SARAN	166

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada Maret 2025, terjadi peristiwa nyata yang menggemparkan dunia jurnalistik Indonesia, khususnya redaksi Tempo. Redaksi Menerima Teror mengerikan berupa kiriman kepala babi dan bangkai tikus, yang menjadi simbol ancaman sekaligus intimidasi terhadap kebebasan pers. Teror pertama, pada 19 Maret 2025, redaksi menerima paket berisi potongan kepala babi tanpa telinga yang ditujukan kepada Francisca Christy Rosana, jurnalis yang dikenal sebagai host program investigatif podcast Bocor Alus Politik. Tiga hari kemudian, pada 22 Maret 2025, ditemukan paket lain berupa kardus berisi enam bangkai tikus telah terpenggal kepalanya, yang diketahui dilemparkan ke area kantor redaksi pada dini hari.¹

Sebelumnya, akun anonym juga mengirim pesan ancaman melalui media sosial yang menegaskan niat untuk meneror redaksi. Peristiwa tersebut menimbulkan kekhawatiran serius mengenai upaya sistematis untuk membungkam media yang kritis dan independen. Teror yang diarahkan langsung kepada host program Bocor Alus Politik ini membuka pertanyaan mengenai seberapa besar pengaruh ancaman tersebut terhadap independensi redaksi, khususnya dalam produksi dan penyajian program investigative pasca insiden.²

¹ Tempo.co, "Kronologi Detail Teror Kepala Babi dan Bangkai Tikus untuk Redaksi lempo," Tempo.co, 1 Agustus 2019.

² Tirto.id, "Teror Beruntun ke Tempo Diduga Dilakukan Secara Terencana," Tirtoid, 1 Agustus 2019.

Teror yang terjadi adalah upaya pemerintah untuk membungkam media yang dirasa menyalahi aturan pemerintah. Tempo merupakan media yang konsisten dalam mengungkap fakta secara tajam, hal ini dapat dilihat dari pemberitaan Tempo yang berani hingga mengakibatkan pemberedelan oleh pemerintah karena dianggap terlalu tajam mengkritik. Seperti pada tahun 1982 pertama kali Tempo diberedel dan Juni 1994 kedua kalinya Tempo diberedel karena dinilai terlalu keras mengkritik Habibie dan Soeharto ihwal pembelian kapal kapal bekas dari Jerman Timur.³

Dalam konteks kebebasan pers di Indonesia, respon pemerintah terhadap kekerasan media memainkan peran penting dalam menjaga iklim demokrasi. Sayangnya tidak semua pernyataan dari pejabat publik mencerminkan keberpihakan terhadap kebebasan jurnalistik. Hal ini terlihat dalam pernyataan Kepala Kantor Komunikasi Presiden, Hasan Nasbi, yang menanggapi kasus teror dengan mengatakan bahwa — kepala babinya dimasak saja —. Meskipun belakangan ia mengklarifikasi bahwa ucapannya dimaksudkan untuk meredam kepanikan, pernyataan tersebut menuai kritik luas karena dianggap meremehkan ancaman terhadap jurnalis dan media. Narasi seperti ini mencerminkan lemahnya komitmen Negara dalam melindungi kerja jurnalistik dan justru bisa memicu pembiaran terhadap aksi pembungkaman media.⁴

Berbagai aksi teror yang menysasar ke media massa pada akhirnya menegaskan betapa rentannya kebebasan pers di Indonesia ketika negara tidak hadir secara tegas melindungi jurnalis. Di satu sisi, media memiliki

³ Basudiwa Supraja Sangga Buana and Syamsul Rijal, „Kekerasan Terhadap Pers Melalui Serangan Siber: Studi Kasus Pada Media Online Tempo.Co“, *Jurnal Studi Jurnalistik*, 3.2 (2021), pp. 1–20, doi:10.15408/jsj.v3i2.22983.

⁴ Salma Najla Amir, Dewina Mutiara Sholihat, and Neyla Rida Shakira, „Implikasi Hukum Pidana Pers Dalam Kasus Pengiriman Kepala Babi Ke Redaksi Tempo : Analisis Terhadap Kebebasan Pers Dan Batasan Ekspresi“, 2025.

peran vital sebagai pengawal demokrasi melalui pemberitaan yang kritis dan mendalam. Namun di sisi lain, lemahnya respon pemerintah, ditambah pernyataan pejabat publik yang meremehkan ancaman, justru semakin memperbesar ruang bagi tindakan kekerasan terhadap pers. Alih-alih memberikan rasa aman, sikap semacam ini dapat menurunkan kepercayaan publik pada komitmen negara dalam menjamin kebebasan berekspresi. Dalam kondisi seperti ini, teror terhadap media tidak hanya menakutkan bagi jurnalis, tetapi juga membungkam suara kebenaran yang seharusnya didengar oleh masyarakat luas. Pada era sekarang ini teror sudah menjadi momok, dan bahkan telah menjadi perhatian yang cukup serius di negara Indonesia, dimana teror merupakan perbuatan keji yang menimbulkan perasaan waswas – waswas, ketakutan, kepada seseorang.⁵

Aksi teror kini tidak hanya menasar ke institusi pemerintahan atau kelompok tertentu, tetapi juga telah merambah ke ranah media massa. Di tengah fungsinya sebagai pilar keempat demokrasi, media kerap menjadi sasaran teror karena keberaniannya mengungkap kebenaran yang menyakitkan bagi pihak-pihak tertentu. Teror terhadap media bukan sekadar serangan fisik, melainkan juga bentuk pembungkaman terhadap kebebasan berekspresi dan independensi jurnalistik.⁶

Kebebasan informasi adalah prinsip bahwa publik berhak mendapatkan informasi yang berkaitan dengan masalah publik. Wartawan memiliki peran penting dalam memberikan informasi ini kepada

⁵ Agus Handoko, 'Analisis Kejahatan Terorisme Berkedok Agama', *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I*, 6.2 (2019), pp. 155–78, doi:10.15408/sjsbs.v6i2.11041.

⁶ Amir, Sholihat, and Shakira, 'Implikasi Hukum Pidana Pers Dalam Kasus Pengiriman Kepala Babi Ke Redaksi Tempo : Analisis Terhadap Kebebasan Pers Dan Batasan Ekspresi'.

masyarakat.⁷ Perlindungan terhadap wartawan korban tindak pidana memastikan bahwa kebebasan informasi dijaga dan wartawan dapat melaksanakan tugas mereka tanpa takut menjadi korban kekerasan atau ancaman.⁸ Maka wajar bila pers bersifat mengkritik pemerintah dan bebas mengungkapkan peristiwa, selama tidak melanggar norma-norma yang berlaku. Seiring berkembangnya kebebasan pers dalam era digital tentu ancaman terhadap pers semakin beragam pula, baik oral hingga fisik.⁹

Maka dari itu pembungkaman media pers merujuk pada segala bentuk upaya untuk membatasi, menghambat, atau menekan kebebasan pers, baik melalui sensor langsung, tekanan ekonomi, kekerasan fisik, maupun serangan digital. Pembungkaman media dapat berupa penghapusan, pengurangan, atau pengaburan informasi yang seharusnya diketahui publik, sehingga membatasi kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap isu-isu penting.¹⁰

Pembungkaman juga dirasakan oleh media pers Jepang, walaupun Jepang secara umum dianggap sebagai salah satu negara yang memiliki pers paling liberal di Asia. Sistem politik Jepang, yaitu demokrasi parlementer dan konstitusional kerajaan, dikatakan sebagai salah satu sistem yang paling demokratis, bahkan mungkin terdemokratis, di Asia. Padahal terdapat adanya kenyataan yang dihadapi pers Jepang seperti media *Kisha Kurabu* sistem press club, yang mana mendapati bahwa

⁷ Fatmawati, Endang. "Kebebasan informasi kalangan milenial dalam bermedia sosial." *Jurnal Perpustakaan Universitas Airlangga* 10.2 (2020): 94-103.

⁸ Muhammad Nadzirin and Anshari Nur, "Kebebasan Pers, Tanggung Jawab Dan Etika Jurnalistik Dalam Lingkungan Media Online Yang Kompetitif", 6 (2024).

⁹ Sangga Buana and Rijal, "Kekerasan Terhadap Pers Melalui Serangan Siber: Studi Kasus Pada Media Online Tempo.Co".

¹⁰ Murtiningsih, Rr Siti, and Joko Siswanto. "Pembungkaman Pers Pada Masa Orde Baru (Refleksi Filosofis atas Kebebasan Pers Indonesia Masa Orde Baru)." *Jurnal Filsafat* 1.1 (1999): 57-65.

kebebasan itu tidak dapat sepenuhnya direalisasikan, karena ada saja upaya-upaya dari pihak yang memiliki kekuasaan untuk membatasinya, baik yang bersifat politis, sosial maupun kebudayaan.

Salah satu perwujudannya pada akhirnya berupa konvensi yang termanifestasi dalam bentuk sensor diri (self censorship). Yang ekstrimnya lagi, terdapat pengakuan dari media Jepang, bahwa telah terjadi beberapa kasus di mana menteri dari kabinet tertentu atau partai yang sedang berkuasa melakukan upaya untuk mempengaruhi atau turut campur menentukan isi (content) media demi kepentingannya sendiri, bukan kepentingan publik. Suatu kasus yang belum lama terjadi adalah kasus pemberitaan penculikan orang Jepang oleh Korea Utara. Seorang menteri dari pemerintahan PM Shinzo Abe sekarang ini telah dengan sangat berkeras meminta kepada NHK sebagai lembaga penyiaran publik (hal tersebut tidak dapat dilakukan terhadap lembaga penyiaran swasta) untuk mengutamakan pemberitaan mengenai kasus itu, dengan maksud untuk membentuk opini publik yang mendukung kebijakan Abe tentang masalah tersebut.¹¹

Kontroversi media juga dirasak oleh sebuah kantor berita nirlaba asal Amerika Serikat *Associated press* (AP) yang berbasis di *new york city*, Didirikan pada tahun 1846, AP beroperasi sebagai asosiasi koperasi tidak berbadan hukum dan memproduksi laporan berita yang didistribusikan kepada para anggotanya, surat kabar harian utama A.S., serta stasiun radio dan televisi. AP juga pernah terlibat dalam berbagai kontroversi dan tuntutan hukum, termasuk kerja sama dengan rezim Nazi,

¹¹ Ilya Revianti Sudjono Sunarwinadi, 'Budaya Sensor-Diri Dalam Kebebasan Pers Di Jepang', *Makara Human Behavior Studies in Asia*, 10.1 (2006), p. 15, doi:10.7454/mssh.v10i1.12.

kasus penyensoran, tuduhan bias pemberitaan dalam konflik Israel-Palestina, serta gugatan terkait hak cipta dan kebebasan pers.¹²

Pembungkaman media juga dirasakan oleh kantor berita TASS atau sering disebut *Telegraph Agency of the Soviet Union*, kantor berita milik negara Rusia yang didirikan pada tahun 1904. Merupakan kantor berita terbesar di Rusia dan salah satu yang terbesar di dunia. Terdaftar sebagai Badan Usaha Milik Negara Federasi, TASS dimiliki oleh pemerintah Rusia dan berkantor pusat di Moskow.¹³ Dalam beberapa tahun terakhir ini kantor berita TASS mendapatkan kontroversi yang berbentuk kritikan, dimana kantor berita tersebut dianggap sebagai propaganda negara, yang digunakan untuk menyebarkan informasi yang bias dan terkadang menyesatkan. Pada tahun 2022, Aliansi Kantor Berita Eropa (EANA) menanggukhan keanggotaan TASS karena dinilai tidak mampu menyampaikan berita secara objektif dan independen. Selain itu, perusahaan media besar seperti Getty Images memutuskan hubungan kerja sama dengan TASS setelah invasi Rusia ke Ukraina, dengan alasan pelanggaran terhadap kebijakan editorial.

Lebih lanjut, TASS diduga menyebarkan klaim yang tidak berdasar dari pejabat Rusia, termasuk tuduhan bahwa Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy melarikan diri dari Kyiv, serta tuduhan bahwa Ukraina tengah mempersiapkan bom nuklir kotor (dirty bomb). Tuduhan-tuduhan ini telah dibantah oleh pihak Ukraina dan komunitas internasional serta dianggap

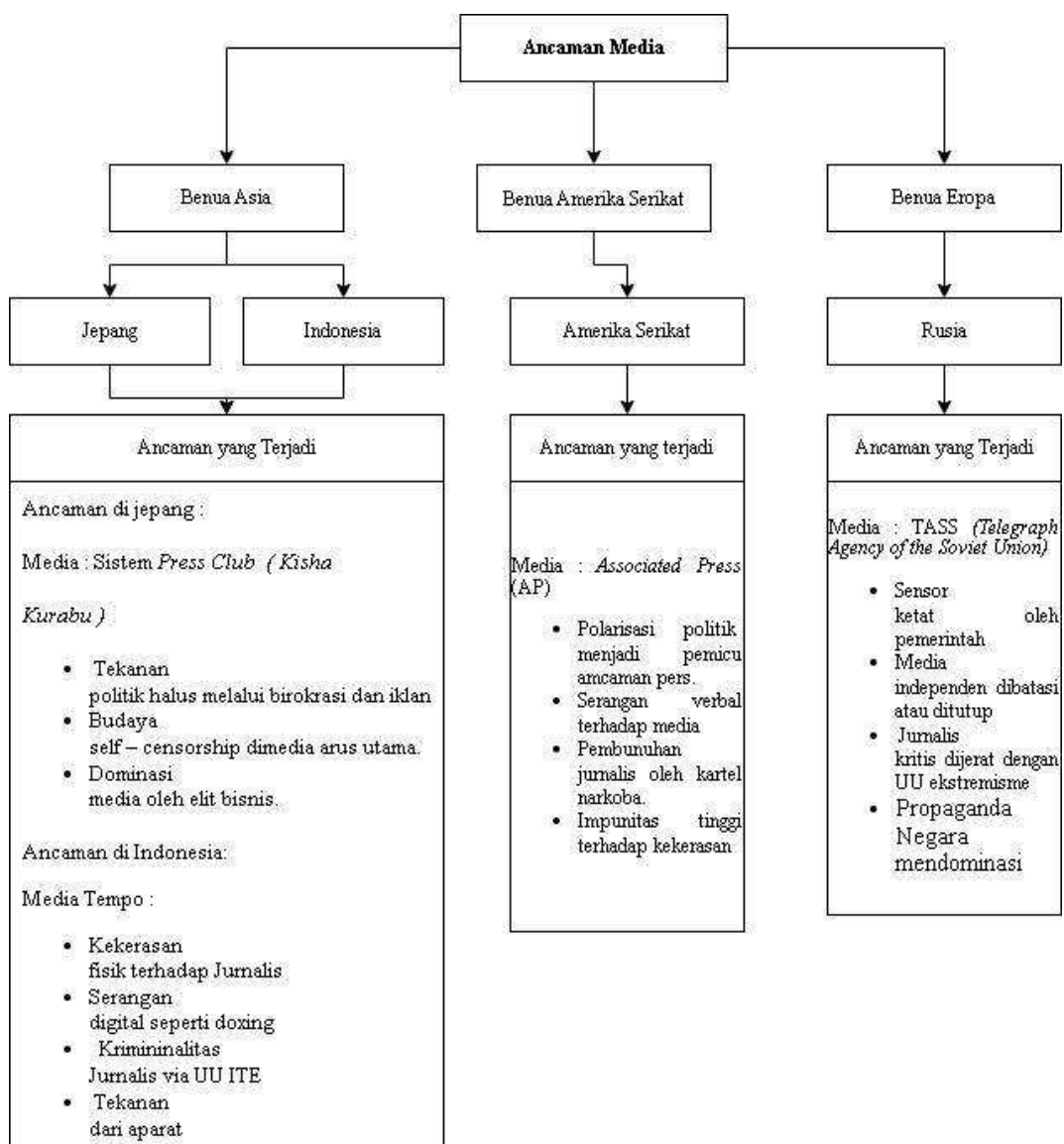
¹² C. A., 'Associated Press Fakes', *Science*, 25.638 (1907), pp. 469–469, doi:10.1126/science.25.638.469-c.

¹³ Reynaldo De Archellie, 'Diplomasi Publik Rusia Di Indonesia: Pendekatan, Aktor, Dan Instrumen', 1.March (2022), doi:10.7454/multikultura.v1i1.1083.

sebagai bagian dari kampanye disinformasi yang lebih luas.¹⁴ Tragedi pembungkaman media jurnalistik tidak hanya terjadi di luar negeri, tetapi juga menjadi bagian dari fenomena nyata dan realitas yang menyedihkan di Indonesia. Sejumlah kasus menunjukkan bagaimana kebebasan pers di tanah air kerap terancam oleh intervensi politik, tekanan aparat, dan kekuatan oligarki.

Bagan 3 Benua yang Mendapatkan diskriminasi Media.

Bagan 1.1



¹⁴ Federal State Unitary, Headquarters Moscow, and Andrey Kondrashov, *‘History 1902’*, no. December 1902 (1904).

Sebagai pilar utama demokrasi kebebasan pers seharusnya menjadi jaminan agar publik mendapatkan informasi yang akurat, utuh dan independen.¹⁵ Namun realitas menunjukkan bahwa diskriminasi dan pembungkaman media masih terjadi secara nyata dan sistematis di berbagai belahan dunia, bahkan di negara – negara yang secara formal menganut sistem demokrasi.¹⁶

Di tengah tantangan demokrasi dan kebebasan pers di Indonesia, kerja-kerja jurnalistik investigatif kerap bersinggungan dengan kekuasaan dan kepentingan besar. Media yang berani mengungkap praktik korupsi, penyalahgunaan wewenang, atau pelanggaran hukum sering kali tidak hanya berhadapan dengan gugatan hukum, tetapi juga ancaman fisik dan teror psikologis. Padahal dalam ekosistem demokrasi, jurnalisme investigasi memiliki peran vital sebagai alat control terhadap kekuasaan dan pelanggaran kepentingan publik.¹⁷ Mengingat hakekat, bahwa tujuan yang sangat mulia dan cara kerja yang sangat baik dari jurnalistik investigasi untuk mengungkapkan sebuah kebenaran dan membuat masyarakat terhindar dari sesuatu yang tidak di inginkan karena media massa mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pembaca, dan pendengar.

Hal ini menunjukkan bahwa praktik jurnalisme investigatif tidak hanya membutuhkan keterampilan teknis dan integritas, tetapi juga

¹⁵ Siagian, Agus. *HUKUM PERS: Menjamin Kebebasan Pers Berbasis Keadilan*. CV. Gita Lentera, 2025.

¹⁶ Aula, Siti Khodijah Nurul. "Potret Diskriminasi terhadap Kelompok Minoritas Ahmadiyah di Media Online." *RELIGI: Jurnal Studi Agama-Agama* 17.2 (2021): 1-16.

¹⁷ Harmonis, 'Jurnalistik Investigasi', *Jurnal Komunikasi*, 3.1 (2006), pp. 7–13 <<https://komunikologi.esaunggul.ac.id/index.php/KM/article/download/23/23>>.

keberanian menghadapi risiko. Media atau pers adalah salah satu gerakan kelompok demokrasi diluar pemerintahan. Melalui praktik jurnalisme media menegakan demokrasi dalam kapasitasnya sebagai *wath dog* (anjing penjaga).¹⁸ Dengan kebebasan informasi media tidak takut lagi diganggu, disensor, dibredel, seperti era orde baru.

Saat ini, media massa telah memasuki era konvergensi, yang berkembang seiring dengan kemajuan teknologi, terutama melalui hadirnya internet dan proses digitalisasi informasi. Konvergensi media menggabungkan tiga elemen utama, yaitu komputasi, komunikasi, dan konten. Dalam lingkup perusahaan, konvergensi ini menyatukan entitas yang bergerak di bidang teknologi informasi (komputer), jaringan telekomunikasi, serta penyedia konten seperti penerbit buku, surat kabar, majalah, stasiun televisi, radio, musik, film, dan hiburan lainnya.¹⁹ Secara umum, konvergensi media didefinisikan sebagai penggabungan media massa dengan teknologi digital yang berkembang saat ini. Berbagai jenis media, seperti majalah, koran, radio, televisi digabungkan menjadi satu platform yang sama. Konvergensi media sendiri timbul seiring dengan berkembangnya teknologi, khususnya peralihan teknologi analog ke digital.) Tempo juga melakukan konvergensi media. Diera jaman sekarang internet dan media sosial sangat berguna bagi semua orang.²⁰

Tak mau ketinggalan kini Tempo juga melakukan konvergensi media. Diera jaman sekarang internet dan media sosial sangat berguna

¹⁸ Dudi Sabil Iskandar, 'Konstruksi Pers Dalam Membangun Informasi Sehat Memperkokoh Ketahanan Nasional', *Kontruksi Pers Dalam Membangun Informasi Sehat Memperkokoh Ketahanan Nasional*, 2015, p. h.42-52.

¹⁹ Ilham Gemiharto, 'Teknologi 4G-Lte Dan Tantangan Konvergensi Media Di Indonesia', *Jurnal Kajian Komunikasi*, 3.2 (2015), pp. 212–20, doi:10.24198/jkk.vol3n2.10.

²⁰ Tri Agus Susanto, 'Podcast —Podcas Bocor Alus Politik Tempo: Podcast Tempo Versus Erick Thohir', *JOELS: Journal of Election and Leadership*, 4.2 (2023), pp. 110–19, doi:10.31849/joels.v4i2.15747.

bagi semua orang. Perkembangan teknologi membuat semua orang mudah untuk mengakses informasi melalui komputer, handphone atau televisi. Dampaknya keberadaan media cetak yang dulu hampir setiap rumah berlangganan kini mulai tidak diminati lagi oleh sebagian masyarakat. Dan konvergensi media membuat sebagian media cetak beralih ke media digital untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Internet dan media sosial membuat kinerja lebih cepat sehingga dapat menghasilkan produktivitas yang dihasilkan. Media sosial yang sering digunakan masyarakat saat ini adalah whatsapp, facebook, twitter, instagram dan media sosial lainnya.

Podcast Bocor Alus Politik Media Tempo merupakan perluasan dari isi majalah Tempo. Sejumlah informasi yang disampaikan di podcast tersebut pun telah dimuat atau akan ditulis di majalah Tempo yang terbit setiap pekan. Menurut Pemimpin Redaksi Majalah Tempo Setri Yasra, siaran 'Bocor Alus Politik' merupakan inovasi produk jurnalistik dari Kelompok Tempo Media. Tujuannya adalah menyebarluaskan informasi yang telah diverifikasi untuk kepentingan publik.

Dalam ranah media massa, independensi merupakan roh yang menghidupinya. Kerja media tidak sekedar persoalan teknis menyajikan berita, tetapi di dalamnya mengandung ideologi memberikan informasi untuk pemberdayaan masyarakat. Untuk itu, media harus menegakkan independensi dan netralitas. Dalam perspektif teori normatif, media massa harus bebas dari kontrol pemerintah yang berlebihan serta dari kelompok kepentingan tertentu, agar independen media dapat memberitakan fakta sosial dan memenuhi kebutuhan khalayak. Sebab itu, langkah penting

dalam pengejaran kebenaran dan memberi informasi kepada warga bukanlah netralitas, melainkan independensi.²¹

Pada dasarnya terdapat beberapa teori pers sebagai penjelas tentang gagasan bagaimana media beroperasi dalam sistem nilai sosial, ekonomi, dan politik.²² Secara umum disepakati bahwa media diharapkan untuk menjalankan tiga fungsi dasar, yaitu menginformasikan, mendidik, dan menghibur. Akan tetapi, beberapa akademisi, yang paling terkenal di antaranya Dennis McQuail, telah berupaya untuk membuat studi yang lebih kompleks tentang teori pers, terutama dalam hal penjelasannya tentang gagasan untuk beroperasi dengan sistem nilai sosial tertentu. Hal ini menunjukkan bagaimana pers beroperasi di bawah berbagai lingkungan sosial dan politik.

Teori – teori pers biasanya disebut sebagai teori normatif, dalam hal ini teori normatif adalah teori yang berusaha menempatkan struktur dan kinerja media dalam lingkungan tempat dia beroperasi yaitu dalam pengamatan bagaimana situasi tempat pers itu beroperasi.²³ Menurut Siebert, dkk (1956), sejak awal komunikasi massa, hanya ada dua teori media yaitu teori otoriter dan libertarian yang berpusat pada struktur pemerintahan, struktur kepemilikan, dan dimensi sosial - politik masyarakat tempat media beroperasi. Asal usul teori normatif pers dilihat dari dua sudut pandang yang berlawanan "Kekuasaan absolut radikal negara atau partai yang berkuasa" dan "Liberalisme Klasik". Adapun teori

²¹ Urgensi Perubahan Kebijakan and Penegakkan Independensi Media, 'Urgensi Perubahan Kebijakan Untuk Penegakkan Independensi Media Di Indonesia', *Jurnal Komunikasi*, 10.1 (2015), pp. 29–39, doi:10.20885/komunikasi.vol10.iss1.art4.

²² Omolola Oluwasola, 'The Normative Theories of the Press in the Digital Age: A Need for Revision', *SSRN Electronic Journal*, 4.2 (2020), pp. 27–36, doi:10.2139/ssrn.3678282.

²³ Omolola Oluwasola, 'The Normative Theories of the Press in the Digital Age: A Need for Revision', *SSRN Electronic Journal*, 2020, pp. 1–20, doi:10.2139/ssrn.3678282.

– teori tersebut adalah teori otoriter, teori media soviet (komunis), teori media libertarian dan teori media tanggung jawab sosial.

Dalam konteks teori media normatif, peristiwa teror terhadap *Tempo* dapat ditafsirkan sebagai bentuk tekanan otoritarian yang masih eksis dalam sistem demokrasi formal. Berdasarkan teori otoritarian, media seharusnya tunduk kepada kekuasaan dan tidak memiliki ruang untuk mengkritik pemerintah atau kelompok dominan.²⁴ Meskipun Indonesia menganut sistem demokrasi, praktik kekuasaan represif terhadap media investigatif seperti yang dialami *Tempo* mencerminkan bahwa unsur-unsur otoritarianisme masih hidup dalam bentuk intimidasi dan teror.

Sebaliknya, teori libertarian menempatkan media sebagai institusi yang bebas dari campur tangan negara, berfungsi untuk menyampaikan informasi secara independen, serta mengawasi kekuasaan.²⁵ Dalam praktiknya, *Tempo* berupaya menjalankan fungsi tersebut melalui program Podcast Bocor Alus Politik Media Tempo, meski harus menghadapi risiko yang tinggi. Namun, kebebasan yang diperjuangkan dalam teori libertarian tidak selalu berdiri sendiri tanpa kendala.

Oleh karena itu, teori tanggung jawab sosial (social responsibility theory) hadir sebagai pengimbang yang menekankan bahwa media tidak hanya harus bebas, tetapi juga bertanggung jawab dalam menyampaikan informasi yang akurat dan bermanfaat bagi publik.²⁶ Melalui lensa teori ini, keberanian *Tempo* dalam melanjutkan program investigatifnya setelah teror dapat dilihat sebagai komitmen untuk menjaga keseimbangan antara

²⁴ Ido Prijana dkk Hadi, *Buku Ajar Komunikasi Massa*, 2021 <[https://repositori.dosen.ulm.ac.id/bitstream/handle/123456789/17579/Buku_Ajar_Komunikasi_Bisnis_\(ABKA_3208-2_SKS\).pdf?sequence=1](https://repositori.dosen.ulm.ac.id/bitstream/handle/123456789/17579/Buku_Ajar_Komunikasi_Bisnis_(ABKA_3208-2_SKS).pdf?sequence=1)>.

²⁵ _Pengantar_Teori_Pers_Libertarian (1)‘.

²⁶ _Pengantar_Teori_Pers_Tanggung_Jawab_Sosi‘.

kebebasan pers dan tanggung jawab sosial di tengah tekanan yang mengancam.

B. Rumusan Masalah

Setelah penjelasan sebelumnya, maka perumusan masalah dari penelitian ini berdasarkan pada konteks penelitian yang memfokuskan pada Analisis Independensi Program Investigatif Bocor Alus Media Tempo sesudah teror Kepala Babi Dan Tikus maka dengan demikian penelitian ini mengangkat :

1. Bagaimana independensi program investigatif Bocor Alus media Tempo dalam mengimplementasikan prinsip ideologis jurnalisme?
2. Bagaimana independensi program investigatif Bocor Alus media Tempo dalam mempertahankan prinsip dasar pemberitaan Sesudah teror kepala babi dan bangkai tikus?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana bentuk independensi program investigatif Podcast Bocor Alus Politik dari media Tempo dalam mengimplementasikan Prinsip Ideologis Jurnalisme.
2. Untuk mengetahui bagaimana bentuk independensi program investigatif Podcast Bocor Alus Politik dari media Tempo dalam mengimpertahankan prinsip dasar pemberitaan Sesudah teror kepala babi dan bangkai tikus.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan mampu bermanfaat dengan baik, dari segi hal teoritis maupun dari segi hal praktis, sehingga dapat bermanfaat bagi semua pihak.

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis terhadap pemahaman tentang dinamika kebebasan pers dan independensi media, khususnya dalam konteks adanya ancaman dan intimidasi. Hasil penelitian ini dapat memperkaya literatur akademik mengenai bagaimana tekanan eksternal, seperti tindakan teror, dapat memengaruhi praktik jurnalisme investigasi.

Penelitian juga berpotensi untuk memperdalam pemahaman dan pengembangan konsep independensi media, terutama dalam konteks program jurnalisme investigasi. Analisis terhadap dimensi editorial dan sumber informasi Sesudah teror dapat memberikan perspektif baru mengenai bagaimana independensi media dapat teruji dan termanifestasi dalam situasi penuh tekanan. Selanjutnya penelitian ini akan menjadi studi kasus yang relevan mengenai tantangan yang dihadapi media di Indonesia dalam menjalankan fungsi kontrol sosialnya. Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan perbandingan bagi penelitian serupa di konteks media dan negara lain yang menghadapi isu serupa.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi peneliti

Penelitian ini diharapkan mampu meningkatkan kompetensi penulis dalam melaksanakan riset ilmiah, yang meliputi tahapan

perumusan masalah, penelaahan literatur, pengumpulan data (apabila tahapan ini dilakukan), serta analisis dan interpretasi data guna penarikan simpulan. Proses ini berkontribusi pada penguatan kemampuan analitis dan pemecahan masalah dalam konteks studi ilmu komunikasi.

Pendalaman Pemahaman Terhadap Isu Kebebasan Pers dan Jurnalisme Investigasi: Melalui proses investigasi dan analisis dalam penelitian ini, penulis akan memperoleh pemahaman yang lebih mendalam dan komprehensif mengenai dinamika kebebasan pers, independensi media, serta tantangan yang dihadapi oleh praktik jurnalisme investigasi di Indonesia. Pengetahuan ini akan memperkaya wawasan penulis terkait relasi antara kekuasaan dan media.

Proses analisis terhadap kasus intimidasi media dan implikasinya terhadap independensi menuntut kemampuan berpikir kritis yang terasah. Penelitian ini akan melatih penulis dalam mengevaluasi informasi secara objektif, mengidentifikasi potensi bias, serta merumuskan argumentasi yang solid berdasarkan landasan bukti yang relevan.

b. Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat praktis yang signifikan bagi kalangan akademisi, khususnya dosen, peneliti, dan mahasiswa yang menaruh perhatian pada isu-isu kebebasan pers, independensi media, jurnalisme investigasi, serta bentuk-bentuk intimidasi yang dihadapi oleh media, terutama media independen. Dengan menyajikan data, analisis,

dan temuan empiris yang berkaitan dengan dinamika kebebasan pers dan tantangan yang dihadapi oleh media dalam menjalankan fungsi kontrol sosialnya, penelitian ini dapat dijadikan sebagai sumber rujukan yang relevan dan aktual dalam pengembangan teori maupun pembelajaran di bidang ilmu komunikasi, studi media, dan jurnalisme.

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai landasan untuk mendesain kajian-kajian ilmiah lanjutan yang lebih mendalam, baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Akademisi dapat mengembangkan penelitian serupa dengan fokus yang lebih spesifik, seperti strategi perlawanan media terhadap tekanan politik, analisis framing dalam peliputan isu-isu sensitif, atau dampak jangka panjang intimidasi terhadap kualitas jurnalisme. Dengan demikian, penelitian ini membuka ruang diskusi akademik yang lebih luas dan mendukung terbentuknya perspektif kritis terhadap realitas media di Indonesia, terutama dalam konteks demokrasi dan hak atas informasi.

c. Bagi masyarakat umum

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat praktis bagi masyarakat umum dengan meningkatkan kesadaran akan pentingnya kebebasan pers dan independensi media dalam kehidupan demokratis. Melalui pemaparan mengenai tantangan yang dihadapi oleh jurnalis, terutama dalam praktik jurnalisme investigasi dan tekanan yang berasal dari berbagai bentuk intimidasi, masyarakat dapat memperoleh pemahaman yang lebih

utuh mengenai peran vital media dalam menyajikan informasi yang akurat, jujur, dan berpihak pada kepentingan publik.

Dengan pemahaman tersebut, diharapkan masyarakat akan semakin menghargai dan mendukung keberadaan media independen serta bersikap lebih kritis terhadap upaya-upaya yang dapat mengancam kebebasan pers. Dukungan dari masyarakat menjadi aspek penting dalam menciptakan ekosistem media yang sehat dan bertanggung jawab, di mana informasi tidak hanya menjadi alat konsumsi, tetapi juga instrumen untuk mendorong transparansi, akuntabilitas kekuasaan, dan perlindungan hak-hak publik atas informasi.

E. Penelitian Terdahulu

Landasan teori memuat dua hal yakni kajian pustaka dan peneliti terdahulu. Agar tidak tumpang tindih dengan penelitian yang sudah dilaksanakan dan untuk memperkuat penelitian yang akan dicapai maka peneliti menggunakan teori yang dianggap paling tepat untuk penelitian yang berkaitan dengan analisis investigasi program bocor alus tempo Sesudah teror kepala babi dan bangkai tikus, serta peneliti akan melakukan kajian pustaka yang berkaitan dengan masalah yang dikaji dan peneliti terdahulu yang dianggap paling relevan dengan penelitian ini.

Adapun penelitian terdahulu yang berkaitan dengan tema yang diangkat peneliti sebagai berikut:

1. Mengukur Keseimbangan Konten Podcast Podcas Bocor Alus Politik Tempo dalam Membahas Isu Pemilu Presiden 2024

Penelitian oleh Izzuddin Hamid, Pandan Yudhapramesti, Gema Nusantara Bakry dari Universitas Padjadjaran. Penelitian ini membahas seberapa seimbang konten dalam podcast Bocor Alus Politik milik Tempo saat mengangkat isu Pemilihan Umum Presiden 2024. Fokusnya pada apakah podcast ini menyajikan informasi secara netral, adil, dan tidak berpihak, sesuai dengan prinsip jurnalistik, terutama dalam menyikapi dinamika tiga pasangan calon presiden dan wakil presiden pada Pilpres 2024.

Tujuan dari penelitian tersebut yaitu untuk mengukur tingkat keseimbangan konten Podcast Podcas Bocor Alus Politik Tempo dalam membahas isu Pilpres 2024 menggunakan pendekatan analisis isi kuantitatif dengan aspek keseimbangan dari teori Objektivitas Media yang dikemukakan Westerstahl. Aspek keseimbangan diukur dengan kategori source diversity dari Christoph Spurk dan evenhanded dari Eriyanto. Penelitian terhadap 17 sampel episode, menunjukkan bahwa Podcas Bocor Alus Politik Tempo memiliki tingkat aspek keseimbangan sedang terhadap konten podcastnya.

Metode yang digunakan Penelitian ini menggunakan metode analisis isi deskriptif kuantitatif, yaitu sebuah pendekatan dalam ilmu komunikasi yang bertujuan untuk menganalisis isi pesan atau konten media secara sistematis, objektif, dan terukur. Analisis isi digunakan untuk mengetahui makna-makna yang terkandung dalam konten media, dalam hal ini adalah episode Podcast Podcas Bocor Alus Politik Tempo yang membahas isu Pemilu Presiden 2024.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Podcast Podcas Bocor Alus Politik Tempo memiliki tingkat keseimbangan sedang (50,9%) dalam

membahas isu Pilpres 2024. Dari sisi keberagaman sumber (*source diversity*), nilainya sangat rendah karena terlalu dominan membahas pemerintahan eksekutif dan kubu Prabowo-Gibran, sementara kelompok lain kurang terwakili. Namun, dari sisi keadilan penyampaian informasi (*evenhandedness*), podcast ini sangat netral (82,34%) dan tidak memihak secara positif atau negatif. Secara umum, meskipun kurang seimbang dalam representasi sumber, podcast ini tetap menjaga netralitas isi.

Persamaan utama adalah sama-sama menjadikan podcast Bocor Alus Politik produksi Tempo sebagai objek utama kajian, sehingga ruang lingkup penelitian berada pada medium dan konteks yang serupa, yakni jurnalisme investigatif berbasis podcast dalam media konvergensi. sama – sama menyoroti nilai-nilai fundamental dalam praktik jurnalistik seperti objektivitas, keseimbangan, dan terutama independensi, yang menjadi tolok ukur profesionalitas media dalam menjalankan fungsi kontrol sosialnya.²⁷

Terdapat perbedaan dalam penelitian yang ingin dibahas dimana jurnal yang ingin dibahas lebih menyoroti ancaman atau kekerasan terhadap jurnalis. penelitian tentang independensi Bocor Alus justru berangkat dari peristiwa konkret berupa teror terhadap redaksi Tempo, seperti pengiriman kepala babi dan bangkai tikus serta aksi doxing terhadap jurnalis, yang secara langsung mengancam keselamatan dan kebebasan pers. Fokusnya bukan lagi sekadar konten, melainkan bagaimana media bertahan dari tekanan politik, kekerasan, dan bentuk pembungkaman simbolik di era digital. Dalam konteks ini, perbedaan

²⁷ Izzuddin Hamid, *‘Mengukur Keseimbangan Konten Podcast Podcas Bocor Alus Politik Tempo Dalam Membahas Isu Pemilu Presiden 2024’*, 5.2 (2024), pp. 166–79.

utamanya terletak pada pendekatan jurnal CARAKA mengkaji produk jurnalistik secara isi, sementara latar belakang independensi Bocor Alus menyoroti proses kerja jurnalistik dalam kondisi krisis.

2. Analisis konten bocor alus edisi kursi menteri cabinet Prabowo – Gibran, —Golkar minta banyak, Jokowi pun mau di YouTube Tempo.co.

Skripsi karya Subhan Muhammad (2024) yang berjudul —Analisis Isi pada Konten Bocor Alus Edisi Kursi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran, Golkar Minta Banyak, Jokowi Pun Mau. Penelitian ini membahas isi konten episode tertentu dari Podcast Podcas Bocor Alus Politik Tempo yang menyoroti dinamika politik menjelang pembentukan kabinet setelah Pilpres 2024. Tujuan utama penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana konten tersebut disusun dan sejauh mana informasi yang disajikan mencerminkan prinsip sistematis dan objektivitas dalam jurnalisme politik. Penelitian ini menggunakan metode analisis isi kualitatif deskriptif, dengan fokus pada struktur penyajian pesan, arah isi, serta teknik narasi yang digunakan dalam membangun opini publik. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori agenda setting dan objektivitas media, yang menempatkan media sebagai aktor penting dalam membentuk persepsi masyarakat terhadap isu-isu politik.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Tempo melalui podcast Bocor Alus Politik menampilkan narasi politik yang cukup tajam dan terstruktur, dengan penggunaan sumber-sumber kredibel meskipun tidak selalu berimbang dari sisi keragaman narasumber. Penyajian informasi dilakukan secara lugas, namun tetap mengarah pada

pembentukan opini kritis terhadap pihak-pihak yang sedang berkuasa. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun media tersebut berupaya menjaga objektivitas, tetap terdapat tantangan dalam menjaga keberimbangan, terutama ketika membahas isu-isu sensitif yang melibatkan elite politik.

Penelitian ini memiliki keterkaitan langsung dengan skripsi berjudul —Analisis Independensi Program Investigatif Bocor Alus Tempo Sesudah teror Kepala Babi dan Bangkai Tikus, karena keduanya membahas cara kerja jurnalistik investigatif Tempo dalam menghadapi tekanan eksternal. Jika penelitian Subhan Muhammad lebih fokus pada isi konten dari sisi konstruksi pesan dan arah opini, maka skripsi Anda menyoroti aspek independensi media dalam menjalankan fungsi investigatif di tengah situasi intimidatif, termasuk teror fisik dan digital yang dialami redaksi Tempo. Keduanya memperlihatkan bahwa Tempo, melalui Bocor Alus, tetap berusaha menjalankan peran kontrol sosial dan menyuarakan isu-isu publik, meskipun dihadapkan pada risiko yang mengancam kebebasan pers.

Namun hal ini terdapat perbedaan mendasar, penelitian Subhan lebih fokus pada struktur dan isi narasi media dalam situasi normal tanpa tekanan langsung, sedangkan skripsi yang akan digarap fokus pada aspek independensi media dalam situasi krisis dan intimidasi, yaitu Sesudah teror fisik terhadap redaksi Tempo. Dalam konteks tersebut, pada skripsi yang sedang dibahas tidak hanya menilai isi jurnalistik, tetapi juga menelaah sejauh mana media independen dapat tetap menjalankan fungsi kontrol sosial di tengah ancaman, kekerasan simbolik, dan tekanan politik. Dengan demikian, pada skripsi yang

seang digarap membawa dimensi yang lebih mendalam terkait kebebasan pers dan ketahanan media dalam menghadapi situasi pembungkaman yang tersembunyi namun nyata di era demokrasi digital.²⁸

3. Independensi media Tempo dan pengaruh ekonomi politik dalam praktik strukturasi.

Penelitian yang dilakukan oleh Elik Susanto pada tahun 2021 berjudul —Independensi Media Tempo dan Pengaruh Ekonomi Politik dalam Praktik Strukturasi membahas bagaimana Tempo Media Group mempertahankan prinsip independensinya dalam pemberitaan di tengah tekanan ekonomi-politik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami praktik independensi yang dijalankan oleh Tempo, serta bagaimana kepentingan ekonomi dan kekuasaan politik memengaruhi proses redaksional di dalam tubuh media tersebut.

Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan fenomenologis, yang melibatkan observasi, wawancara mendalam, serta telaah dokumen internal Tempo. Dalam kajiannya, penelitian ini menggunakan teori strukturasi Anthony Giddens untuk memahami hubungan antara agensi dan struktur dalam praktik media, serta teori ekonomi politik media dari Vincent Mosco untuk melihat dinamika kekuasaan dan kepentingan ekonomi dalam produksi berita.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun Tempo dikenal sebagai media yang independen, tetap terdapat pengaruh dari faktor eksternal seperti tekanan ekonomi, relasi dengan pengiklan, dan kedekatan dengan tokoh-tokoh politik tertentu yang secara tidak

²⁸ Rahmi, _Bab I Pendahuluan! خ حض ب , ي', *Galang Tanjung*, no. 2504 (2021), pp. 1–9.

langsung dapat memengaruhi keputusan editorial. Kendati demikian, Tempo berupaya menjaga ruang independensinya melalui prinsip jurnalisme investigatif, profesionalisme redaksi, dan penguatan struktur internal organisasi.

Penelitian ini memiliki persamaan dengan skripsi yang sedang digarap karena sama-sama membahas independensi media Tempo, serta menyoroti bagaimana tekanan dari luar (baik politik maupun ekonomi) bisa memengaruhi kebebasan redaksi. Keduanya juga sama-sama menyoroti bagaimana Tempo sebagai institusi media mencoba mempertahankan prinsip-prinsip jurnalisme kritis dan kontrol terhadap kekuasaan.

Namun, terdapat perbedaan utama dalam fokus dan konteks. Penelitian Susanto lebih menyoroti struktur internal media dan pengaruh ekonomi-politik secara sistemik, sementara skripsi Anda lebih fokus pada analisis independensi program investigatif tertentu, yakni Bocor Alus Politik, dalam situasi darurat pasca-teror fisik dan digital yang dialami redaksi Tempo. Dengan kata lain, skripsi yang sedang digarap lebih menekankan pada bagaimana independensi itu diuji secara nyata melalui peristiwa represif dan ancaman terhadap keselamatan jurnalis.

Keduanya saling melengkapi, penelitian Susanto menjelaskan kondisi struktural yang membentuk ruang independensi Tempo, sedangkan skripsi yang sedang digarap dapat memperlihatkan bagaimana independensi itu diwujudkan dalam praktik, terutama ketika menghadapi tekanan paling ekstrem, yaitu teror dan intimidasi. Kombinasi keduanya memperkuat argumen bahwa independensi media

bukan hanya soal struktur dan prinsip, tetapi juga soal keberanian dan ketahanan menghadapi risiko nyata dalam menjalankan fungsi kontrol sosial.²⁹

4. Independensi media: Pro-kontra objektivitas dan netralitas pemberitaan media.

Penelitian yang dilakukan oleh Musfialdy pada tahun 2019 berjudul —Independensi Media: Pro-Kontra Objektivitas dan Netralitas Pemberitaan Media¹ merupakan sebuah kajian kritis terhadap independensi media dalam menyampaikan informasi kepada publik, khususnya dalam konteks objektivitas dan netralitas berita. Penelitian ini bertujuan untuk menelusuri sejauh mana media mampu mempertahankan independensi editorial di tengah berbagai tekanan baik dari pihak pemilik media, afiliasi politik, maupun kepentingan ekonomi.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan analisis isi, yang diterapkan terhadap beberapa produk pemberitaan media massa untuk melihat bias dan kecenderungan arah berita. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori konstruksi sosial realitas serta teori agenda setting, yang menjelaskan bahwa media tidak sekadar menyampaikan realitas, tetapi membentuk dan memengaruhinya melalui pemilihan isu dan narasi. Media dalam banyak kasus tidak sepenuhnya netral, karena ada kepentingan struktural dan ideologis yang berpengaruh terhadap keputusan redaksional. Musfialdy menyimpulkan bahwa independensi media

²⁹ Elik Susanto, 'Independensi Media Tempo Dan Pengaruh Ekonomi Politik Dalam Praktik Strukturasi', *Jurnal Pustaka Komunikasi*, 4.1 (2021), pp. 24–38, doi:10.32509/pustakom.v4i1.1314.

bukan hanya soal kemampuan menjaga jarak dari kekuasaan, tetapi juga kemampuan untuk bertahan dari intervensi, baik secara halus (soft power) maupun secara sistemik.

Jika dikaitkan dengan penelitian yang akan digarap yang membahas program investigatif Podcas Bocor Alus Politik Tempo Sesudah teror kepala babi dan bangkai tikus, maka terdapat persamaan dalam hal fokus utama, yakni upaya media mempertahankan independensi dalam situasi yang penuh tekanan. Keduanya juga menekankan pentingnya prinsip objektivitas dan netralitas sebagai pilar dalam jurnalisme independen.

Namun, terdapat perbedaan signifikan, penelitian Musfialdy lebih menekankan pada analisis struktural dalam konten pemberitaan secara umum, tanpa fokus pada peristiwa atau media tertentu, sementara skripsi Anda secara spesifik menganalisis resiliensi program investigatif media dalam menghadapi bentuk kekerasan langsung dan nyata, seperti intimidasi fisik dan digital yang dialami redaksi Tempo. Dengan demikian, penelitian Musfialdy menjadi penting untuk memberi landasan teoritis mengenai konsep independensi dan bias media, sementara skripsi Anda akan mengisi celah kajian dengan menambahkan perspektif empirik mengenai dampak nyata kekerasan terhadap kebebasan pers dan keberanian investigasi, khususnya di tengah dinamika politik Indonesia yang semakin kompleks.³⁰

³⁰ Musfialdy Musfialdy, 'Independensi Media: Pro-Kontra Objektivitas Dan Netralitas Pemberitaan Media', *Jurnal Riset Komunikasi*, 2.1 (2019), pp. 21–28, doi:10.24329/jurkom.v2i1.50.

BAB II

LANDASAN TEORITIS

A. Media Massa

Istilah-istilah —massal, —medial, dan —komunikasil, seringkali mencakup asumsi-asumsi tertentu mengenai hakikat satu media, proses-proses yang dengannya membentuk bagian dan cara untuk berhubungan dengan proses dan hubungan sosial politik yang lebih luas. Begitupun dengan Istilah —massal atau —massal dalam bahasa Inggris seringkali dikaitkan dengan kata media dan komunikasi dalam khasanah ilmu komunikasi. Sehingga, dalam ilmu komunikasi, dijumpai istilah media massa dan komunikasi massa.³¹

Media sebagai bagian teknologi komunikasi dengan segala potensi pemanfaatannya, hanyalah salah satu bagian dari satu sistem yang ikut berperan dalam kehidupan sosial kemasyarakatan. Dengan segala kemajuannya yang spektakuler dewasa ini, media telah dimanfaatkan sedemikian rupa untuk melayani kepentingan dan kebutuhan hidup umat manusia. Sayangnya, kemajuan media terkadang terlampaui cepat dibanding laju kemajuan masyarakat. Sehingga, respon sebagian masyarakat terkadang sudah kadaluarsa berhadapan dengan kemajuan media.

Media modern seringkali dipandang sebagai perantara antara satu —dunia dan audiens. Tetapi bagi Branston, media tidak dapat diasumsikan secara seperti itu, sebagai saluran komunikasi sederhana, hanya sebagai —jendela-jendela atas dunia. Ini mungkin satu pendapat yang lebih maju

³¹ Abdul Pirol, 'Teori Media Dan Masyarakat', *Jurnal Al-Tajdid*, 4.4 (2010), pp. 0-9.

yang menilai media komunikasi tidak hanya apa yang tampak, bisa diindera sebagaimana media massa seperti TV, radio, surat kabar, dan majalah, tetapi juga hal-hal yang tersembunyi dari sesuatu pesan yang ditampilkan oleh media. Selama ini, abad ke 19 dan ke 20, yang dimaksud dalam ilmu.³²

komunikasi sebagai media massa adalah pers, radio dan televisi, film dan industri rekaman, yang secara tradisional dikelompokkan bersama di bawah judul —media massal dan kajiannya dibangun sebagai bagian dari sosiologi komunikasi massa. Jeffres (1986: 1) dalam kajiannya, membagi dua karakteristik media massa, yaitu media massa elektronik (TV, radio, film) dan media massa tercetak (surat kabar, majalah, dan buku).³³

Media massa memiliki beberapa tujuan penting dalam menyampaikan informasi ke masyarakat luas. Jika kita lihat dari media cetak seperti surat kabar, majalah, dan buku, menurut Charles Cooley (1909), media bertujuan untuk mengurangi rasa terisolasi antar manusia di berbagai belahan dunia, dan juga untuk mendorong perubahan besar dalam cara masyarakat berorganisasi dan menjalankan kehidupannya. Perubahan ini bisa terlihat dalam bidang perdagangan, politik, pendidikan, bahkan dalam urusan sosial sehari-hari seperti berbincang dan bergosip.³⁴

Meskipun pada masa itu hanya ada media cetak, namun dampaknya terhadap kehidupan sosial masyarakat sudah sangat besar. Artinya, meskipun sekarang jenis media makin beragam karena kemajuan

³² Abdul Pirol, 'Institusi Media Massa Dan Pengaruhnya Terhadap Masyarakat', *Al-Tajdid*, III (2009), p. 12.

³³ Pirol, 'Teori Media Dan Masyarakat'.

³⁴ Ari Cahyo Nugroho, 'Representasi Agenda Media Dalam Isu High-Taste Content', *Jurnal Studi Komunikasi Dan Media*, 18.1 (2014), p. 105, doi:10.31445/jskm.2014.180106.

teknologi, pada dasarnya semua itu hanya memperluas fungsi dasar media seperti yang sudah dimulai oleh media cetak zaman dulu.

Khusus untuk surat kabar, media ini banyak digunakan untuk kepentingan komersial (bisnis), politik, pendidikan, dan juga informasi hiburan atau gosip. Namun, bagaimana media menyampaikan isi dan dampaknya kepada masyarakat tergantung pada sistem politik di negara tersebut. Menurut teori normatif, jika media berada di negara yang menganut sistem pers bebas (libertarian), maka isi dan arah media sangat ditentukan oleh kebijakan redaksi media itu sendiri. Tapi jika berada di sistem otoritarian, maka pemerintah sangat menentukan apa yang boleh dan tidak boleh disampaikan oleh media.

Meskipun media dipengaruhi oleh sistem politik tempat mereka beroperasi, sebenarnya media juga merupakan bagian dari sistem sosial yang saling terkait. Dalam sistem ini, media tidak bekerja sendirian. Mereka terhubung dengan berbagai pihak seperti pembaca (audiens), lembaga riset, pihak distribusi, produser konten, pengiklan, sponsor, dan badan pengawas atau pengendali. Semua elemen ini bekerja sama dan saling bergantung untuk menjalankan fungsi media secara keseluruhan.³⁵

B. Independensi Media

1. Konsep Dasar Independensi Media

Independensi dalam praktik jurnalistik dimaknai sebagai kebebasan dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip ideologis jurnalisme secara utuh. Sikap ini merupakan aspek esensial yang harus dimiliki

³⁵ Hasyim Ali Imran, *Media Massa, Khalayak Media, The Audience Theory, Efek Isi Media Dan Fenomena Diskursif*, *Jurnal Studi Komunikasi Dan Media*, 16.1 (2013), p. 47, doi:10.31445/jskm.2012.160103.

oleh setiap lembaga media massa sebagai bagian dari komitmen terhadap integritas dan objektivitas kerja jurnalistik.

McQuail 2006 berpendapat bahwa, berita adalah materi yang dikonsumsi khalayak atas peristiwa di luar pengetahuan mereka. Kualitas berita menjadi penting dengan didukung oleh akurasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Itulah perlunya dapur pemberitaan berikut jurnalisnya memiliki independensi dalam menentukan arah pemberitaan medianya. Tidak boleh ada pihak luar mengintervensi atau mencampuri urusan dapur redaksi. Kebebasan sebagai prinsip kerja media, yaitu independen guna menjaga kepercayaan kepada audiens.³⁶ Dalam hal ini, independensi menjadi standar kualitatif yang memungkinkan institusi media untuk menjalankan fungsinya secara profesional tanpa adanya intervensi atau tekanan dari pihak-pihak eksternal.

Dalam ranah media massa, independensi tercermin dari kemampuan redaksi untuk tetap konsisten pada prinsip dasar pemberitaan, seperti keberimbangan informasi (*cover all side*) dan orientasi pada kepentingan publik sebagai prioritas utama. Dengan demikian, independensi media dapat dipahami sebagai otonomi ruang redaksi dalam proses produksi berita, yang bebas dari pengaruh, tekanan, maupun kepentingan politik dan ekonomi pihak tertentu.³⁷

Merujuk pada pemikiran McQuail (2006), independensi media tidak hanya dimaknai sebagai ketiadaan intervensi eksternal terhadap ruang redaksi, tetapi juga sebagai kemampuan institusi media untuk

³⁶ Susanto, *Independensi Media Tempo Dan Pengaruh Ekonomi Politik Dalam Praktik Strukturasi*.

³⁷ Nurul Khotimah —*Tantangan Independensi Media Dalam Pemilu : KASUS KOMPAS.COM*”. (2019).

mempertahankan nilai - nilai ideologis jurnalisisme sekaligus standar profesional dalam proses produksi berita. Dengan demikian, independensi memiliki dua ranah yang saling berkaitan, yaitu ranah ideologis yang berhubungan dengan orientasi nilai dan sikap redaksional, serta ranah operasional yang tercermin dalam penerapan prinsip dasar pemberitaan.

a. Prinsip Ideologis

Sebagai jendela yang memungkinkan khalayak mengetahui peristiwa di balik kekuasaan, media dituntut menjunjung objektivitas dan keberpihakan pada kebenaran. Publik menghendaki informasi yang tidak dikendalikan kepentingan politik, ekonomi, maupun tekanan pihak tertentu. Kovach dan Rosenstiel menegaskan bahwa kewajiban pertama jurnalisisme adalah pada kebenaran; pencarian kebenaran yang tidak memihak menjadi pembeda utama jurnalisisme dari bentuk komunikasi lain. Prinsip ini menjadi fondasi ideologis bagi jurnalis investigatif untuk tetap berdiri pada kepentingan publik meskipun berhadapan dengan risiko dan intimidasi.³⁸

Objektivitas dalam praktik jurnalistik dipahami sebagai upaya menghadirkan realitas secara jujur, cermat, dan dapat dipertanggungjawabkan. McQuail menempatkan objektivitas sebagai syarat penting agar khalayak dapat menilai kredibilitas sebuah berita. Bagi media investigatif seperti *Bocor Alus Tempo*, objektivitas bukan sekadar teknik peliputan, melainkan sikap ideologis untuk tidak tunduk pada tekanan, termasuk setelah terjadinya teror

³⁸ Musfialdy, 'Independensi Media: Pro-Kontra Objektivitas Dan Netralitas Pemberitaan Media'.

terhadap redaksi.³⁹ Dengan demikian, independensi diuji dari kemampuan media mempertahankan cara pandang yang berorientasi pada kebenaran, bukan pada rasa takut atau kepentingan pragmatis. Informasi disebut objektif apabila akurat, lengkap, memisahkan fakta dan opini, serta memberikan ruang bagi berbagai perspektif secara berimbang. Prinsip ini menuntut jurnalis bekerja secara nonpartisan, tidak sensasional, dan berani mengungkap temuan meski berpotensi merugikan pihak berkuasa. Dalam konteks program *Bocor Alus Tempo*, prinsip tersebut terlihat dari konsistensi mengkritik penyalahgunaan kekuasaan, pemilihan narasumber yang beragam, serta keberanian membuka metode kerja kepada publik sebagai bentuk akuntabilitas.

Idealisme jurnalisisme mengandaikan bahwa berita harus merefleksikan peristiwa sebagaimana terjadi di lapangan. Media diposisikan sebagai saluran kepentingan publik, bukan corong kekuasaan. Karena itu, prinsip ideologis jurnalis tidak berhenti pada klaim netralitas, tetapi diwujudkan melalui keberanian bersikap kritis dan menolak sensor diri.⁴⁰ Bagi Podcast Bocor Alus Politik Tempo, sikap ideologis tersebut menjadi dasar untuk tetap memproduksi liputan investigatif sebelum maupun sesudah teror, sehingga independensi tidak hanya menjadi slogan, melainkan praktik nyata dalam setiap episode pemberitaan.

³⁹ Hamid, 'Mengukur Keseimbangan Konten Podcast Podcas Bocor Alus Politik Tempo Dalam Membahas Isu Pemilu Presiden 2024'.

⁴⁰ Andi Edwin Rewira, 'Jurnalistik : Antara Jurnalisme Dan Idealisme Di Tengah Pusaran Dinamika Global', 22.2 (2024), pp. 57–67.

b. Prinsip Dasar Pemberitaan

Dalam kerangka independensi media, kebebasan redaksi pada jurnalisme podcast tidak hanya diukur dari ketiadaan intervensi eksternal, tetapi juga dari konsistensi dalam menjalankan prinsip dasar pemberitaan. McQuail menegaskan bahwa independensi baru bermakna ketika tampak dalam proses produksi konten yang menjunjung objektivitas, akurasi, dan keberimbangan.⁴¹ Pada media berbasis audio seperti Podcast Bocor Alus Politik Tempo, prinsip tersebut tercermin melalui cara jurnalis merancang alur narasi, memverifikasi temuan investigatif, memilih narasumber, serta menjelaskan konteks kepada pendengar secara transparan. Dengan demikian, independensi tidak berhenti pada klaim editorial, melainkan hadir dalam setiap tahap produksi podcast investigatif.

Produksi berita dalam format podcast memiliki karakter berbeda dengan media cetak, namun standar substansi jurnalistiknya tetap sama. Informasi yang disampaikan harus akurat, lengkap, netral, dan berimbang meskipun dikemas dalam bentuk percakapan dan narasi audio. Mondry menekankan bahwa akurasi dan kecermatan merupakan prasyarat agar publik dapat mempercayai informasi jurnalistik; karena itu jurnalis wajib melakukan proses cek - ricek, konfirmasi sumber, serta verifikasi dokumen sebelum materi disiarkan. Kovach dan Rosenstiel juga menempatkan verifikasi sebagai disiplin utama yang membedakan karya jurnalistik dari

⁴¹ Dyananto, Fika Soraya. "Netralitas Media Dalam Pemberitaan Tentang Kebijakan Pemerintah (Studi Analisis Isi Tentang Netralitas Media dalam Pemberitaan tentang Kebijakan Pemerintah Terkait Isu Kenaikan Bahan Bakar Minyak pada Surat Kabar Harian Kompas dan Suara Merdeka Edisi 1 M." (2013).

sekadar opini atau rumor.⁴² Dalam konteks penelitian ini, prinsip dasar pemberitaan pada *Bocor Alus Tempo* dipetakan ke dalam empat aspek utama:

1). Akurasi & Verifikasi

Akurasi merupakan inti dari kualitas berita. Akurasi dimaknai sebagai ketepatan dan kebenaran informasi, baik pada detail faktual seperti nama, angka, waktu, maupun pada kesan umum yang dibangun dalam narasi. Ketepatan penyajian data sangat menentukan kredibilitas media dan jurnalis, karena kesalahan kecil dapat meruntuhkan kepercayaan publik. Oleh sebab itu, jurnalis wajib melakukan proses cek dan ricek, konfirmasi kepada berbagai sumber, serta verifikasi berlapis sebelum berita dipublikasikan.

Dalam konteks jurnalisme investigatif seperti Podcast *Bocor Alus Politik Media Tempo*, verifikasi tidak hanya bersifat formal, tetapi juga melibatkan penelusuran dokumen, pencocokan kesaksian, dan klarifikasi kepada pihak yang diberitakan. Mekanisme ini menjadi benteng agar liputan tetap dapat dipertanggungjawabkan meskipun menyentuh isu sensitif dan berpotensi memicu tekanan eksternal.⁴³

2) Objektivitas

Objektivitas menuntut jurnalis untuk menyajikan realitas secara jujur dan tidak memihak. Sebuah berita dikatakan objektif

⁴² A J I Denpasar and others, *„JURNAL ILMU KOMUNIKASI HINDU“*, 2023, pp. 484–93.

⁴³Rengganis, Aulia Oktavia. *Tingkat Akurasi Pemberitaan Ancaman Resesi Global 2023 di Media Online Detik. Com*. BS thesis. Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2023.

apabila mampu memisahkan fakta dari opini, tidak disusun berdasarkan kepentingan pribadi, serta berorientasi pada kepentingan publik. Meskipun dalam praktik media sering muncul intervensi kepentingan, objektivitas tetap menjadi standar ideologis yang harus diperjuangkan oleh redaksi.⁴⁴

Bagi *Bocor Alus Tempo*, objektivitas menjadi landasan agar kritik terhadap kekuasaan tidak berubah menjadi propaganda tandingan. Sikap tidak memihak ini tercermin dari cara redaksi menyusun narasi, memilih data yang relevan, dan menghindari dramatisasi berlebihan yang dapat menyesatkan khalayak.

3) Keberimbangan

Keberimbangan mengharuskan jurnalis memberikan ruang yang proporsional bagi berbagai perspektif yang relevan. Prinsip ini penting agar publik memperoleh gambaran utuh atas suatu peristiwa, bukan sudut pandang tunggal. Berita yang berimbang tidak hanya menghadirkan pihak yang sejalan dengan temuan redaksi, tetapi juga memberi kesempatan klarifikasi kepada pihak yang dikritik.⁴⁵

Dalam program *Bocor Alus Tempo*, keberimbangan tampak pada upaya menghadirkan beragam narasumber, penggunaan data pembandingan, serta penyajian konteks yang memadai. Praktik ini menjadi indikator bahwa liputan investigatif tetap berjalan dalam koridor jurnalisisme profesional, bukan penghakiman sepihak.

⁴⁴ Menilai Objektivitas and Berita Media, _Seto & Morissan: Menilai Objektivitas Berita Media Televisi', XII.01 (2013), pp. 132–48.

⁴⁵ Muhammad Amin Rais and others, _KEBERIMBANGAN BERITA DEMONSTRASI TOLAK RU KPK-RKUHP 2019 OLEH PORTAL BERITA DETIKCOM', no. September (2019).

4) Praktik Kerja Jurnalis

Prinsip dasar pemberitaan hanya dapat terwujud melalui praktik kerja jurnalistik yang disiplin. Penulisan berita daring memang memiliki pola berbeda dengan media cetak, namun standar substansinya tetap sama: berita harus disusun berdasarkan fakta terverifikasi, ditulis secara cermat, dan disajikan secara jelas kepada publik. Kemudahan publikasi di internet tidak boleh menurunkan kualitas proses editorial.⁴⁶

Praktik profesional meliputi ketelitian dalam penulisan deskripsi peristiwa, penggunaan data yang sah, serta mekanisme editorial yang menguji setiap informasi sebelum tayang. Bagi Podcast Bocor Alus Media Tempo, kedisiplinan ini menjadi bukti bahwa independensi tidak berhenti pada klaim, tetapi hadir dalam prosedur kerja sehari-hari redaksi.

2. Independensi dan Struktur Kepemilikan Media

Konsep independensi media sering kali tampak rumit, bahkan ketika media tersebut dimiliki oleh individu atau kelompok swasta. Meski korupsi kerap diasosiasikan dengan media milik Negara terutama karena adanya ketakutan pejabat publik terhadap pengungkapan aib hal serupa juga dapat ditemukan dalam media milik perseorangan. Independensi tidak otomatis hadir hanya karena kepemilikan berpindah dari negara ke swasta. Pada praktiknya, tekanan dan intervensi bisa berasal dari berbagai arah, termasuk dari

⁴⁶ Program Studi Jurnalistik and others, *_DALAM PEMBERITAAN WABAH COVID-19*, 2023.

pemilik media itu sendiri yang memiliki kekuasaan besar dalam menentukan arah editorial.⁴⁷

3. Landasan Normatif Independensi di Indonesia

Secara umum, Undang- Undang No.40 Tahun 1999 Tentang Pers Pasal 7 ayat (2) yang menyatakan bahwa wartawan memiliki dan menaati Kode Etik Jurnalistik, dan penerapan Kode Etik Jurnalistik⁴⁸ Pasal (1) yang memuat ketentuan bahwa wartawan Indonesia bersikap independen, menghasilkan berita yang akurat, berimbang, dan tidak beritikad buruk. independensi media merujuk pada prinsip bahwa jurnalis harus bebas dari segala bentuk tekanan, pengaruh politik, ekonomi, atau kepentingan pribadi dalam menjalankan tugas jurnalistiknya. Namun dalam realitas industri media, prinsip ini sering kali terganggu. Intervensi bisa terjadi secara halus maupun terang-terangan, mulai dari ruang redaksi hingga keputusan strategis tingkat atas. Bahkan pemilik media, yang seharusnya menjamin kebebasan redaksi, kerap kali justru menjadi aktor utama dalam mempengaruhi isi pemberitaan demi kepentingan tertentu, baik politik maupun bisnis.

Independensi media pada akhirnya bukan hanya soal kebebasan dari intervensi eksternal, tetapi juga menyangkut komitmen internal terhadap etika jurnalistik, integritas profesional, dan keberanian mempertahankan prinsip meski berada di bawah tekanan. Tantangan inilah yang membuat independensi media menjadi ideal yang terus

⁴⁷ M. Semma, *'Negara Dan Korupsi'*, 2008, p. 4008.

⁴⁸ Anastasya Meyva Lensun, Nolly S Londa, and Leviane J Lotulung, *'Independensi Pemberitaan Media Online Di Kota Manado Pada Pemilihan Gubernur Sulawesi Utara'*, *Acta Diurna Komunikasi Independensi*, 3.3 (2021), pp. 1–12 <<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/actadiurnakomunikasi/article/view/34387>>.

diperjuangkan, bukan sekadar status yang otomatis melekat karena bentuk kepemilikan.

4. Indikator Independensi Media

Independensi media dapat di Identifikasikan melalui beberapa indikator independensi yang pertama, sikap mental yang bebas dari pengaruh. Publik pada saat masa penugasannya tidak dipengaruhi oleh kepentingan-kepentingan berbagai pihak sehingga menghasilkan sebuah berita yang berkualitas. Kedua, tidak dikendalikan oleh pihak lain. Publik melakukan tugasnya bebas dari kendali pihak luar yang menginginkan sebuah hasil berita yang dikendalikan, sehingga berita yang dihasilkan bebas dari rekayasa apapun. Ketiga, tidak tergantung pada orang lain. Publik pada masa penugasannya tidak bergantung pada pihak lain sehingga membuat berita yang dikeluarkan diragukan kebenarannya.⁴⁹

5. Tantangan Terhadap Independensi

Independensi media mengalami degradasi secara perlahan akibat berbagai tekanan yang bersumber dari dinamika sosial, ekonomi, dan kebudayaan. Intervensi terhadap kerja jurnalistik tidak hanya bersifat struktural melalui kekuasaan politik, pejabat publik, dan institusi negara, tetapi juga bersifat informal, seperti tekanan dari elite non-negara, kelompok masyarakat, serta pemilik perusahaan media. Bentuk intervensi tersebut kerap kali diwujudkan dalam bentuk gratifikasi, baik berupa uang maupun tawaran jabatan yang menarik.

⁴⁹ Fadia Nazwari, Cris Kuntadi, and Dede Liawati, 'Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Audit : Independensi , Etika Auditor Dan Pengalaman Kerja', *Jurnal Rumpun Manajemen Dan Ekonomi*, 1.2 (2024), pp. 50–56.

Menurunnya tingkat independensi media ini merupakan persoalan serius yang memerlukan perhatian khusus dari pemerintah.⁵⁰

Dalam konteks ini, Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) dan Dewan Pers Indonesia (DPI) sebagai lembaga pengawas memiliki tanggung jawab untuk melakukan penindakan dan memberikan teguran terhadap institusi media yang lalai dalam menjalankan fungsi jurnalistik secara profesional. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, KPI diberi kewenangan untuk menerima pengaduan masyarakat dan melakukan pemantauan terhadap konten penyiaran.⁵¹

Sikap kerja profesional yang mengedepankan independensi dan keberpihakan kepada publik dari media serta jurnalis masih menjadi tantangan. Ibarat sebuah rumah yang tampak megah dan nyaman untuk ditempati, namun biaya perawatan serta perilaku pengelolanya dalam hal ini pemilik media dan jurnalis belum mencerminkan profesionalisme. Kondisi ini sudah berlangsung sejak masa kerusakan —rumah tersebut di era pemerintahan otoriter Orde Baru, dan berlanjut hingga masa pemerintahan Joko Widodo.

Dalam kondisi infrastruktur jurnalisisme yang masih lemah tersebut, keberadaan berbagai regulasi justru lebih mencerminkan kebebasan pers yang bersifat simbolis ketimbang nyata. Hal ini sejalan dengan kondisi infrastruktur politik Indonesia yang juga cenderung

⁵⁰ Rahmatria, Mia Arianti. *Pembingkaiian berita banjir Garut pada media Online Kompas. com edisi Juli 2022: Analisis Framing model Robert N. Entman*. Diss. UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2023.

⁵¹ Nurul Khotimah —*Tantangan Independensi Media Dalam Pemilu : KASUS KOMPAS.COM*”. (2019).

simbolik, sebagaimana terlihat dari adanya UU Pemilu, UU Partai Politik, serta pelaksanaan Pilkada dan Pilpres secara langsung.⁵²

6. Independensi sebagai Fondasi Fungsi Watchdog

Dalam hal ini independensi media merupakan fondasi utama dalam menjalankan fungsi pers yang bebas, adil, dan berpihak kepada kepentingan publik. Dalam praktiknya, media yang independen tidak tunduk pada tekanan politik, ekonomi, maupun kepentingan pemilik modal. Sebaliknya, media berperan sebagai pengawas kekuasaan (watchdog) yang menyuarakan kebenaran dan menjembatani informasi antara pemerintah dan masyarakat secara objektif.⁵³

Namun, tantangan terhadap independensi media terus bermunculan, terutama di tengah sistem politik dan ekonomi yang belum sepenuhnya mendukung kebebasan pers. Banyak media yang akhirnya kehilangan daya kritis karena ketergantungan pada iklan, intervensi pemilik modal, atau tekanan dari kekuasaan. Akibatnya, pemberitaan menjadi bias, tidak berimbang, bahkan manipulatif, sehingga publik kehilangan kepercayaan terhadap media sebagai sumber informasi yang kredibel.⁵⁴

Menjaga independensi media bukan hanya menjadi tanggung jawab jurnalis, tetapi juga publik, pemerintah, dan lembaga pengawas media. Hanya dengan independensi yang kuat, media dapat menjalankan perannya secara maksimal dalam mendidik masyarakat, memperjuangkan keadilan, dan memperkuat demokrasi di Indonesia.

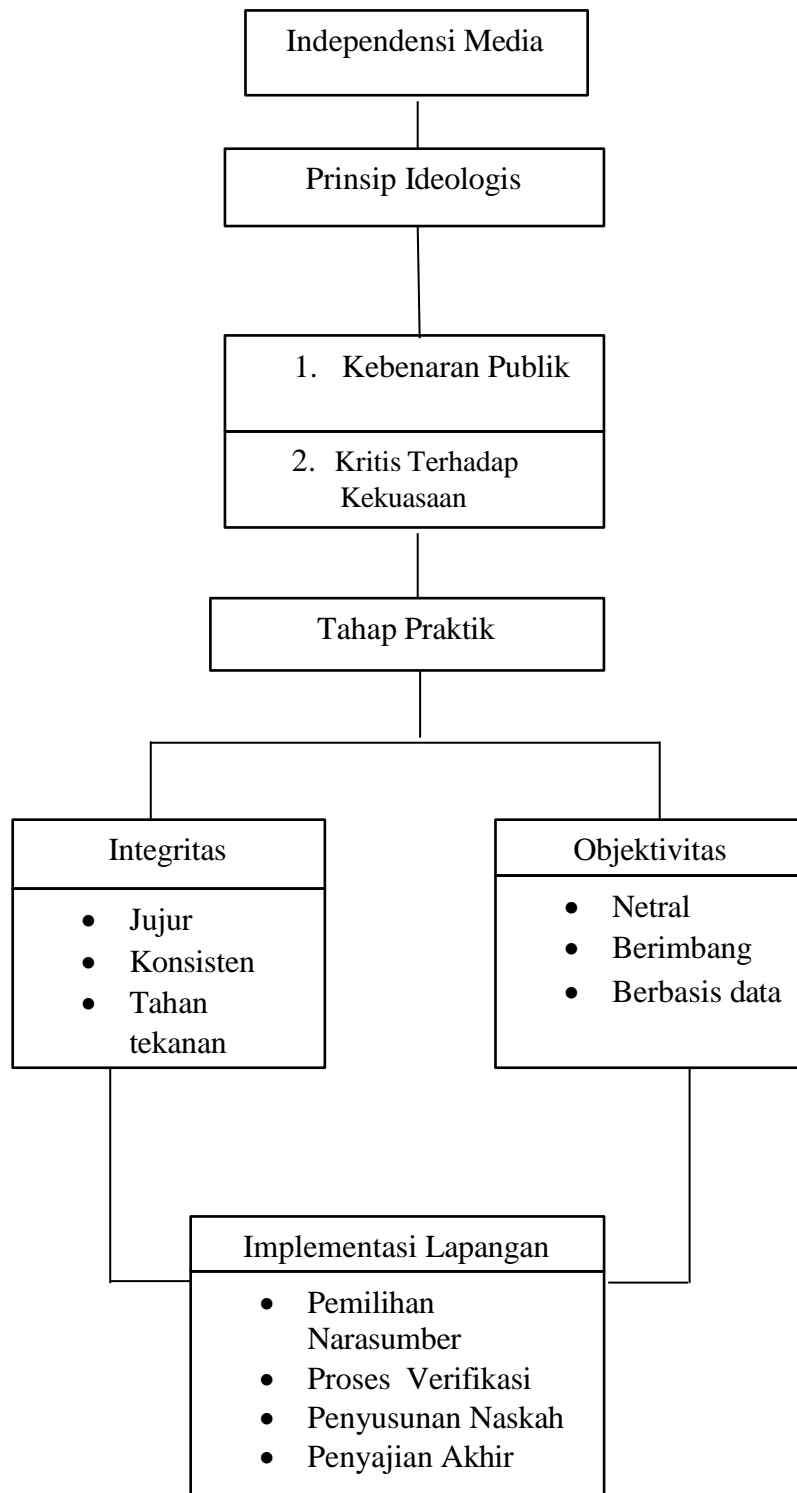
⁵² Kadek Dwita Apriani, 'Demokrasi Tanpa Demos', 2021, pp. 245–46.

⁵³ Wasisto R Jati, 'Politik Persuasif Media: Peran Media Dalam Pemilu Presiden Indonesia 2001-2009', *Jurnal Penelitian Politik*, 10.2 (2013), pp. 15–30.

⁵⁴ Khoirun Nisa, 'Peran Literasi Di Era Digital Dalam Menghadapi Hoaks Dan Disinformasi Di Media Sosial', *Impressive: Journal of Education*, 2.1 (2024), pp. 1–11, doi:10.61502/ijoe.v2i1.75.

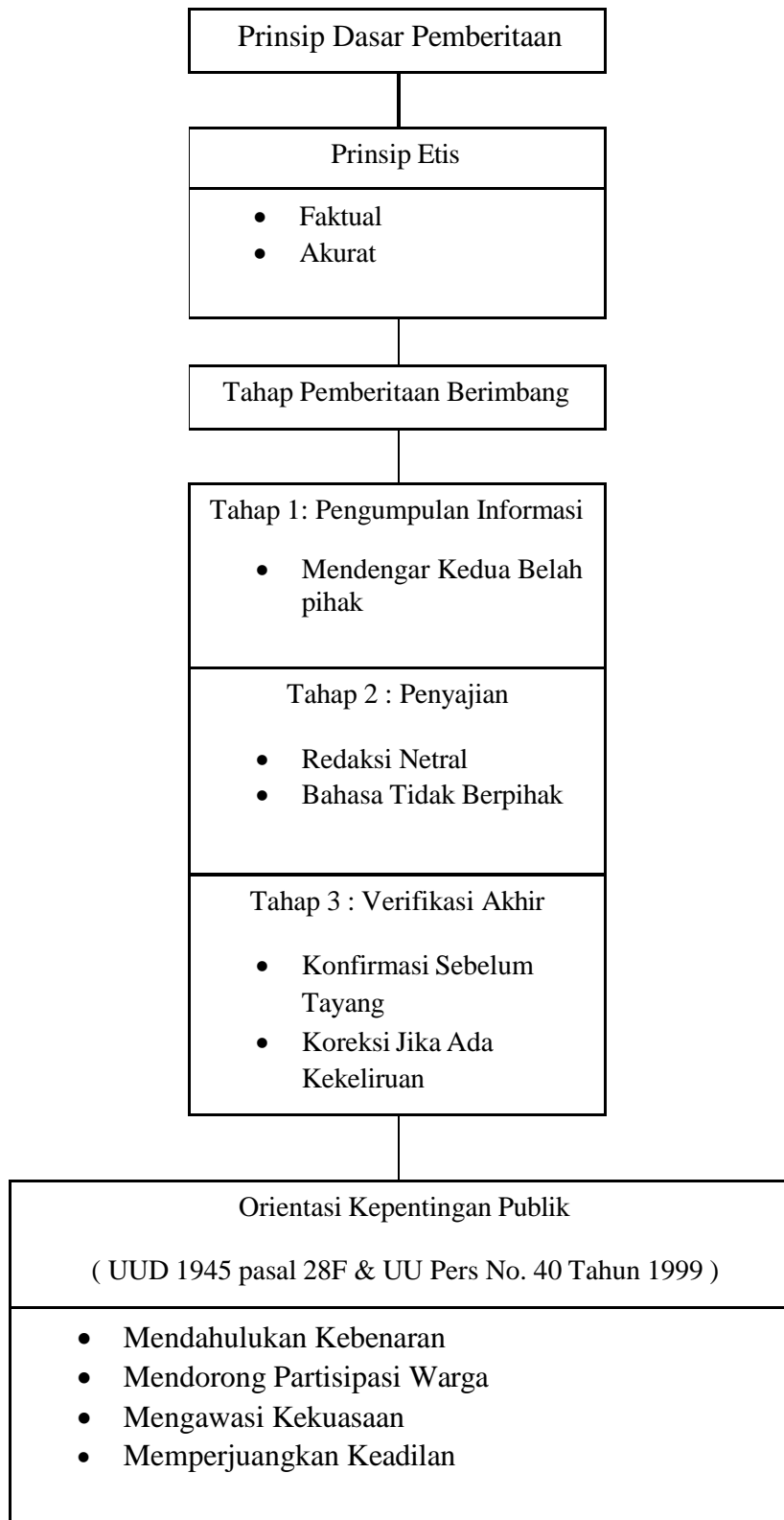
Bagan mengenai prinsip ideologi jurnalisme

Bagan 2.1



Bagan mengenai prinsip dasar pemberitaan.

Bagan 2.2



C. Investigasi jurnalistik

Liputan investigasi jelas memiliki perbedaan dengan berita jurnalistik lainnya. Dalam dunia jurnalistik, liputan investigasi dinilai sebagai produk jurnalistik yang tidak mudah dilakukan oleh jurnalistik. Diperlukan keuletan, ketekunan, dan berbagai keahlian lainnya agar seorang jurnalis mampu menghasilkan liputan investigatif. Jurnalisme investigasi dikenal sebagai karya jurnalistik yang — gagah dalam dunia jurnalistik. Perlu diketahui bahwa tidak semua liputan panjang disebut sebagai liputan investigasi.

Definisi investigasi menurut Kurnia (2002), menyebutkan bahwa investigasi berasal dari kata Latin yakni *vestigum*, yang artinya jejak kaki. Hal ini menyiratkan bahwa yang disebut dengan investigasi adalah ketika berbagai bukti menjadi fakta, berbantuan data dan keterangan dari sebuah peristiwa. Jejak kaki tersebut menunjukkan bahwa kinerja liputan investigasi mencoba mencari dan terus menggali jejak suatu peristiwa dari permulaan jejak kaki tersebut sampai akhir. Tidak hanya sampai disitu, liputan investigasi bertugas menemukan setiap jawaban pertanyaan dari sebuah peristiwa tanpa meninggalkan satupun pertanyaan.⁵⁵

Secara umum, jurnalisme investigatif dapat dipahami sebagai suatu teknik penulisan berita, opini, maupun feature yang didasarkan pada proses riset atau penyelidikan secara mendalam dan menyeluruh dari berbagai sumber informasi. Dalam praktiknya, jurnalis menggali informasi dari berbagai pihak, dimulai dari data mentah (raw data) atau berita singkat yang kemudian dikembangkan menjadi laporan yang

⁵⁵ Subagio M. Warnosumarto, *Jurnalisme Investigasi: Untuk Mahasiswa Komunikasi Dan Kalangan Umum* (PERPUSTAKAAN BARU PRESS, 2020). Hal 39.

komprehensif. Dengan demikian, jurnalisme investigatif memiliki karakter yang berbeda dengan jurnalisme sastra yang dikenal juga sebagai *new journalism* yakni gaya penulisan jurnalistik yang menggunakan pendekatan naratif atau sastra. Jurnalisme investigatif juga berbeda dari jurnalisme konvensional maupun *depth reporting*, yang meskipun sama-sama menyajikan informasi secara mendalam, namun tidak selalu melibatkan proses penyelidikan yang kompleks dan intensif seperti halnya jurnalisme investigatif.⁵⁶

Salah satu peran utama jurnalisme, khususnya jurnalisme investigatif, adalah mendukung proses demokratisasi informasi. Adanya ekosistem data yang terbuka secara luas menjadi sumber yang sangat berguna bagi jurnalis dalam menelusuri informasi awal serta melakukan verifikasi terhadap indikasi penyimpangan. Selain itu, kemajuan teknologi digital juga memungkinkan analisis data yang lebih mendalam, disertai dengan visualisasi yang lebih informatif dan menarik secara visual, sehingga memudahkan penyampaian informasi kompleks kepada masyarakat. Investigasi adalah suatu bentuk pencarian berita dengan cara penelusuran. Ia sangat mengandalkan bukti-bukti material, baik berupa dokumen maupun dari kesaksian.⁵⁷

Penyajian berita investigatif dilakukan secara mendalam melalui proses penelusuran dan penyelidikan fakta yang bersumber dari narasumber yang kredibel. Supaya informasi yang disampaikan bisa dipertanggungjawabkan, seorang jurnalis harus terlebih dahulu melakukan investigasi guna memastikan kebenaran dari informasi tersebut sebelum

⁵⁶ Harmonis, ‘Jurnalistik Investigasi’.

⁵⁷ Siti Sarifah and Purwanto Purwanto, ‘Jurnalisme Investigasi Televisi Di Kompas TV Jakarta (Studi Analisis Isi Kuantitatif Pada Naskah Berita —Berkas Kompas)’, *Rekam*, 16.2 (2020), doi:10.24821/rekam.v16i2.4054.

disebarluaskan kepada Informasi dalam laporan investigatif tidak bisa diperoleh secara instan atau hanya dari permukaan, melainkan harus melalui proses penyelidikan yang mendalam. Oleh karena itu, produksi berita investigasi memerlukan waktu yang panjang dan menguras energi wartawan. Daya tarik dari berita semacam ini terletak pada proses pengungkapannya yang penuh tantangan. Untuk menjalankan tugas ini, jurnalis perlu memiliki jaringan sumber dari kalangan internal atau orang-orang dekat dengan isu, yang harus dijamin kerahasiaannya demi menjaga keselamatan mereka.

Dengan kompleksitas dan risiko yang menyertai, jurnalisisme investigasi tidak hanya menuntut ketekunan dan keberanian, tetapi juga etika yang tinggi. Wartawan harus mampu menjaga integritas informasi, melindungi identitas narasumber, serta tetap berpegang pada prinsip keberimbangan dan objektivitas. Hal ini penting agar hasil liputan tidak hanya berdampak besar, tetapi juga memiliki legitimasi di mata publik.⁵⁸

Sejarah dunia mengungkapkan bahwa Jurnalisme investigasi mempunyai jejak sejarah yang berbeda di masing-masing negara. Di Amerika, jurnalisme investigasi memiliki sejarah yang panjang. Dalam sejarah literatur, Amerika memiliki sejumlah tokoh sebagai pionir pelaporan investigasi. Mereka menetapkan pedoman pelaporan dan praktik jurnalisme investigasi. Salah satu ciri pemberitaan pers sebagai watchdog, di khasanah jurnalisme. Dalam hal inilah pelaporan investigasi harus sesuai dengan kaidah pemberitaan dan harus menggunakan teknik

⁵⁸ Putra, Robby Aditya, et al. "Training Model Development: Transforming a Conservative Da'i to a Moderate by Leveraging Digital Tools." *Ishlah: Jurnal Ilmu Ushuluddin, Adab dan Dakwah* 6.1 (2024): 93-108.

investigasi. Selain fokus pada pencarian berita, laporan investigatif harus meneliti setiap kebenaran fakta yang detail.

Jurnalisme investigasi di Amerika Serikat berkembang seiring waktu, bermula dari praktik muckraking journalism pada awal 1900-an, yang mengungkap skandal politik melalui laporan media seperti McClure's. Istilah investigative reporting mulai populer sejak 1975 dengan berdirinya Investigative Reporters and Editors Inc. (IRE), yang kini menjadi organisasi penting dalam pengembangan jurnalisme investigatif dengan dana operasional besar. Harsono menyebutkan bahwa jurnalisme investigasi terus berkembang, pada November 1999 di Cambridge Amerika Serikat diadakan *international Consortium of Investigative Journalists (ICIJ)*.⁵⁹

Selain itu sejarah jurnalis investigasi di Indonesia mulai mengemuka pada tahun 1990 – an. Harsono menyebutkan bahwa di Indonesia sendiri kurang jelas sejak kapan liputan investigasi mulai populer. Namun setidaknya, ada beberapa majalah yang eksplisit pada tahun 1990-an menggunakan kata investigasi dalam liputan mereka. Dwimingguan Tajuk yang didirikan pada 1996, memposisikan dirinya majalah berita, investigasi dan entertainmen. Begitu pula Majalah Tempo yang menambahkan satu rubrik "Investigasi" ketika terbit kembali 6 Oktober 1998. Akan tetapi, hal yang dinilai sebagai "investigasi" yang mungkin paling terkenal di Indonesia, adalah liputan harian Indonesia Raya atas kasus korupsi di Pertamina dan Badan Logistik antara tahun 1969 dan 1972. Harian tersebut melaporkan korupsi besar-besaran di

⁵⁹ Subagio M. Warnosumarto, *Jurnalisme Investigasi: Untuk Mahasiswa Komunikasi Dan Kalangan Umum*. Hal 60.

Pertamina dengan memanfaatkan sumber-sumber anonim dari dalam perusahaan negara tersebut.

Kurnia menjelaskan bahwa pelaksanaan jurnalisme investigasi di Indonesia sangat dipengaruhi oleh sistem politik keterbukaan dan kemerdekaan pers. Sebelum adanya kebebasan pers, praktik jurnalisme di Indonesia masih tidak memiliki kebebasan dan takut-takut dalam menyampaikan informasi, khususnya terkait pemberitaan-pemberitaan negatif seperti korupsi. Pada perkembangannya, pasca kemerdekaan pers semakin terbuka. Sesuai dengan perkembangannya, jurnalisme investigasi di Indonesia senantiasa dikaitkan suara politik yang berisik dan mengganggu kekuasaan. Pada masa inilah kegiatan investigasi pers Indonesia ditakut-takuti tindakan pembredelan dari penguasa. Akan tetapi, di sela-sela ancaman dan represivitas tersebut, tetap dilakukan praktik jurnalisme investigasi.⁶⁰

Terdapat beberapa media multiplatform di Indonesia yang masih menyajikan program yang paling familiar di telinga masyarakat Indonesia yaitu media Tempo. Tempo termasuk media yang masih menerapkan program investigasi karena sejak awal berdirinya media ini memang dikenal sebagai pelopor jurnalisme investigative di Indonesia. Terdapat beberapa alasan mengapa media Tempo tetap konsisten menjalankan program investigasi yaitu, karena identitas dan ciri khas Tempo yang telah dikenal luas karena mengedepankan laporan mendalam, analitis, dan kritis dalam memproduksi suatu informasi. Selain itu juga Tempo menempatkan jurnalisme sebagai alat untuk pengawasan, dimana di tuju untuk mengawasi kekuasaan dan membela kepentingan public. Sudah banyak

⁶⁰ Subagio M. Warnosumarto, *Jurnalisme Investigasi: Untuk Mahasiswa Komunikasi Dan Kalangan Umum*. Hal 66 – 65.

laporan investigasinya yang membongkar pelanggaran HAM, korupsi, penyimpangan kekuasaan.

Dalam praktik jurnalisme investigatif, seorang jurnalis sering kali harus menyamakan peran dan menyatu seolah menjadi bagian dari kelompok atau institusi yang tengah diselidiki. Hal ini menuntut kehati-hatian tingkat tinggi dalam setiap langkahnya. Jika tidak dilakukan dengan cermat, konsekuensi yang tidak diinginkan dapat terjadi, seperti ancaman pembunuhan, penahanan, atau bentuk intimidasi lainnya. Oleh karena itu, jurnalisme investigatif kerap dianggap sebagai profesi yang berisiko tinggi.⁶¹

Tak jarang, wartawan investigatif harus berhadapan dengan pihak-pihak tertentu yang secara sengaja menolak untuk diselidiki, dinilai, atau diekspos kepada publik. Dalam hal ini, jurnalisme investigatif tidak hanya bertugas mengungkap dugaan pelanggaran, tetapi juga menggali lebih dalam hingga menemukan bukti-bukti yang kuat terkait suatu permasalahan. Sementara dari segi bentuk penyajiannya, laporan investigatif memiliki karakteristik yang tidak jauh berbeda dengan pola pemberitaan lainnya dalam terminologi jurnalistik, meskipun proses dan pendekatannya jauh lebih kompleks dan berisiko.

Kegunaan utama dari jurnalisme investigatif adalah untuk melakukan penyelidikan secara mendalam guna mengungkap kebenaran atas suatu hipotesis atau kesimpulan sementara. Hasil dari penyelidikan ini kemudian disampaikan kepada publik agar tidak muncul kesalahpahaman atau informasi yang simpang siur di tengah masyarakat. Dengan demikian,

⁶¹ Ahmad Salman Farid and Muhammad Ardiansyah, 'Peran Jurnalis Investigatif Dalam Mengungkap Kasus Narkoba: Analisis Tantangan Dan Hambatan Investigasi Jurnalisme', *MUKASI: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 2.3 (2023), pp. 186–95, doi:10.54259/mukasi.v2i3.1787.

jurnalisme investigatif juga berperan penting dalam mencegah munculnya fitnah antaranggota masyarakat. Secara sederhana, jurnalisme investigatif memiliki fungsi utama dalam menegaskan batas yang jelas antara kebenaran sejati dan pihak-pihak yang berusaha bersembunyi di balik kedok kebenaran demi kepentingan tertentu. Pendekatan ini bertujuan untuk menjaga integritas kebenaran itu sendiri serta mencegah penyalahgunaannya untuk maksud yang bertentangan dengan nilai-nilai kebenaran yang sejati.⁶²

Dalam liputan investigasi perlu ditekankan bahwa wartawan bukanlah polisi. Investigasi yang dilakukan oleh wartawan bukanlah investigasi dalam konsep kepolisian. Laksono (2010) menjelaskan bahwa teknik yang digunakan bisa saja sama antara investigasi jurnalistik dan kepolisian. Misalnya dalam proses pengamatan, pengintaian, uji laboraterium, atau penyamaran. Akan tetapi, jurnalis tetaplah jurnalis. Yang membedakan diantara keduanya yaitu, jurnalis tidak dapat menggeledah rumah atau kantor seseorang, jurnalis tidak dapat menyita dokumen, jurnalis tidak bisa memanggil paksa narasumber, atau bahkan menangkap seseorang.

Wartawan investigasi dengan segala keterbatasan wewenang tersebut harus tetap berpegang pada elemen jurnalisme, yakni memberikan loyalitasnya pada publik atau masyarakat. Peran wartawan dalam jurnalisme investigasi tidak mudah dilakukan. Jurnalisme investigasi menuntut wartawan untuk menggali sedalam mungkin topik dan isu yang berkaitan dengan kepentingan publik. Kepentingan publik ini mengacu pada kualitas dimana sebuah komunitas dirugikan karena tidak mengetahui

⁶² Harmonis, 'Jurnalistik Investigasi'.

informasi tersebut, ataupun diuntungkan baik secara materi maupun non materi melalui pembuatan kebijakan dengan mengetahui informasi tersebut. Wartawan investigasi juga harus melaksanakan banyak tahapan dalam melakukan liputan investigasi. Wartawan harus melakukan perencanaan, pencarian bukti, hingga pelaporan yang patuh pada setandar akurasi dan kecukupan bukti.⁶³

Jurnalisme investigasi tidak dapat dilepaskan dari dunia media dan tanggung jawab sosial yang melekat pada profesi jurnalis. Dalam menjalankan kerja-kerja investigatif, seorang jurnalis tidak hanya dituntut memiliki kemampuan teknis peliputan, tetapi juga berpegang pada prinsip moral yang menempatkan kepentingan publik di atas kepentingan pribadi maupun kelompok. Prinsip tersebut berakar pada Teori Tanggung Jawab Sosial Pers yang merupakan bagian dari kerangka besar *The Four Theories of the Press*. Dalam klasifikasi ini terdapat empat teori utama, yaitu Teori Otoriter, Teori Libertarian, Teori Tanggung Jawab Sosial, dan Teori Komunis Soviet.

Teori tanggung jawab sosial lahir dari rekomendasi Commission on Freedom of the Press (Hutchins Commission, 1947) sebagai reaksi atas praktik model libertarian yang dinilai memberikan kebebasan terlalu luas tanpa disertai kewajiban moral yang memadai. Model libertarian yang mengedepankan kebebasan absolut dianggap tidak cukup menjamin terpenuhinya hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, berimbang, dan bermanfaat. Oleh karena itu, teori tanggung jawab sosial menegaskan bahwa kebebasan pers harus disertai dengan kewajiban etis untuk melayani kepentingan publik, melakukan pengawasan terhadap

⁶³ Subagio M. Warnosumarto, *Jurnalisme Investigasi: Untuk Mahasiswa Komunikasi Dan Kalangan Umum*. Hal 53 - 55

kekuasaan, serta mencegah penyalahgunaan media untuk kepentingan sempit.⁶⁴

Dalam perkembangannya, teori ini menjadi salah satu teori normatif yang paling dominan dalam kajian komunikasi. Kemunculannya tidak terlepas dari perdebatan antara kelompok libertarian radikal yang menolak campur tangan negara terhadap media dengan kelompok yang mendukung kontrol pemerintah melalui pendekatan propaganda dan teori masyarakat. Posisi teori tanggung jawab sosial berada di tengah perdebatan tersebut dengan menawarkan jalan moderat: pers tetap harus bebas, tetapi kebebasan itu dibatasi oleh tanggung jawab moral kepada masyarakat. Dennis McQuail (1987) kemudian merumuskan prinsip-prinsip dasar teori ini, antara lain kewajiban media untuk menyajikan informasi yang akurat, memberi ruang bagi keberagaman suara, mengutamakan kepentingan publik, serta menjaga standar profesionalisme jurnalistik.⁶⁵

Dengan demikian, legitimasi moral jurnalisme investigasi sesungguhnya bersumber dari teori tanggung jawab sosial. Praktik investigasi yang berupaya mengungkap penyalahgunaan kekuasaan, korupsi, dan ketidakadilan merupakan wujud konkret dari kewajiban sosial pers sebagaimana dirumuskan oleh Hutchins Commission. Tanpa landasan tanggung jawab sosial, jurnalisme investigasi berpotensi kehilangan orientasi etiknya dan terjebak pada kepentingan politik maupun ekonomi. Oleh sebab itu, setiap kerja jurnalistik terutama investigasi harus

⁶⁴ Portal Jurnal, Elektronik Universitas, and Kristen Satya, *PENYIARAN DI INDONESIA (Mendambakan Penyiaran Radio Yang Beretika)* Oleh ‘:’, pp. 522–46.

⁶⁵ *Objektivitas and Media*, _Seto & Morissan: Menilai Objektivitas Berita Media Televisi’.

ditempatkan dalam kerangka bahwa kebebasan pers adalah sarana untuk melayani kepentingan publik, bukan tujuan itu sendiri.

Prinsip-prinsip dasar teori tanggung jawab sosial oleh Dennis McQuail (1987):

- 1) Media harus menerima dan memenuhi kewajiban-kewajiban tertentu kepada masyarakat.
- 2) Kewajiban-kewajiban ini pada umumnya dicapai dengan cara menetapkan standar profesi yang tinggi, berupa pemenuhan informasi, kebenaran, ketepatan, objektivitas, dan keseimbangan. Dalam menerima dan menjalankan kewajiban-kewajiban ini, media harus dapat mengatur diri sendiri dalam kerangka hukum serta institusi yang sudah mapan.
- 4) Media harus menghindari apa pun yang dapat menyebabkan kejahatan, kekerasan, atau kerusuhan sosial, maupun menghina kelompok minoritas.
- 5) Media secara keseluruhan harus menjadi pluralis dan mencerminkan keragaman masyarakat, memberikan akses kepada berbagai macam sudut pandang dan hak-hak untuk menjawab.
- 6) Masyarakat memiliki hak untuk meminta standar pelayanan yang tinggi kepada media, dan campur tangan dapat dibenarkan untuk mengamankan kepentingan publik tersebut.
- 7) Jurnalis dan pekerja media harus dapat bertanggung jawab kepada publik sebagaimana terhadap pemilik media dan pasar.

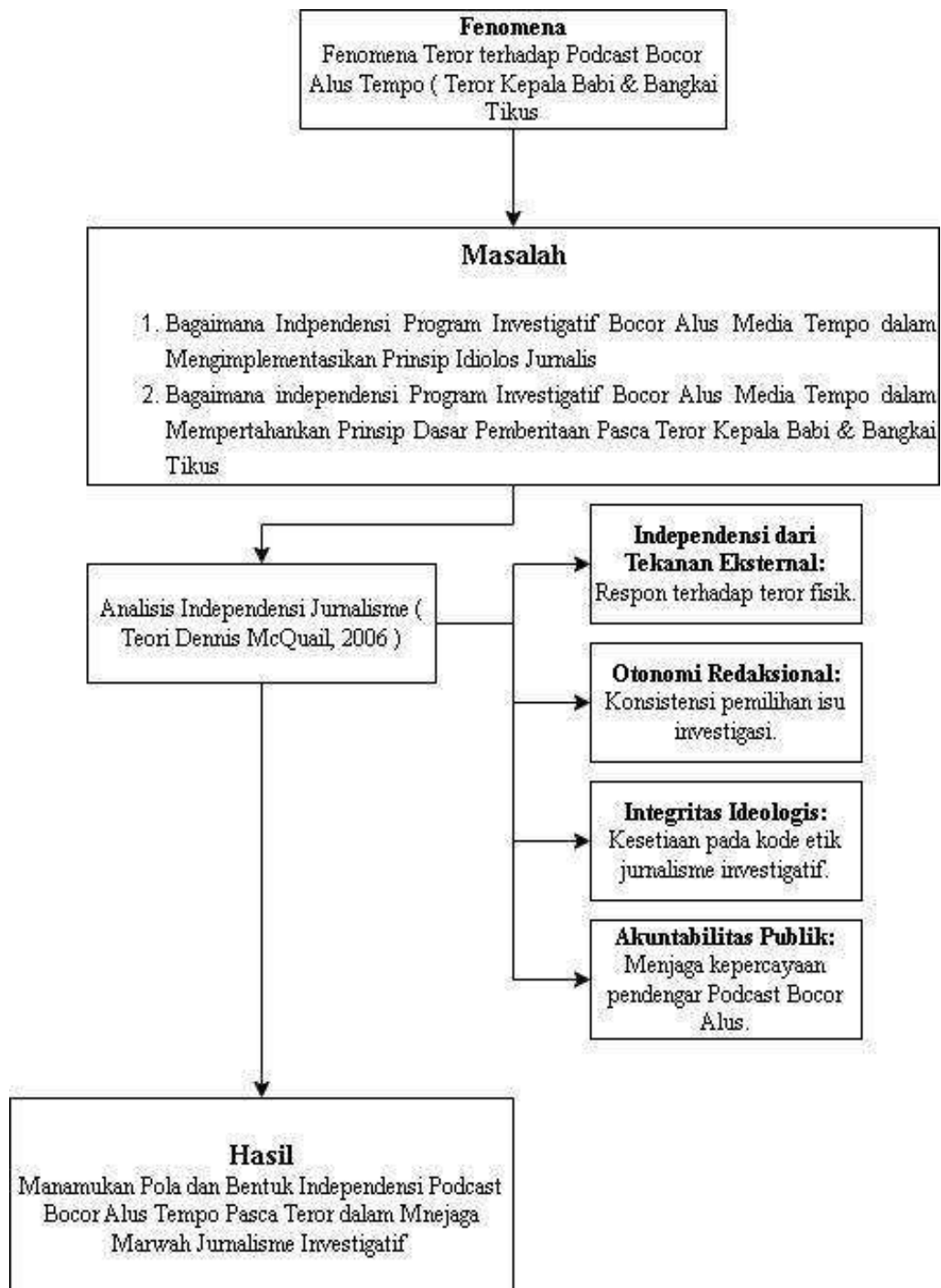
Teori tanggung jawab sosial ini memiliki kekuatan yaitu menghargai tanggung jawab media, menghargai tanggung jawab khalayak, membatasi campur tangan pemerintah terhadap kinerja media,

memperbolehkan kontrol pemerintah kepada media dalam jumlah yang pantas, menghargai keragaman dan pluralisme, melindungi kaum —lemahl, serta menarik bagi insting praktisi media dan khalayak.

D. Kerangka Berfikir

Bagan 2.3

Kerangka Berfikir



Penelitian ini diawali dengan mengidentifikasi adanya fenomena ancaman nyata terhadap kebebasan pers, yaitu peristiwa teror fisik berupa pelemparan kepala babi dan bangkai tikus yang ditujukan kepada tim investigasi Podcast Bocor Alus Politik Media Tempo. Peristiwa ini bukan sekadar tindakan kriminal biasa, melainkan sebuah bentuk intimidasi eksternal yang bertujuan untuk meruntuhkan mentalitas jurnalis dan mengintervensi independensi ruang redaksi.⁶⁶

Untuk membedah fenomena tersebut secara ilmiah, peneliti menggunakan alur logika yang berlandaskan pada Teori Independensi Denis McQuail (2006). Berdasarkan teori ini, independensi media diuji melalui kemampuannya untuk tetap otonom dan bebas dari tekanan pihak luar (pemerintah, pemilik modal, maupun kelompok penekan). Alur berpikir dalam penelitian ini dijabarkan ke dalam dua fokus utama yang saling berkesinambungan:

Pertama, peneliti menganalisis bagaimana Podcast Bocor Alus Politik Media Tempo mengimplementasikan prinsip ideologis jurnalisisme Sesudah teror. Di sini, kerangka berpikir difokuskan pada aspek integritas dan keberanian redaksi. Peneliti melihat apakah nilai-nilai dasar Tempo dalam mengungkap kebenaran tetap tegak berdiri atau justru mengalami pergeseran (degradasi) akibat rasa takut. Hal ini krusial untuk mengetahui apakah ideologi jurnalisisme mereka bersifat absolut atau dapat dipengaruhi oleh ancaman keamanan.

⁶⁶ Putra, Robby Aditya, Exsan Adde, and Maulida Fitri. "MEDIA DAKWAH TIKTOK UNTUK GENERASI Z." *Ath-Thariq: Jurnal Dakwah dan Komunikasi* 7.1 (2023): 58-71.

Kedua, peneliti menelusuri strategi dan konsistensi dalam mempertahankan prinsip dasar pemberitaan. Fokus ini diarahkan untuk melihat apakah terjadi *self-censorship* (sensor diri) atau perubahan *angle* pemberitaan yang menjadi lebih "lunak" setelah peristiwa teror tersebut. Kerangka ini akan menghubungkan antara tekanan yang diterima dengan kualitas independensi produk jurnalistik yang dihasilkan pasca kejadian.

Secara keseluruhan, kerangka berpikir ini bertujuan untuk menyimpulkan apakah Podcast Bocor Alus Politik Media Tempo berhasil mempertahankan posisi independensinya sebagai kontrol sosial, atau apakah teror tersebut menimbulkan *chilling effect* yang menghambat fungsi investigasi media. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memotret peristiwa terornya saja, tetapi lebih jauh menganalisis ketahanan (*resilience*) nilai-nilai independensi di tengah pusaran konflik kepentingan.⁶⁷

⁶⁷ Putra, Robby Aditya, Mochamad Aris Yusuf, and Maulida Fitri. "Dakwah Communication: An Alternative Way For Children Caused By Broken Home." KOMUNIKA 6.1 (2023).

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan analisis data dalam penelitian kualitatif adalah aktivitas yang dilakukan secara terus-menerus selama penelitian berlangsung, dilakukan mulai dari mengumpulkan data sampai pada tahap penulisan laporan. Hal ini berarti pengumpulan data dan analisis data dilakukan bersamaan. Selama proses penelitian seorang peneliti terus-menerus menganalisis datanya. Seperti yang dikatakan oleh Taylor dalam Afrizal membaca catatan lapangan, menangkap tema-tema penting yang muncul dari hasil wawancara mendalam atau observasi terlibat dan mengembangkan konsep atau kategori - kategori dan beberapa saat setelah memulai penelitian, peneliti berusaha untuk memfokuskan penelitiannya adalah aktivitas yang termasuk analisis data.⁶⁸

Dengan jenis studi kasus intrinsik. Studi kasus intrinsik dipilih karena penelitian ini berfokus pada satu kasus spesifik, yaitu analisis independensi program investigatif Bocor Alus Media Tempo sesudah teror kepala babi dan bangkai tikus. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mendalami fenomena dalam konteks yang nyata dan kompleks, serta memahami proses dan makna di balik tindakan editorial yang diambil oleh redaksi Tempo.

Menurut Stake, studi kasus intrinsik bertujuan untuk memahami kasus itu sendiri, bukan untuk membangun teori atau generalisasi.

⁶⁸ Analisis Data Kualitatif Teori Konsep da (1)’.

Dengan demikian, penelitian ini berupaya mengungkap bagaimana independensi jurnalis dan media dijalankan dalam situasi tekanan yang nyata dan penuh risiko, sekaligus menggambarkan respons editorial yang terjadi secara alamiah dalam lingkungan media.⁶⁹

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini difokuskan pada platform media sosial, yaitu akun YouTube resmi Tempo melalui program Podcast Bocor Alus Politik Media Tempo. Penelitian dilakukan secara daring (online) tanpa interaksi langsung di lapangan, mengingat sumber utama data bersifat digital dan dapat diakses secara publik melalui kanal YouTube. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada relevansi Podcast Bocor Alus Politik Media Tempo sebagai program investigatif yang menjadi objek kajian, khususnya dalam konteks independensi redaksional pasca insiden teror berupa pengiriman kepala babi dan tikus ke kantor Tempo. Seluruh data dan informasi dianalisis berdasarkan konten yang diunggah pada kanal tersebut.

C. Objek Penelitian

Objek dalam penelitian ini adalah program podcast investigatif Bocor Alus Politik Media produksi Tempo Media Group, khususnya edisi yang dirilis setelah insiden teror simbolik terhadap kantor redaksi Tempo pada bulan Maret 2025. Fokus utama penelitian adalah menganalisis bagaimana independensi jurnalisme dijalankan oleh tim Bocor Alus, baik dalam aspek pemilihan isu, narasi, penggunaan

⁶⁹ _Buku_Ajar_Metode_Penelitian_Kualitatif(1)‘.

sumber, maupun strategi penyajian konten dalam konteks ancaman terhadap kebebasan pers.

D. Sumber Data

a. Primer

Data Primer merupakan data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti secara langsung dari sumber datanya. Data primer disebut juga sebagai data utama atau asli atau yang memiliki up to date. Untuk mendapatkan data primer, peneliti harus mengumpulkannya secara langsung (Bawono,2006). Untuk pengambilan data primer di Media Podcast Bocor Alus Politik Tempo.

- a) **Unggahan Video dalam channel Podcast Bocor Alus Politik Media Tempo**, Masa Penelitian 6 bulan untuk menghasilkan tragedi teror Kepala Babi dan Bangkai Tikus.
- b) **Episode video (konten)**, secara jelas mengandung unsur – unsur Jurnalisme Investigatif, Kritisme terhadap kekuasaan seperti :
 - 1) Konten yang menyinggung kekuasaan politik serta lembaga Negara.
 - 2) Konten yang mengandung isu kontroversial dan menampilkan indikasi sikap independensi redaksional.
- c) Konten disajikan dengan menonjolkan nilai demokrasi dan transparansi sebagai wujud independensi jurnalis.

Dalam hal pemilihan subjek penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling* yang dimana nantinya peneliti hanya memilih konten yang menurut peneliti bisa membantu memberikan informasi yang peneliti inginkan.

Informasi disini merupakan video (konten) yang secara jelas mengandung unsur – unsur Jurnalisme Investigatif, Kritisme terhadap kekuasaan.⁷⁰ Pemilihan subjek dalam penelitian diambil dengan teknik *proposive sampling*. *Proposive sampling* merupakan metode pengambilan sampel dengan berdasarkan pertimbangan subjektif penelitian, di mana persyaratan dibuat sebagai kriteria harus dipenuhi sebagai sampel.⁷¹

Maka dari penjelasan kriteria diatas penulis menjadikan ini sebuah acuan untuk penelitian. Penulis menemukan beberapa konten yang memberikan kritik kepada pemerintah yang sesuai :

⁷⁰ Universitas Budi Luhur and others, ‘Dilema Laporan Investigatif Dalam Perspektif Kebebasan Informasi’, 12.1 (2021), pp. 44–58.

⁷¹ Ika Lenaini and others, ‘TEKNIK PENGAMBILAN SAMPEL PURPOSIVE DAN’, 6.1 (2021), pp. 33–39.

Tabel 3.1

**PODCAST PODCAS BOCOR
ALUS POLITIK TEMPO**

Sesudah teror Kepala Babi dan Bangkai Tikus

1. Tabel Analisis Konten 3 Bulan Sebelum Kejadian

No	Judul Konten	Isi Kritikan Kepada Pemerintah	Sikap	Indikasi Independensi
1.	<p>Pagar Makan Lautan (Misteri dalang pembuatan pagar bambu di teluk Jakarta).</p> <p>https://youtu.be/akXwpkctEHI?si=jWWe9bg2HT7jeS1O</p>	<p>Podcast Podcas Bocor Alus Politik Tempo menyoroti bahwa proyek ini dijalankan tanpa kejelasan izin HGB (Hak Guna Bangunan) diatas laut, yang seharusnya tidak sah. Proyek ini dianggap kurang etis dan tidak berpihak pada masyarakat pesisir, khususnya nelayan. Ada indikasi campur tangan elite politik dan korporat dalam pengerjaan pagar bambu, menyiratkan keberpihakan pada kepentingan oligarki, bukan publik. Tempo mengungkap bahwa hukum bisa dimanipulasi untuk keuntungan pihak tertentu dibalik proyek ini. Disebutkan bahwa hal ini mengidentifikasikan ketidakadilan structural, dimana kekuasaan lebih diutamakan dari pada kepentingan rakyat.</p>	<p>Jurnal Investigatif Podcast Bocor Alus Politik Berusaha menggali fakta tersembunyi (mendalam), metode yang digunakan yaitu jurnalis investigative yang mengandalkan wawancara mendalam, analisis dokumen, observasi lapangan. Serta menggunakan prinsip seperti keseimbangan dimana mereka mencoba memberikan ruang bagi berbagai sudut pandang</p>	Indedent

2.	<p>Aktor dan Lobi – lobi di Balik Revisi UU TNI</p> <p>https://youtu.be/z6nSQrYWJIY?si=o5IM1c27zHhca1CN</p>	<p>Podcast Podcas Bocor Alus Politik Tempo, tersebut membahas bagaimana proses revisi Undang-Undang TNI ternyata tidak berjalan secara terbuka, melainkan dipengaruhi oleh lobi-lobi politik dari berbagai aktor yang memiliki kepentingan tertentu. Dalam podcast tersebut, jurnalis Tempo menjelaskan bahwa ada campur tangan partai politik, terutama PDI-P, yang ikut mengawal proses revisi melalui penempatan orang-orangnya di panitia kerja pembahasan. Kritik utama yang disampaikan adalah bahwa revisi ini dilakukan tanpa transparansi dan berpotensi membuka kembali ruang bagi militer untuk masuk ke jabatan sipil, sesuatu yang dianggap berbahaya karena bisa mengarah pada kembalinya praktik dwifungsi seperti pada masa Orde Baru. Tempo menilai bahwa langkah pemerintah ini dapat melemahkan kontrol sipil terhadap militer, menggeser arah reformasi, dan mengancam demokrasi. Podcast ini mengajak publik untuk lebih waspada karena perubahan UU penting seperti ini seharusnya dilakukan melalui diskusi terbuka, bukan lewat manuver elite di belakang layar.</p>	<p>Jurnalis Podcas Bocor Alus Politik Tempo menunjukkan sikap kritis, serta berhati – hati dalam mengolah informasi. Mereka tidak hanya menerima penjelasan resmi pemerintah, tetapi justru menggali apa yang terjadi dibalik layar, termasuk lobi – lobi politik dan kepentingan actor tertentu dalam revisi UU TNI. Bersikap tegas tetapi tetap berbasis data, karena sikap kritik yang disampaikan dihubungkan dengan fakta, dokumen, serta pernyataan sumber terpercaya. Jurnalis juga menjaga prinsip transparansi dan kontrol terhadap kekuasaan dengan menyoroti kebijakan yang dinilai berpotensi mengancam demokrasi dan profesionalisme politik.</p>	Independent
----	--	--	--	--------------------

3.	<p>Seru dan Lucu, Diskusi 100 Hari Prabowo Bareng Inaya Wahid dan Cak Anam.</p> <p>https://youtu.be/aQj-JjabU2Y?si=66H6bwXjI75GN9GC</p>	<p>Podcast Podcas Bocor Alus Politik Tempo dalam hal ini membahas evaluasi terhadap 100 hari pertama pemerintahan Prabowo Subianto. Dalam diskusi tersebut, Host Tempo bersama para narasumber melihat bahwa selama 100 hari ini terdapat tanda-tanda kemunduran demokrasi, yang mereka sebut sebagai —mati suri demokrasil. Pembicaraan berfokus pada kebijakan pemerintah yang dinilai tidak berpihak kepada rakyat, terutama di tengah munculnya demonstrasi mahasiswa yang memprotes arah kebijakan tersebut. Mereka juga menyoroti peran aktor-aktor tertentu dalam pemerintahan serta potensi meningkatnya dominasi kekuasaan yang bisa mengancam kebebasan sipil dan kontrol publik. Secara keseluruhan, podcast ini mengajak penonton untuk melihat lebih kritis jalannya pemerintahan, bukan hanya dari pencitraan, tetapi dari dampaknya terhadap demokrasi dan kehidupan masyarakat.</p>	<p>Host jurnalis Podcast Podcas Bocor Alus Politik Tempo cenderung mengambil sikap yang kritis, terbuka, dan berani dalam membahas kinerja 100 hari pemerintahan Prabowo. Sikap kritis ini terlihat dari cara mereka menyoroti tanda - tanda kemunduran demokrasi, seperti berkurangnya ruang kritik, kebijakan yang dinilai tidak transparansi, serta munculnya potensi dominasi kekuasaan tertentu. Host juga independent karena tetap menjaga jarak dari kepentingan politik manapun, sehingga mereka bebas mengungkapkan kekhawatiran publik tanpa tekanan.</p>	Independent
----	--	---	---	--------------------

2. Tabel Analisis Konten 3 Bulan Setelah Kejadian

No	Judul Konten	Isi Kritikan Kepada Pemerintah	Sikap	Indikasi Independensi
1.	<p>Komunikasi Buruk Presiden Prabowo dan Para Menteri.</p> <p>https://youtu.be/qlctR9hQazg?si=-bczFa8g_N9wNwnkp</p>	<p>Podcast Bocor Alus Politik tersebut menyampaikan kritik bahwa pemerintahan Prabowo masih lemah dalam komunikasi publik, terutama dalam menyampaikan kebijakan dan memberi penjelasan kepada masyarakat. Para jurnalis menyoroti bahwa beberapa pejabat kerap membuat pernyataan terburu-buru atau kontroversial yang justru menimbulkan blunder dan menurunkan kepercayaan public pemerintahan Prabowo di kritik bahwa kurang konsistensi serta koordinasi dalam tim komunikasi pemerintah sehingga narasi resmi yang keluar sering tidak jelas dan membingungkan. Kondisi ini dianggap berisiko melemahkan transparansi dan kebebasan pers karena publik kesulitan mendapatkan informasi yang utuh mengenai kebijakan yang diambil. Karena itu, podcast ini menekankan pentingnya pemerintah memperbaiki pola komunikasi, meningkatkan kejelasan informasi, dan lebih bertanggung jawab kepada publik dalam setiap penyampaian kebijakan.</p>	<p>Jurnalis Investigatif Podcast Podcas Bocor Alus Politik Tempo menunjukkan sikap yang kritis, independen, dan berani dalam hal ini, Mereka tidak sekadar mengulang pernyataan resmi pemerintah, tetapi justru mempertanyakan kekacauan informasi yang muncul dari para pejabat dan dampaknya bagi publik. Sikap kritis terlihat dari cara mereka membedah setiap blunder komunikasi dengan analisis yang tajam namun tetap berbasis data dan pengamatan lapangan. Mereka juga menunjukkan independensi karena tidak terlihat memihak pada kelompok politik mana pun; fokus mereka tetap pada kepentingan publik dan pentingnya transparansi. Selain itu, ada sikap keberanian untuk menyampaikan kritik secara terbuka meski menyangkut figur-figur penting dalam pemerintahan.</p>	<p>Independent</p>

2.	<p>Intimidasi Aktivistis Penentang Revisi UU TNI".</p> <p>https://youtu.be/JCpXjiQF49c?si=N_VE159heXkUHER4</p>	<p>Bocor Alus Politik membahas kasus intimidasi terhadap aktivis yang menolak revisi UU TNI hal ini menunjukkan bagaimana penolakan terhadap revisi bisa memicu tekanan, ancaman, atau tindakan represif terhadap warga atau aktivis. Tema utama adalah betapa rawannya ruang demokrasi dan kebebasan berekspresi ketika kritik terhadap kebijakan militer direspons dengan intimidasi, bukan dialog. Kritikan diarahkan pada pemerintah dan pihak yang mendukung revisi UU, yang dianggap tidak menghormati hak warga untuk mengkritik dan mempertanyakan kebijakan. Melalui liputan ini, wartawan investigatif menyoroti bahwa proses perubahan kebijakan penting seperti UU TNI tidak hanya soal legislasi tetapi juga soal bagaimana masyarakat dan aktivis yang kritis diperlakukan. Mereka memperingatkan bahwa intimidasi terhadap aktivis adalah sinyal buruk bagi demokrasi dan kebebasan sipil.</p>	<p>Sikap yang ditunjukkan ialah tegas dan kritis dalam menanggapi berbagai tindakan intimidasi terhadap aktivis. Mereka berani mengungkap kasus-kasus tersebut meskipun melibatkan pihak berkuasa atau aparat, karena mereka meyakini bahwa mengawasi kebijakan publik dan melindungi kebebasan berekspresi adalah bagian penting dari tanggung jawab jurnalistik. Sikap independen mereka terlihat dari cara mereka tetap berfokus pada fakta, memberikan ruang bagi korban atau aktivis untuk menyampaikan pengalaman, serta berani mengangkat isu-isu sensitif meskipun memiliki risiko. Selain itu, mereka menjalankan peran sebagai watchdog dengan menegaskan bahwa revisi UU TNI dan kebijakan serupa tidak boleh dilepaskan dari dampaknya terhadap hak asasi manusia dan demokrasi. Melalui pendekatan ini, mereka memperlihatkan komitmen kuat pada transparansi, keadilan, dan pluralisme, sekaligus menolak segala bentuk intimidasi sebagai cara merespons kritik.</p>	Independent
----	---	---	---	--------------------

3.	<p>—Gejala Represif Pemerintahan Prabowo.</p> <p>https://youtu.be/F_hD0THcAyc?si=EKj03IeJhUkpAFwv</p>	<p>Podcast Podcas Bocor Alus Politik Tempo menilai bahwa pemerintahan saat ini mulai menunjukkan tanda-tanda sikap represif, yaitu kecenderungan untuk membatasi kebebasan sipil dan menekan kritik dari masyarakat. Dalam pembahasannya, mereka menjelaskan bagaimana sejumlah kebijakan, tindakan aparat, maupun pola kerja pemerintahan dapat memunculkan intimidasi terhadap aktivis, meredam kebebasan berpendapat, dan melemahkan hak-hak sipil. Kritik ini diarahkan kepada pemerintah karena dianggap semakin menguatkan pendekatan militeristik atau otoriter dalam menjalankan kekuasaan, yang berpotensi membahayakan kelangsungan demokrasi jika tidak diawasi. Melalui video tersebut, wartawan mengingatkan bahwa setiap kebijakan negara harus tetap menghormati hak asasi manusia dan kebebasan warga. Demokrasi, menurut mereka, harus terus dijaga dan diperkuat, bukan justru dilemahkan oleh tindakan yang membungkam kritik.</p>	<p>Menunjukkan Sikap yang tegas dan kritis dalam menyoroti berbagai tindakan intimidasi terhadap aktivis. Mereka berani mengungkap kasus-kasus tersebut meskipun melibatkan pihak berkuasa atau aparat, karena mereka meyakini bahwa tugas jurnalis adalah mengawasi kebijakan publik serta menjaga kebebasan berekspresi. Sikap independen mereka terlihat dari cara mereka tetap berpegang pada fakta, memberikan ruang bagi korban atau aktivis untuk menceritakan pengalaman mereka, dan berani membahas isu-isu sensitif meskipun penuh risiko. Selain itu, mereka menjalankan fungsi sebagai watchdog dengan menegaskan bahwa revisi UU TNI dan kebijakan serupa tidak bisa dipisahkan dari dampaknya terhadap hak asasi manusia dan kondisi demokrasi. Melalui cara kerja tersebut, mereka menunjukkan komitmen kuat terhadap transparansi, keadilan, dan keberagaman pandangan, sekaligus menyampaikan penolakan yang jelas terhadap segala bentuk intimidasi sebagai respons atas kritik.</p>	Independent
----	--	---	--	--------------------

b. Sekunder

Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (dari pihak lain), atau bisa dikatakan sebagai data pendukung Sugiyono.

Data sekunder diperoleh oleh peneliti dari berbagai dokumen, jurnal, buku dan sumber lain yang menjadi landasan untuk menguatkan penelitian ini,⁷² seperti:

- a) Artikel dan laporan media terkait insiden teror terhadap Tempo.
- b) Dokumentasi resmi Tempo terkait kebijakan editorial dan independensi.
- c) Jurnal ilmiah, skripsi, dan buku yang membahas jurnalisme investigatif, independensi media, serta dinamika tekanan terhadap pers di Indonesia.

E. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan langkah strategis dalam penelitian karena menentukan validitas dan kualitas hasil akhir yang diperoleh.⁷³ Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui beberapa langkah yang disesuaikan dengan pendekatan studi kasus kualitatif. Penelitian ini bertujuan untuk menggali dan memahami secara mendalam bagaimana independensi program investigatif Bocor

⁷² Journal Presumption and O F Law, *MEWUJUDKAN INDEPENDENSI PERS DI INDONESIA A . Pendahuluan Indonesia Merupakan Negara Yang Memprioritaskan Kedaulatan Rakyat Sesuai Dengan Dasar Pada Pancasila Sila Ke-4 , Laporan Pers Memiliki Peran Penting Sebagai Landasan Pertimbangan Dewan Perwakilan R^e, 7.April (2025), pp. 48–58; *Dasar_dasar_Riset_Pemasaran_Edisi_4_jili*.*

⁷³ Wawancara D A N Kuesioner, *Teknik Pengumpulan Data*, 3.1, pp. 39–47.

Alus Media Tempo dijalankan setelah insiden teror simbolik yang menimpa redaksi Tempo. Oleh karena itu, teknik pengumpulan data difokuskan pada pengamatan terhadap isi media, pengumpulan dokumen pendukung, serta (jika memungkinkan) wawancara dengan pihak-pihak yang relevan.

a) Observasi Isi (Content Observation)

Observasi isi, atau yang sering disebut *analisis isi (content analysis)*, merupakan metode penelitian yang digunakan untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan menarik kesimpulan dari isi komunikasi, baik berupa teks, gambar, maupun simbol-simbol lainnya.

Peneliti melakukan pengamatan langsung terhadap beberapa episode Podcast Bocor Alus Politik Media Tempo yang dirilis pada rentang waktu Maret hingga Agustus 2025, yaitu pasca terjadinya insiden pengiriman kepala babi dan bangkai tikus ke kantor Tempo. Observasi ini dilakukan untuk menelaah secara mendalam bagaimana independensi redaksi direpresentasikan dalam narasi yang dibangun, pemilihan topik, gaya bahasa, serta sumber-sumber yang digunakan dalam penyusunan konten investigatif. Data yang diperoleh dari observasi ini dicatat dan dikategorikan untuk dianalisis secara kualitatif.

b) Studi Dokumentasi

Studi dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara menelaah dokumen-dokumen tertulis, arsip, rekaman, atau bahan-bahan tertulis maupun visual lain yang relevan dengan fokus penelitian.

Teknik ini digunakan untuk mengumpulkan berbagai dokumen tertulis dan rekaman digital yang berkaitan dengan topik penelitian. Dokumen yang dikumpulkan meliputi: transkrip podcast, artikel berita, rilis resmi dari Tempo, pernyataan publik dari redaksi, serta tanggapan masyarakat atau organisasi pers terhadap teror yang terjadi. Selain itu, peneliti juga mengakses arsip Tempo.co dan platform media sosial resmi Bocor Alus untuk memperoleh dokumentasi tambahan. Studi dokumentasi ini penting untuk memberikan konteks dan mendukung temuan yang diperoleh dari observasi isi.

F. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini, analisis data dilakukan secara bertahap dan berkesinambungan sejak proses pengumpulan data hingga penyusunan temuan penelitian. Analisis data dalam penelitian kualitatif dengan jenis studi kasus intrinsik ini menggunakan model interaktif Miles dan Huberman yang meliputi empat komponen utama⁷⁴, yaitu: pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan dan verifikasi. Dalam konteks penelitian ini, seluruh proses analisis dilakukan terhadap enam episode Podcast Bocor Alus Politik Tempo, yang meliputi tiga episode sebelum terjadinya teror dan tiga episode setelah peristiwa teror kepala babi dan bangkai tikus. Setiap tahap analisis dilakukan secara sistematis untuk menemukan pola-pola independensi media yang tercermin dalam penyajian konten investigatif

⁷⁴ Hadi, Abd. *Penelitian kualitatif studi fenomenologi, case study, grounded theory, etnografi, biografi*. CV. Pena Persada, 2021.

Bocor Alus Politik Media Tempo sebelum teror. Adapun uraian setiap tahap sebagai berikut:

a. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui beberapa langkah yang saling berkaitan. Pertama, peneliti mengumpulkan seluruh episode Podcast Bocor Alus Politik Tempo yang menjadi objek kajian, yaitu enam episode yang terdiri atas tiga episode sebelum teror dan tiga episode setelah teror. Semua episode tersebut diakses melalui kanal resmi YouTube Tempo, kemudian ditonton secara menyeluruh untuk memperoleh gambaran awal mengenai pola pembahasan, konteks narasi, dan isu-isu utama yang diangkat. Setelah itu, peneliti melakukan proses dokumentasi konten dengan mencatat bagian-bagian penting dari setiap episode, termasuk pernyataan host, penggunaan data pendukung, pemilihan sumber, serta bentuk kritik yang diarahkan kepada pihak tertentu. Selain itu, peneliti juga membuat transkrip dari dialog atau pernyataan yang relevan dengan fokus penelitian, seperti aspek independensi media, prinsip ideologis jurnalisisme, dan prinsip dasar pemberitaan. Proses pengumpulan data ini dilakukan secara berulang untuk memastikan bahwa seluruh informasi yang penting benar-benar tercatat dan tidak ada detail yang terlewat. Dengan cara ini, peneliti memperoleh data yang lengkap, terstruktur, dan siap dianalisis lebih lanjut.

b. Reduksi Data

Dalam penelitian ini dilakukan dengan cara menyeleksi, memfokuskan, serta menyederhanakan berbagai informasi yang

muncul dari keenam episode Podcast Bocor Alus Politik Tempo yang dianalisis. Pada tahap ini, peneliti mengidentifikasi bagian - bagian konten yang memiliki relevansi langsung dengan fokus penelitian, yaitu bagaimana independensi program investigatif Bocor Alus Politik diwujudkan dalam implementasi prinsip ideologis jurnalisme serta konsistensi prinsip dasar pemberitaan sebelum teror kepala babi dan bangkai tikus.

Setiap episode ditelaah secara cermat untuk menemukan pola-pola tertentu, seperti cara host dalam menyampaikan kritik terhadap kekuasaan, penggunaan data dan dokumen pendukung, pemilihan narasumber, serta adanya indikasi keberimbangan atau verifikasi yang menunjukkan kualitas profesionalisme jurnalistik. Seluruh kutipan, temuan, dan informasi penting kemudian dikelompokkan ke dalam kategori tematik, seperti fungsi watchdog, proses verifikasi, keberanian redaksional, dan konsistensi standar editorial sebelum dan sesudah peristiwa teror. Melalui proses pengelompokan dan pengkodean ini, peneliti dapat memusatkan perhatian pada informasi yang benar-benar relevan, sehingga data yang awalnya sangat luas dapat dipadatkan menjadi temuan inti yang lebih terarah dan siap untuk dianalisis secara mendalam pada tahap berikutnya.

c. Penyajian Data

Penyajian data dalam penelitian ini dilakukan dengan menyusun seluruh temuan hasil reduksi ke dalam bentuk uraian naratif yang sistematis, sehingga hubungan antarkategori dapat terlihat dengan jelas. Pada tahap ini, peneliti menyajikan

informasi dalam bentuk deskripsi yang menggambarkan pola-pola independensi media yang muncul dari enam episode Podcast Bocor Alus Politik Mediaa Tempo, baik sebelum maupun setelah terjadinya peristiwa teror. Proses penyajian dilakukan dengan merangkum setiap temuan utama, seperti arah kritik yang diberikan host, konsistensi penggunaan data faktual, pola penyampaian informasi, serta cara redaksi mengonstruksi narasi dalam membahas isu-isu sensitif.

Perbandingan antara episode sebelum teror dan sesudah teror juga dituangkan dalam bentuk uraian deskriptif untuk melihat apakah terdapat perubahan signifikan dalam gaya penyajian berita, keberanian mengangkat isu tertentu, atau konsistensi dalam penerapan prinsip dasar pemberitaan seperti akurasi, keberimbangan, dan verifikasi. Selain itu, peneliti juga memasukkan kutipan-kutipan relevan dari transkrip podcast sebagai penguat dan bukti konkret atas temuan yang disajikan. Penyajian data secara naratif ini tidak hanya memudahkan pembaca memahami konteks setiap temuan, tetapi juga memungkinkan peneliti melihat keterkaitan antarinformasi sebagai dasar dalam proses penarikan kesimpulan penelitian.

d. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Penarikan kesimpulan dalam penelitian ini dilakukan setelah seluruh proses analisis data melalui tahapan pengumpulan, reduksi, dan penyajian data selesai. Pada tahap ini, peneliti mengintegrasikan berbagai temuan yang telah tersusun sebelumnya untuk menghasilkan pemahaman menyeluruh

mengenai independensi program investigatif Bocor Alus Tempo pasca-teror kepala babi dan bangkai tikus.

Kesimpulan disusun berdasarkan pola-pola yang muncul secara konsisten dari data, seperti keberlanjutan fungsi watchdog, ketegasan dalam mengkritik kekuasaan, penerapan verifikasi sumber, serta konsistensi standar profesional jurnalisisme baik sebelum maupun setelah terjadinya teror.

Temuan-temuan tersebut kemudian dikaitkan dengan teori independensi media menurut McQuail dan prinsip dasar pemberitaan sebagai kerangka teoretis utama dalam penelitian ini. Setelah kesimpulan awal terbentuk, peneliti melakukan verifikasi dengan cara meninjau kembali data mentah, transkrip, serta catatan analisis untuk memastikan bahwa interpretasi yang dihasilkan tidak menyimpang dari informasi asli.

Verifikasi juga dilakukan secara berulang untuk memastikan validitas, konsistensi, dan keakuratan temuan, sehingga kesimpulan penelitian benar-benar dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Melalui proses penarikan kesimpulan dan verifikasi yang dilakukan secara cermat dan reflektif ini, penelitian menghasilkan gambaran yang utuh dan kredibel mengenai bagaimana independensi media diwujudkan oleh program Bocor Alus Tempo meskipun berada dalam situasi tekanan dan intimidasi.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian Podcast Bocor Alus Politik

Tempo

Perkembangan konvergensi media muncul sejalan dengan perubahan cara masyarakat dalam mengakses informasi yang kini semakin bertumpu pada platform digital. Berdasarkan pandangan peneliti, situasi tersebut mendorong Tempo untuk tidak lagi hanya mengandalkan media cetak, tetapi juga mengembangkan produk jurnalistik dalam format multimedia, salah satunya melalui Podcast *Bocor Alus*. Peneliti memandang bahwa podcast ini menjadi wadah baru bagi Tempo untuk menyampaikan liputan investigatif dengan gaya yang lebih komunikatif, interaktif, dan mudah dijangkau oleh khalayak yang lebih luas. Format dialog yang dihadirkan memungkinkan penyampaian informasi tidak sekadar pengulangan isi majalah, melainkan juga pendalaman konteks, penelusuran fakta, serta gambaran proses kerja jurnalistik yang melatarbelakangi sebuah isu.

Menurut peneliti, sebagai bagian dari produk jurnalisme investigatif, *Bocor Alus* tetap menjalankan prinsip verifikasi, independensi, dan orientasi pada kepentingan publik sebagaimana menjadi ciri khas Tempo. Peneliti menilai keberadaan podcast ini penting untuk dikaji karena menunjukkan bentuk adaptasi praktik jurnalisme investigasi dalam ekosistem digital tanpa mengabaikan tanggung jawab sosial pers. Oleh sebab itu, bagi peneliti, pemahaman mengenai profil, proses produksi, dan arah pemberitaan *Bocor Alus* menjadi pijakan utama

sebelum peneliti menguraikan temuan penelitian yang berkaitan dengan prinsip ideologis, prinsip dasar pemberitaan, serta strategi redaksi dalam merespons berbagai tekanan eksternal.

Gambar 4.1



1. Podcast Bocor Alus Politik Tempo

Podcast Bocor Alus merupakan perluasan dari isi majalah Tempo. Sejumlah informasi yang disampaikan di podcast tersebut pun telah dimuat atau akan ditulis di majalah Tempo yang terbit setiap pekan. Menurut Pemimpin Redaksi Majalah Tempo Setri Yasra, siaran 'Bocor Alus Politik' merupakan inovasi produk jurnalistik dari Kelompok Tempo Media. Tujuannya adalah menyebarluaskan informasi yang telah diverifikasi untuk kepentingan publik. Dunia media massa kini memasuki era konvergensi. Secara umum, konvergensi media didefinisikan sebagai penggabungan media massa dengan teknologi digital yang berkembang saat ini. Berbagai jenis

media, seperti majalah, koran, radio, televisi digabungkan menjadi satu platform yang sama. Konvergensi media sendiri timbul seiring dengan berkembangnya teknologi, khususnya peralihan teknologi analog ke digital.⁷⁵

Podcast Bocor Alus Politik Media Tempo merupakan salah satu produk jurnalistik audio yang diproduksi oleh Tempo Media Group melalui tim jurnalis desk politiknya. Program ini disiarkan secara rutin melalui berbagai platform digital seperti Spotify dan YouTube, serta menjadi bagian dari pengembangan konvergensi media Tempo dalam menjangkau audiens digital. Secara konseptual, Podcast Bocor Alus Politik Media Tempo tidak mengusung format wawancara konvensional yang menghadirkan narasumber eksternal secara langsung di setiap episode, melainkan lebih menonjolkan peran jurnalis sebagai pencerita utama. Para jurnalis yang terlibat dalam produksi podcast ini menyampaikan hasil liputan, temuan investigatif, serta analisis politik berdasarkan data dan pengalaman peliputan yang telah mereka lakukan sebelumnya.

Konsep produksi yang digunakan cenderung mengarah pada pendekatan *narrative journalism*, yaitu penyampaian informasi melalui struktur cerita yang reflektif dan analitis. Dalam format ini, jurnalis tidak hanya berfungsi sebagai penyampai kutipan narasumber, tetapi juga sebagai penafsir peristiwa yang memberikan konteks, latar belakang, serta dinamika di balik suatu isu politik. Dengan demikian, narasi yang dibangun sering kali berupa diskusi internal antarjurnalis yang mengulas fakta, data, serta proses investigasi yang telah dilakukan oleh redaksi Tempo. Model ini memungkinkan penyajian isu secara lebih mendalam dan kontekstual, meskipun tidak selalu

⁷⁵ Susanto, 'Podcast —Podcas Bocor Alus Politik Tempol: Podcast Tempo Versus Erick Thohir'.

menghadirkan suara narasumber secara langsung dalam bentuk rekaman wawancara.⁷⁶

Podcast Bocor Alus Politik alias BAP Tempo dibawa ke Dewan Pers pada 13 Juli 2023. Tujuannya adalah untuk menyebarkan informasi yang telah di verifikasi sumbernya untuk kepentingan publik. Konsep podcast Bocor Alus Politik sangat sederhana yaitu diskusi santai antar jurnalis tentang informasi yang mereka kumpulkan untuk versi cetak dan majalah digital. Edisi digital dari majalah Tempo diterbitkan setiap Minggu pagi dan edisi cetak di bagikan setiap Senin. Podcast Bocor Alus Politik berisi bocoran eksklusif politik yang di bahas oleh jurnalis-jurnalis Tempo yaitu Stefanus Pramono, Francisca Christy Rosana, Raymundus Rikang, Hussein Abri Dongoran, dan Egi Adyatama. Mereka —membocorkanl informasi yang bisa jadi belum terekspos media. Hingga saat ini podcast Bocor Alus Politik telah mencapai 162 episode. Podcast Bocor Alus Politik disiarkan setiap Sabtu sore, menjadi sumber awal bagi pembaca untuk mengetahui apa yang di tulis oleh tim politik pada Minggu pagi dan Senin. Podcast Bocor Alus Politik yang diproduksi oleh Tempo Media Group dan didistribusikan melalui kanal YouTube Tempodotco dapat dilihat sebagai representasi praktik jurnalisme di era media baru (new media).⁷⁷

⁷⁶ Putra, Robby Aditya, Mochamad Aris Yusuf, and Maulida Fitri. "Dakwah Communication: An Alternative Way For Children Caused By Broken Home." KOMUNIKA 6.1 (2023).

⁷⁷ Maulana, Dimas Firlu. 2025. Narasi Komunikasi Podcast Bocor Alus Politik Melalui YouTube Tempodotco Perspektif Wacana Kritis. Tesis Magister. Jakarta: Program Studi Magister Komunikasi dan Penyiaran Islam, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

2. Podcast Bocor Alus Politik Tempo Sebagai Program Investigasi

Podcast sebagai format media digital telah berkembang pesat dan menjadi salah satu bentuk media baru yang mulai masuk ke ranah jurnalistik. Media podcast tidak lagi sekadar hiburan atau sarana berbagi opini, melainkan juga alat yang efektif untuk menyampaikan berita, analisis, dan hasil peliputan investigatif kepada publik secara luas. Sebagai dokumen digital audio yang dapat diakses melalui berbagai platform daring, podcast menawarkan kebebasan narasi dan kenyamanan konsumsi informasi bagi pendengar dibandingkan media konvensional seperti radio atau televisi, sehingga berpotensi memperluas jangkauan serta kualitas informasi bagi khalayak luas.

Studi sebelumnya menunjukkan bahwa *podcast* dipandang sebagai *medium* informasi yang semakin kredibel dan mampu menghadirkan perspektif beragam karena independensinya dalam memilih topik dan bentuk narasi, yang menguatkan posisi *podcast* sebagai alternatif jurnalistik di era media digital saat ini. Podcast sebagai media alternatif yang terpercaya semakin memperkuat posisinya dalam lanskap komunikasi modern, sejalan dengan temuan yang mendukung Teori Penggunaan dan Kepuasan, di mana audiens secara aktif memilih media yang sesuai dengan kebutuhan, minat, dan preferensi mereka.⁷⁸

Dalam konteks jurnalistik investigatif, *podcast* memberikan ruang bagi jurnalis untuk mendalami isu, melakukan refleksi naratif, dan membawa pendengar —masuk ke dalam ruang redaksi— melalui

⁷⁸ Zulfiah Larisu and Abdul Malik, 'Tren Podcast Sebagai Media Alternatif Jurnalisme Independen: Studi Tentang Persepsi Audiens Terhadap Kredibilitas Dan Objektivitas', 2.3 (2025), pp. 14–23.

suara yang personal namun investigatif.⁷⁹ Penelitian yang membahas Podcast jurnalistik tempo termasuk *Bocor Alus Politik*, menunjukkan bahwa podcast ini tidak hanya mengajikan ulang berita. Namun, podcast tersebut menjadi wadah bagi jurnalis untuk menjelaskan hasil investigasi mereka seccara lebih mendalam dengan gaya cerita yang reflektif. Melalui suara narrator dan dialog. Pendengar diajak meraskan langsung pengalaman jurnalis saat melakukan peliputan. Dengan cara ini, praktik jurnalistik yang biasanya bersifat konvensional menjadi lebih luas, karena jurnalis dapat memadukan data dan fakta lapangan dengan refleksi pribadi, tanpa mengabaikan prinsip – prinsip jurnalistik.

Bocor Alus Politik sebagai bagian dari produk jurnalistik Tempo memang berangkat dari tradisi jurnalistik investigatif media cetak dan digital yang kritis terhadap kekuasaan dan kebijakan publik. Namun, podcast memberikan kesempatan lebih besar bagi jurnalis untuk membangun narasi investigatif yang panjang dan terstruktur, memungkinkan pendengar untuk menyimak proses peliputan serta interpretasi data secara lebih mendalam dibandingkan format berita singkat. Pendekatan ini bukan hanya menguatkan kredibilitas informasi, tetapi juga membentuk hubungan kepercayaan dengan pendengar karena kemampuan format *podcast* dalam menyampaikan kompleksitas isu secara runtut dan komunikatif. Lebih jauh, *podcast* jurnalistik seperti *Bocor Alus Politik* juga menunjukkan ciri khas media baru dalam penyampaian informasi, yaitu perpaduan antara wawasan jurnalistik, kemampuan naratif, serta fleksibilitas format

⁷⁹ Harmonis, ‘Jurnalistik Investigasi’.

audio yang dapat dikonsumsi kapan saja oleh audiens. Karakteristik ini sejalan dengan temuan penelitian lain yang menunjukkan bahwa *podcast* semakin dianggap sebagai sumber informasi alternatif yang dipercaya masyarakat karena transparansi narasi dan kebebasan dalam memilih fokus topik yang relevan dengan kehidupan publik.⁸⁰ Dengan demikian, posisi *Bocor Alus Politik* dalam ekosistem media digolongkan sebagai bentuk inovasi jurnalistik pada era digital yang memperluas cara pandang dan pendekatan media terhadap pelaporan investigatif.

3. Konteks Teror Kepala Babi dan Bangkai Tikus terhadap Podcast

Di Indonesia, kebebasan pers sebagai salah satu pilar demokrasi masih menghadapi berbagai ancaman yang nyata dan serius. Berbagai kasus kekerasan, intimidasi, hingga upaya membungkam suara jurnalis menunjukkan bahwa perlindungan terhadap kebebasan berekspresi belum sepenuhnya terlaksana dengan baik. Salah satu contoh terkini yang menyoroti kondisi tersebut adalah kasus teror yang menimpa jurnalis Tempo, Francisca Christy Rosana (Cica), pada Maret 2025.

Francisca Christy Rosana, yang juga dikenal sebagai host siniar *Bocor Alus Politik* program yang kerap mengangkat isu-isu politik dengan pendekatan kritis mengalami teror fisik dan digital yang serius. Pada 19 Maret 2025, sebuah paket mencurigakan dikirimkan ke kantor Tempo. Paket itu berisi kepala babi dengan kedua telinganya yang terpotong, sebuah simbol ancaman dan

⁸⁰ Anita Nim, *SKRIPSI STRATEGI MEDIA ONLINE PIJAR NEWS DALAM PROGRAM STUDI JURNALISTIK ISLAM*, 2024.

intimidasi yang mengerikan. Paket tersebut diterima oleh satuan pengamanan dan baru dibuka oleh Cica bersama rekannya pada keesokan harinya. Tiga hari kemudian, pada 22 Maret 2025, ditemukan paket lain berupa kardus berisi enam bangkai tikus telah terpenggal kepalanya, yang diketahui dilemparkan ke area kantor redaksi pada dini hari.⁸¹ Tak hanya itu, Cica juga menjadi sasaran doxing di media sosial, di mana data-data pribadinya disebar oleh akun-akun anonim, memperparah tekanan psikologis dan ancaman keselamatannya.

Produksi jurnalistik tidak hanya dipengaruhi oleh proses internal redaksi, tetapi juga oleh kondisi lingkungan sosial dan politik di mana media tersebut beroperasi. Dalam kasus *Bocor Alus Politik*, rentetan serangan simbolik berupa kiriman kepala babi dengan telinga terpotong kepada salah satu host serta enam bangkai tikus tanpa kepala yang diterima redaksi Tempo menjadi bagian dari dinamika tekanan terhadap praktik jurnalistik investigatif di Indonesia. Herbert Blumer mendefinisikan bahwa simbolik merupakan sebuah makna atau arti dalam sebuah simbol untuk mekmanai berbagai hal, dengan kata lain simbol merupakan penggambaran dari sebuah pesan yang ingin di sampaikan.⁸² Serangan ini tidak hanya bersifat pribadi terhadap jurnalis yang menerima paket tersebut, tetapi juga menjadi penggambaran dari ancaman simbolik yang lebih luas terhadap kebebasan pers dan kerja media independen.

⁸¹ Detik News. (2025, Maret 20). Wartawannya diteror kepala babi, Pemred Tempo serahkan CCTV ke polisi. Detik News. Retrieved April 30, 2025, from <https://news.detik.com/>

⁸² Aidil Haris and Asrinda Amalia, *MAKNA DAN SIMBOL DALAM PROSES INTERAKSI SOSIAL (Sebuah Tinjauan Komunikasi)*, 29.1 (2018), pp. 16–19.

Symbolisme teror yang disampaikan melalui pengiriman kepala babi bukan sekadar bentuk intimidasi fisik, tetapi mengandung pesan psikologis yang kuat. Dalam konteks budaya Indonesia, penggunaan kepala babi terutama tanpa telinga sebagai alat intimidasi mengandung elemen penghinaan dan ancaman terselubung yang dirancang untuk menciptakan rasa takut dan ketidakpastian di kalangan jurnalis yang menjadi targetnya. Selain itu, serangkaian kejadian serupa, termasuk pengiriman bangkai tikus dan kerusakan kendaraan jurnalis, juga menunjukkan bahwa ancaman terhadap media investigatif tidak berhenti pada satu insiden tunggal, tetapi terus berulang dan beragam bentuknya.

Dari perspektif kebebasan pers, tindakan intimidatif seperti ini tidak hanya berdampak pada korban langsung, tetapi berpotensi menciptakan suasana ketakutan yang lebih luas di lingkungan media. Ancaman simbolik dapat mendorong munculnya *self-censorship* atau penghilangan kritik dalam peliputan, karena jurnalis mungkin mulai menyesuaikan pemberitaan untuk menghindari konsekuensi yang lebih berat, termasuk serangan fisik atau psikologis lebih lanjut.⁸³ Beberapa laporan media dan pengamat pers menegaskan bahwa intimidasi terhadap wartawan dapat menyebabkan tekanan psikologis yang signifikan dan berisiko mempengaruhi keputusan editorial secara tidak langsung, meskipun tidak ada pesan tertulis yang spesifik.

Teror yang menimpa Cica jelas tidak hanya ditujukan untuk menakutnaktuti secara pribadi, tetapi juga merupakan serangan

⁸³ Shafina Ayuningdhiyani Aqila, Shavira Ayunaida, and Kanaya Cinda Angelina, Penurunan Nilai Kemanusiaan Dengan Ancaman Simbolik : Studi Kasus Pengiriman Bangkai Tikus Ke Redaksi Tempo, no. 1 (2025), pp. 1–11.

terhadap kerja-kerja jurnalistik yang kritis dan independen. Serangan semacam ini dapat menciptakan iklim ketakutan di kalangan jurnalis, yang pada akhirnya menggerus kebebasan pers secara sistematis. Menanggapi insiden ini, Dewan Pers secara tegas mengutuk tindakan teror tersebut dan mendesak aparat penegak hukum untuk mengusut tuntas kasus ini. Penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku teror diperlukan untuk memberikan jaminan perlindungan kepada para jurnalis, sekaligus memastikan bahwa kebebasan pers tetap dijunjung tinggi di Indonesia.⁸⁴

Dalam konteks hukum dan demokrasi Indonesia, kebebasan pers merupakan salah satu fondasi penting yang dijamin oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Namun, lemahnya penegakan hukum terhadap pelaku intimidasi simbolik seperti pengiriman kepala babi mencerminkan celah dalam perlindungan terhadap hak jurnalis untuk bekerja tanpa takut terhadap ancaman atau kekerasan.⁸⁵ Laporan jurnalistik dan kritik dari berbagai organisasi pers menunjukkan bahwa tindakan intimidatif tersebut sejatinya merupakan bentuk pelanggaran terhadap prinsip kebebasan pers dan hak asasi manusia yang harus direspons serius oleh aparat penegak hukum dan lembaga independen seperti Dewan Pers.

Akibat dari konstelasi tekanan eksternal ini, produksi *Bocor Alus Politik* Sesudah teror berada di persimpangan antara kepatuhan terhadap prinsip jurnalistik investigatif dan tantangan lingkungan sosial-politik yang kurang mendukung kebebasan pers. Redaksi dan

⁸⁴ Khoirul Iksan, 'Kebebasan Berekspresi Dalam Demokrasi : Perspektif on Liberty John Stuart Mill Terhadap Intimidasi Jurnalis Tempo', no. 1 (2025), pp. 87–104.

⁸⁵ Iksan, 'Kebebasan Berekspresi Dalam Demokrasi : Perspektif on Liberty John Stuart Mill Terhadap Intimidasi Jurnalis Tempo'.

para jurnalis harus menghadapi berbagai ancaman tersebut sambil tetap mempertahankan kepercayaan publik, kejujuran, dan keberanian untuk menyuarkan isu-isu kritis. Dengan demikian, konteks produksi program ini tidak hanya berbicara tentang proses kerja redaksi, melainkan juga tentang kondisi demokrasi dan kebebasan media di Indonesia pada masa yang penuh tekanan terhadap media independen.

B. Hasil Penelitian

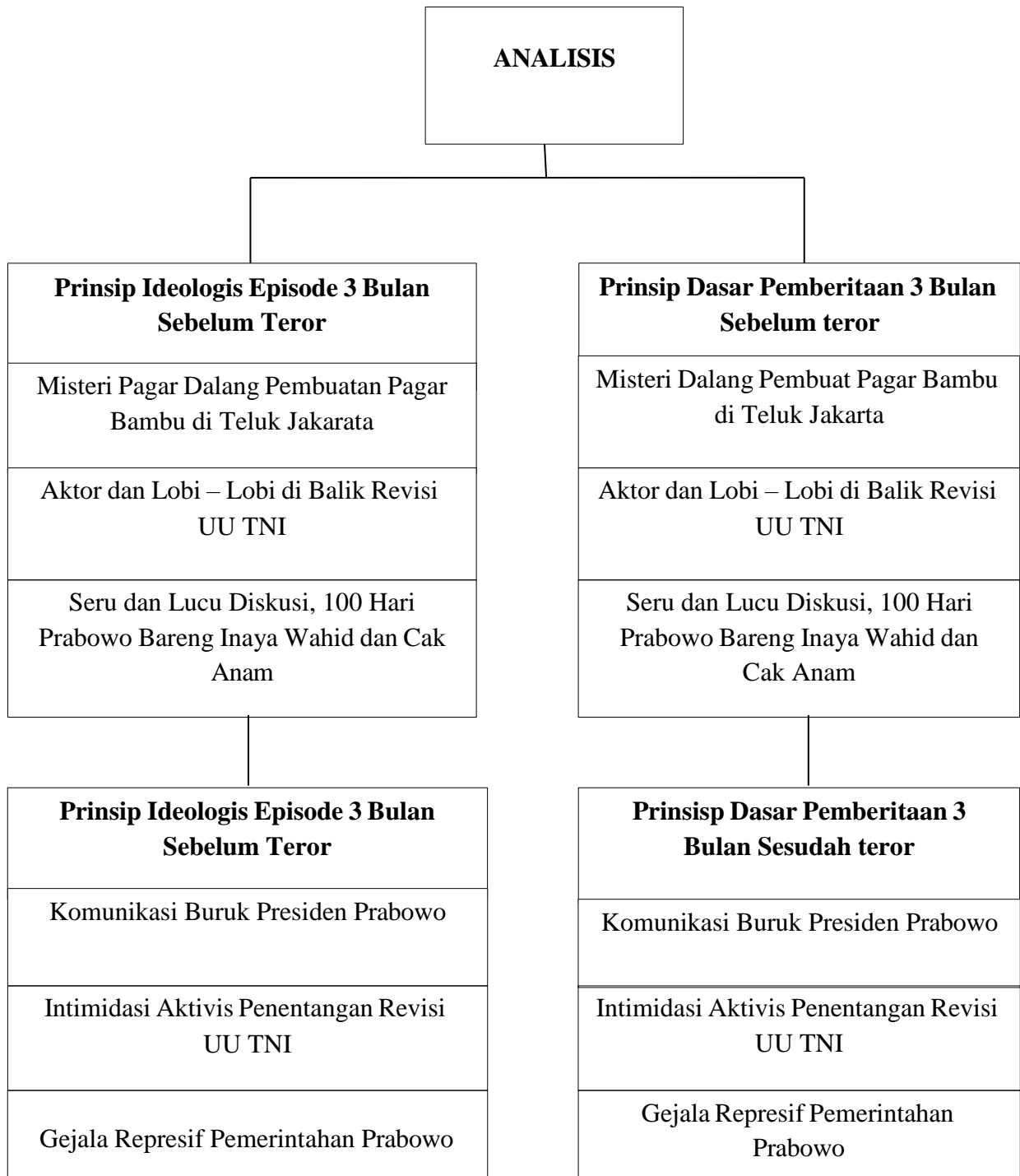
Berdasarkan fokus penelitian yang telah dirumuskan, peneliti mengarahkan analisis pada dua persoalan utama, yaitu independensi program investigatif *Bocor Alus* Media Tempo dalam mengimplementasikan prinsip ideologis jurnalisme, serta independensinya dalam mempertahankan prinsip dasar pemberitaan Sesudah teror kepala babi dan bangkai tikus. Peneliti memandang bahwa peristiwa teror tersebut tidak hanya menjadi ancaman fisik terhadap insan Tempo, tetapi juga ujian terhadap konsistensi sikap redaksional dalam menjaga otonomi, keberpihakan pada publik, dan integritas kerja jurnalistik investigatif.

Data dalam bagian ini diperoleh melalui Analisis konten Podcast Bocor Alus Politik Tempo 3 bulan Pra – Teror dan 3 bulan Sesudah teror dengan topic pembahasan kritik terhadap Pemerintah. Oleh karena itu, bagian hasil penelitian ini disusun oleh peneliti untuk menggambarkan secara menyeluruh posisi independensi Podcast Bocor Alus Politik Media Tempo, baik pada ranah ideologis maupun pada praktik pemberitaan. Peneliti berupaya mengaitkan temuan empiris dengan landasan teori yang digunakan sehingga dapat terlihat secara jelas bagaimana jurnalisme

investigatif Tempo mempertahankan prinsip dan tanggung jawab sosialnya di tengah situasi Sesudah teror.

Berikut disajikan tabel perbandingan yang bertujuan untuk memudahkan pembaca memahami arah analisis dalam penelitian ini. Melalui perbandingan episode tiga bulan sebelum peristiwa teror dan tiga bulan sesudah teror, pembaca dapat melihat bagaimana prinsip ideologis serta prinsip dasar pemberitaan yang dipegang oleh tim Podcast Bocor Alus Politik Media Tempo diimplementasikan dalam praktik produksi dan penyajian konten. Perbandingan ini menjadi penting karena tidak hanya menampilkan perbedaan atau persamaan tema, tetapi juga memperlihatkan bagaimana sikap redaksional, cara pandang terhadap isu politik, serta pendekatan analisis yang digunakan oleh jurnalis terefleksikan dalam setiap episode. Dengan demikian, tabel tersebut berfungsi sebagai pintu masuk analitis untuk menilai apakah peristiwa teror membawa perubahan terhadap orientasi ideologis dan pola pemberitaan program, atau justru memperkuat komitmen jurnalisisme investigatif yang selama ini menjadi karakter utama Podcast Bocor Alus Politik Media Tempo.

Bagan 4.1



1. Data Prinsip Ideologis Episode 3 Bulan Sebelum Teror

Pada bagian ini peneliti mengumpulkan Data Prinsip Ideologis 3 episode sebelum teror dan 3 episode setelah teror. Berdasarkan fokus penelitian yang telah dirumuskan, peneliti mengarahkan teknik pengumpulan data pada dua persoalan utama, yaitu independensi program investigatif Podcast Bocor Alus Politik Media Tempo dalam mengimplementasikan prinsip ideologis jurnalisme, serta independensinya dalam mempertahankan prinsip dasar pemberitaan Sesudah teror kepala babi dan bangkai tikus. Dengan menggunakan metode pengumpulan data observasi isi untuk mengamati, menganalisis, dan menarik kesimpulan dari isi komunikasi Melalui observasi ini, peneliti mengumpulkan data mentah berupa narasi, kutipan, alur cerita, dan pilihan isu yang disampaikan host. Peneliti juga menggunakan studi dokumentasi dengan mengumpulkan berbagai dokumen tertulis atau rekaman digital yang berkaitan dengan topik penelitian.

Peneliti melakukan pengamatan langsung terhadap beberapa Episode podcast Bocor Alus Politik Media Tempo yang dirilis pada rentang waktu Maret hingga Agustus 2025, Yaitu pasca terjadinya insiden pengiriman kepala babi dan bangkai tikus.

Tabel 4.1

No.	Judul Episode & Data	Prinsip Ideologis
1.	<p>Misteri Pagar Dalang Pembuatan Pagar Bambu di Teluk Jakarta</p> 	<p>Ideologis Pengawasan Terhadap kekuasaan (watchdog jurnalis)</p> <p>Menit ke 2.53 – 3.10, Host Podcast bocor alus politik mengucapkan, — Kita Sudah Ngapain ini untuk menelusuri siapa dibalik pembangunin pagar makan lautan ini, dan untuk apa adanya pagar laut inil.</p> <p>Ideologis jurnalisme berbasis fakta lapangan</p> <p>Menit 3.19 – 3.58, jurnalis tempo yang mengusut pagar bamboo makan laut mencoba mendatangi langsung ke lapangan, — egi jurnalis tempo sudah kelepanan ngecek pagar lautnya disana menggunakan kapal nelayan sempet mabok juga karena terombang ambing, disana dia juga menemui warga dan menurut warga jadi sekitar di akhir oktober 2024 di desa kronjo, itu warga dikejutkan oleh banyaknya truk yang masuk kedesa dia dengan membawa bambool.</p>
	<p>Host : Raymundus Rikang</p> <p>Narasumber 1: Erwan Hermawan</p> <p>Narasumber 2 : Francisca Christy Rosana</p> <p>Menit 2.53 – 3.10</p> 	

Menit 3.19 – 3.58



Menit 4.13 – 4.36



Menit 5.00 – 5.25



Ideologis Keberpihakan kepada kepentingan publik

Pada 4.13 – 4.36 menit, Narasumber jurnalis Tempo melontarkan bahwa —sekitar akhir oktober didesa kronjo, warga dikejutkan dengan banyaknya truk yang masuk kedalam desa membawa bamboo (lalu lalang), dan lucunya truk tersebut melewati post SATPOL Lairut / Kesatuan Polisi yang menjaga lautan. Masa iya truk sebesar itu lalu lalang gak ada yang tau, Banyak warga juga bertanya ini buat apa, pas ditanya ternyata untuk menancapkan bamboo dilaut untuk menahan abrasi.

Pada titik 5.00 – 5.25 menit, jurnalis tempo pun berupaya mempertanyakan dengan menunjukkan sikap penasaran — kemudian penasaran ini siapa sih?, lalu para pekerja ini bilang dia hanya disuruh oleh orang, dan ternyata yang menyuruh itu adalah utusan dari pengembang yang biasa disebut PIK (Pantai Indah Kapuk). Berdasarkan cerita lapangan ke Tempo Memang ada utusan yang menyuruh untuk menancapkan bamboo tersebut dilautl.

Menit 6.53 – 7.33, selain siapa dibalik pembuat pagar laut itu sendiri, kasus tersebut sudah lama sekitar 30 KM dan Tempo sudah lama Menulis mengenai projek ini ketika masih panjang pagar

Menit 6.53 – 7.33



Menit 33.41 – 35.13



itu 7 – 10 KM sekitar 1 tahun lalu, Tapi kemudian kebijakan karna viral proyek ini ditutup oleh Kementrian kelautan dan perikanan (disegel) sampai ketemu pemiliknya.

Ideologis Anti – Otoritarianisme & Kritik terhadap Negara

Menit 33.41 – 35.13 — setelah kita bocorin mengenai pagar makan lautan ini, lalu sikap Tempo ini seperti apa?. Jadi sikap tempo ini ca (Ica) wan (Irwan) tentu ini adalah kekonyolan lain di Republik ini, ada HGB diatas lautan, selain itu adalah bagaimana mungkin terutama kita menyoroti atau mengkritik kementrian kelautan dan periklanan KKP yang merupakan Lembaga yang punya kewenangan atau otoritas dalam hal di sektor kelautan, mana mungkin merekatidak mengetahui pekerjaan atau proyek sepanjang 30 KM yang tentu tidak bisa dibangun hanya 1 malam saja, Proyek ini hanya berjarak 40 KM dari kantor KKP kecuali dia ditempat yang terpencil dan kemudia dia tidak pernah dijamak atau didatangi oleh nelayan dan kemudian ada proyek ini mereka tidak tahu mungkin saja bisa, tetapi ini di utara Jakarta yang tidak jauh dari kantor kementrian kelutan kemudian mereka menklaim tidak tahu siapa pemilik dan penggarap proyek ini, ini merupakan

		<p>kelucuan di Republik kita ini, kami mengkritik disini Kementerian kelautan dan Perikanan KKP disini menggelengkan kepala dan mengaku tidak tahu siapa penggarap proyek ini, dan tentu saja bagaimana kebiasaan atau pola pemerintah merespon kekacauan – kekacauan atas peristiwa yang terjadi, jadi mereka baru gerak setelah adanya permasalahan yang virall.</p>
<p>2.</p>	<p>Aktor dan Lobi – Lobi Dibalik Revisi UU TNI</p> 	<p>Ideologis Wacthdog Jurnalis</p> <p>Dimenit 6.38 – 7.30 — Tentu saja pada Negara demokrasi itu seharusnya pran militer itu sudah semakin dijauhkan dari sipil gitu yaa, setelah Prabowo itu memerintahkan siapayang bergerak dan kemana?! Hussen mengatakan — Banyak Bram. Tentunya Bambang Eko dia sebagai ketua Panja Pemerintah untuk membahas Revisi UUD TNI lalu ada juga Mentri Pertahanan Safri Samsudin yang menjadi Komando revisi UUD TNI ini lalu kalau di DPR ada Sufmi Dasko Ahmad ketua harian partai grinda dan wakil ketua DPR itu sih tiga motor untuk revisi UUD TNI dan sementara ini informasi yang kita dapatkan dulu, Host Bertanya lagi —karena ini sebenarnya mau dibahas di Badan Legislasi (BALEG) DPR 1 ternyata berpindah ke komisi 1. Nah kenapa ini sempat ada kengototan dari pemerintah untuk dibahas di BALEG?,</p>
	<p>Host : Stefanus Pramono</p> <p>Narasumbae 1 : Hussein Abri</p> <p>Narasumber 2 : Francisca Christy Rosana.</p> <p>Menit 6.38 – 7.30</p> 	

		<p>Francisca menjawab — Biar Cepat! BALEG itu sekarang pabrik undang – undang biar cepat dan biar murah. Sebetulnya sejak tahun lalu sejak ada daftar infentarisasi masalah (DIM) yang keluar dari pemerintah ini sudah dibahas di internal BALEG revisi UUD TNI ini, nah DIM yang saat itu beredar di BALEG adalah DIM yang dipegang oleh teman - teman Masyarakat Sipil yang ada 2 pasal yang bermasalah pasal 47 misalnya, yang memperluas peran TNI di berbagai kementerian dan lembaga yang tidak terbatas dengan ada pengecualian kebijakan Presiden. Lalu ada juga pasal 39 misalnya memperbolehkan TNI berbisnis. Dan sebetulnya senyamang itu ya! dengan pembahasan di BALEG itu, waktu itu masih di internal BALEG ya! Pemerintah waktu itu atau Prabowo sudah menyiapkan beberapa perwira untuk disekolahkan di Universitas Pertahanan (UNHAN) untuk menambah kualitas dan kapabilitas di sektor bisnis, sudah ada khusus – khusus jadi bener – bener sudah dipersiapkan. Hussen juga menanggapi — kata panglima dulu kan TNI itu multifungsi bukan duifungsi lagi gitul.</p>
--	--	--

	<p>Menit 14.43 – 15.13.</p>  <p>Menit 15.22 – 16.08</p> 	<p>Ideologis Transparansi & Akuntabilitas</p> <p>Menit ke 14.43 – 15.13. Hussien mengatakan bahwasanya dia mendapatkan kendala untuk meliput DPR dengan Narasi — ini yang Gue sayangkan ya karena era – era sekarang ini, ini gue udah meliput DPR udah lama ya!, jadi dulukan kalau misalkan kita meliput pembahasan UUD kita bisa tuh nyomotin draft – draft revisi UUD yang ada dimeja DPR kadang – kadang ditinggalin kadang kit abaca – baca atau kita minta ke sekretariat. Nah sekarang boro – boro gak ada mereka pun bingung gitu mau nanya kesiapa, nah kadang – kadang tiba – tiba websitenya DPR eror mulu padahal kan pasti udah bayar mahal, eror gak bisa di klik dan segala macam. Nah mana transparansinya kalau gitu!!</p> <p>Ideologis Kepentingan Publik</p> <p>Dimenit 15.22 – 16.08 Francisca juga menambahkan — dan 1 lagi sen ini diakui oleh teman – teman DPR siapapun yang gue temuin di DPR!, Komunikasi Politik DPR terhadap masyarakat sipil itu kurang, bukan hanya DPR ya tapi juga Pemerintah!. Komunikasi politik itukan juga berhubungan dengan keterbukaan mereka, misalnya kelompok sipil ingin</p>
--	--	--


bertanya langsung kepada DPR atau mengetahui agenda – agenda DPR gitu, tapi itu kurang banget! Dan pemerintah dan DPR ini tidak bisa menjelaskan sebetulnya apa yang terjadi disaat ini dan apa yang dilakukan oleh pemerintah dan DPR. Termasuk yang Dinantara itu kan BUMN revisi UUD BUMN, pengusaha juga gak tau segala macam barang, tapi setelah di sah kan barulah diberitahu gini – gini segala macam!! Hussien juga menanggapi —Nah ini memang kalau menurut analisis gue ya karena lu menaruh para juru bicara yang bertugas menjadi komunikasi publik kepemerintah itu ya bazer – bazer ditaro disitu, bazerkan Bergeraknya kalau disuruh dan mereka Bergeraknya hanya untuk melawan – lawan aja gitu kan!.


Ideologis Independensi Pers

Menit 30.25 – 31.12 — nah revisi UUD TNI ini ada pesan khusus dari Prabowo untuk posisi tertentu apa itu maksudnya ca?!. francisca menanggapi hal tersebut — ya jadi ada 2 narasumber yang dihubungi oleh seorang utusan utusan itu datang dari pemerintah, nah utusan itu membawa pesan untuk menyisipkan 1 lembaga seskap di kementrian dan lembaga yang masuk dipasal 47 SESMILPERS, tadinya

Menit 30.25 – 31.12



	<p>Menit 37.20 – 38.16</p> 	<p>sekap nah sampai detik akhir tu diminta dimasukan sekap tapi ditolak oleh komisi 1 serentak, kenapa yak arena apa spesialnya sekap gitu, nah sekap sekarang kan posisinya berarti dibawah sesmil dan setara dengan elon 2 bukan sekap modal Pramono Anum yang setara menteri, jadi jauh banget nih jenjangnya.</p> <p>Ideologis Anti Militerisme dalam Ruang Sipil</p> <p>Menit 37.20 – 38.16 Tempo yang sudah pernah dibredel di Orde baru gimana sikap Tempo melihat revisi UUD TNI – Pertama tentu saja kalau kita melihat Dwifungsi TNI apakah kemudian akan terjadi? Enggak ini memang sudah terjadi terutama pada masanya Jokowi, kita melihat jikowi memberikan berbagai keistimewaan ada TNI aktif kemudian menjadi PJ kepala Daerah, itukan sebenarnya sudah sangat melanggar dan pada masanya jokowi ini sudah luar biasa ada keistimewaan yang diberikan kepada Tentara dan ini juga semakin muncul pada masanya Prabowo denganpenempatan Tedy Indrawijaya sebagai sekap saja kan itu sudah menunjukkan militer ini semakin masuk dimana – mana dan kita lihat urusan sawit, urusan pangan semuanya dipercayakan kepada TNI, ini sudah keablasan sebenarnya. Jadi sebenarnya</p>
--	--	---

		<p>kalau revisi UUD TNI ini dianggap karena alasannya akan mengembalikan Dwifungsi TNI lah Dwifungsi TNI sudah kembali sebenarnya! Dan ini hanya melegalkan saja apa yang sudah terjadi ini, misalnya untuk mencabut perwira – perwira yang sudah berada di jabatan sipil mereka kemudian mendapatkan perlindungan atau payung hukum dari sini, dan kalau kita melihat bawasanya ini merusak TNI. Kita mengharapkan TNI ini Profesional kami juga percaya kok bawasanya ada banyak TNI yang juga Profesional tapi kita melihat sekarang juga banyak yang berubah sikap. Nah ini Revisi UUD TNI sudah jelas sangat merugikan TNI sendiri, TNI sudah tidak lagi professional dan kemudian akan terjadi penumpukan, TNI justru menjadi korban dari Revisi UUD TNI itu sendiri.</p>
<p>3.</p>	<p>Seru dan Lucu Diskusi, 100 Hari Prabowo Bareng Inaya Wahid dan Cak Anam</p> 	<p>Ideologis Anti – Dinasti & Pro – Demokrasi Substantif</p> <p>Menit 0.41 – 1.04 dibagian opening menayangkan cuplikan yang berisi narasi membahas mengenai Politik Dinasti— Terimakasih masih ngedumel ke kami jadi kami bisa menyalurkan aspirasi anda, dan sebenarnya kami ini adalah penyalur aspirasi anggota dewan, </p> <p>— dan sebenarnya Anwar Usman ini</p>

<p>Host :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Francisca Christy Rosalina 2. Hussein Abry Dongoran 3. Stefanus Pramono 4. Raymundus Rikang <p>Narasumber 1 : Cak Anam Narasumber 2 : Inaya Wahid</p> <p>Menit 0.41 – 1.04</p>  <p>Menit 1.04 – 1.12</p>  <p>Menit 3.41 – 3.48</p> 	<p>sebenrnya mendatangi beberapa hakim MK dan mengatakan kalau bisa kita cepat saja mengeluarkan putusan untuk mengabulkan.l</p> <p>Idiologi Anti – Dinasti & Pro – Demokrasi Subtantif</p> <p>Menit 1.04 – 1.12 dilanjut dengan cuplikan — yang memainkan dinasti politik terus lu menyerahkan kepada rakyat dan ini pasti dinasti polotik tidak mungkin memunculkan atau melahirkan pemilu yang real tidak mungkin!l.</p> <p>—menurut ceritanya jumli adalah kalau kemudian Anwar Usman dipecat sebagai hakim anggota (tidak menjadi hakim lagi) dia bisa membentuk yang namanya majelis tandingl.</p> <p>— jauh sebelum Gibran diumumkan jadi CAWAPRES tahun ini, Ibu Iriana itu bicara dengan keluarga – keluarga dekatnya bahwa nanti milih ini ya gitu, milih ini maksudnya nanti milih pak Prabowo ya dan mas Gibranl</p> <p>Idiologi Jurnalisme Publik</p> <p>Menit 3.41 – 3.48 — dan pesan kami jangan lupakan teman – teman di sekitar kita ada banyak orang – orang yang membutuhkan suara dari teman – teman kalian ini adalah <i>voice of the voiceless</i>l.</p>
---	--

Menit 4.55 – 5.20



Menit 27.49 – 29.30




Idiologi Watchdog Terhadap Negara & Militerisme

Menit 4.55 – 5.20 dan 27.49 – 29.30

Dimenit ke – 1, 4.55 – 5.20 Podcast Podcas Bocor Alus Politik Tempo ini sendiri datang ke malang khususnya di Universitas Brawijaya tempo 2 pekan lalu membuat liputan khusus mengenai 100 hari Pemerintahan Prabowo. — Tempo membuat liputan khusus 100 hari Prabowo dan disitu tentu banyak catatan mengenai menguatnya Militerisme, bagaimana situasi Demokrasi akademik yang sekarang semakin mengundur gitu ya, saya rasa itu perlu di diskusikan sama temen – temen dikampus!. Disampaikan lagi kenapa sih kita harus mendiskusikan soal 100 hari Pemerintahan Prabowo dan apakah kita harus marah dengan kondisi sekarang — ya pertama kita melihat saja demo kemarin masyarakat UB soal pendidikan dimana mereka tidak mendapatkan haknya, kemudian kita melihat disisi lain Pemerintah kita ini Prioritasnya berbeda. Kenapa ditengah krisis anggaran pemerintah malah beli pesawat, loh mau perang sama siapa? Sama Rakyatnya sendiri!!.

Menit Ke – 2, 27.49 – 29.30 – Tantangan paling besar sebenarnya, mumpung ini Pak Prabowo backgroundnya adalah militer Jendral ya harusnya diadili ditempat sipil, jadi

		<p>reformasi Pengadilan Militer harus segera kita beresin disamping memang reformasi pengadilan umum yaa, sogok – menyogok masih ada, Pmerasan masih ada, belum ada perubahan yang signifikan dalam konteks penegakan hukum sampai 100 hari inil. Francisca melontarkan narasi lagi — ini ya cak Aman kita melihat ada gejala militarisme yang sangat kental di Pemerintahan Prabowo, bawasanya kita melihat ketika pak Prabowo membentuk kabinet itu diawali dengan retet di hamalang yang ala Akmil gitu ya?, kemudian kepala Daerah juga akan digembleng ala Akmil juga. Sebetulnya apakah cak Aman setuju dengan ini dan apa resikonya jika militerisme ini menguat di era sekarang?!. Cak Aman menjawab — kalau paradigm tata kelola Negara ini dengan simbol – simbol Militarisme pengalaman diseluruh dunia ini tidak membawa kesejahteraan. yang ada ya sedikit – sedikit tegang, sedikit – sedikit perang, sedikit – sedikit gampang tersinggung atau kalau mbak Inayah sedikit – sedikit dengkulmu eh salah ya! Ndasmu gitu.jadi memang saying gitu, Reformasi yang kita lahirkan,kita mau mendudukan, kita kepingin punya loh Polisi yang professional, kita juga pingin loh punya Tentara yang professional, kita juga pengen punya</p>
--	--	---

	<p>Menit 57.12 – 58.06</p> 	<p>Demokrasi yang juga Profesional, lah dalam 2 konteks ini kita punya ancaman yang tiba – tiba misalnya simbol- simbol yang dulunya kita jauhin kita dudukan pada tempatnya eh sekarang malah masuk semua. Mentrinya, Pemdanya, Pemrovnya saya kira cara berpikir tata kelola Negara Demokrasi berbasis Hukum berbeda dengan tata kelola institusi yang sifatnya stuktural dan perintahl.</p> <p>Ideologi Pemisahan Kritik terhadap Sistem, Bukan Person</p> <p>Menit 57.12 – 58.06 — pointnya adalah hari ini yang terjadi kita harus membeda in Demokrasi mana yang bukan mana, menghina person itu bukan bagian dari Demokrasinya itu bukan yang ingin kita cari, saya tidak sedang menghina mas Gibran saya respect pada mas Gibran yang saya kritik adalah bagaimana beliau kemudian mendapatkan jabatannya, hal – hal yang sebenarnya melanggar Demokrasi sendiri itu yang perlu kita kritik, itu yang perlu dijadikan ceng – cengan dan itu harus tetap diajikan ceng – cengan. Jadi kalo ada yang pelanggaran pelanggaran terhadap Demokrasi ini yang harus kita kejar - kejar terus, jadi bukan personnya kita gak perlu misalnya mengeledek bau badan enggak usah karena nantinya</p>
--	--	---

		<p>mendistraksi dan tujuan kita bukan itu, kita bukan menghancurkan person, bukan untuk menghina person, tetapi mempermasalah bahwa ada jalan – jalan yang salah. Jangan dipikir itu menjadi hal yang simple, dan yang membuat saya kesel itu sebenarnya yang menjadi konsern saying paling besar adalah bahwa kemudian dengan cara yang menelikung kanan dan kiri sehingga kemudian mendapatkan jabatan itu dengan mempermainkan undang – undang itu tidak kecil ekksesnya itu tidak kecil. Kita menormalisasi kecurangan – kecurangan, kita menormalisasi banyak hal yang menyimpang nantinya dimasyarakatl.</p>
--	--	--

2. Prinsip Ideologis Episode 3 Bulan Sesudah Teror

Tabel 4.2

No	Judul Episode & Data	Pinsip Ideologis
1.	<p>Komunikasi Buruk Presiden Prabowo dan Para Mentrinya</p> 	<p>Ideologis Independensi & Anti - Teror</p> <p>Menit 1.56 – 2.23 — Jadi ada yang nanya Bram bagaimana sih Tempo pasca kemarin membuat laporan tentang judi online?, itukan di berita online juga ada serangan – serangan digital terhadap Tempo.co itu gimana updatenya. Bram menjawab — Tempo memang diserang dengan serangan cyber atau disting dan gue sendiri tidak tau gimana serangannya mungkin rumit ya, dan juga teror masih berlanjut termasuk juga melanjutkan teror yang selanjutnya ya kurang lebih begitu. Tapi gak perlu kita mention juga ya soal itu.</p>
	<p>Host : Stefanus Pramono Narasumber 1 : Francisca Christy Rosana Narasumber 2 : Hussien Abry Dongoran</p> <p>Menit 1.56 – 2.23</p>  <p>Menit 2.32 –3.05</p> 	<p>Idiologi Kepentingan Publik</p> <p>Menit 2.32 –3.05 — Yang pasti Tempo masih bekerja untuk kepentingan publik. Kita tidak akan berhenti lah apapun kondisinya kita akan berupaya untuk memberikan yang terbaik, laporan terbaik, terverifikasi untuk publik. Francisca juga menambahkan — Tapi disini kita tahu ya, banyak banget orang diluar yang mendukung kita disampaikan lewat</p>

media sosial. Lalu mereka juga beli majalah dan berlangganan digital untuk mendukung kerja – kerja jurnalistik kita, dan tentunya kita juga sangat berterimakasih karena tanpa dukungan publik (pembaca) ya kita bukan apa – apa.¶

Ideologi Watchdog terhadap Kekuasaan Eksekutif

Menit 3.14 – 7.06



Menit 3.14 – 7.06 — kantor komunikasi Kepresidenan, tapi itu bagian dari yang akan kita bahas dihari ini, soal buruknya komunikasi pemerintah. Dan ini kan Presiden Prabowo juga sudah mengakui ya bahwa komunikasi pemerintahan itu tidak berjalan maksimal dan ini paling tidak 2 kali dia menyampaikan. Yang pertama waktu bertemu dengan sejumlah pemred dan setelah itu waktu ada di menara mandiri tanggal 8 April kemarin.¶ Hussen juga menambahkan. — dan sebelumnya juga ada penjelasan ke publik oleh Sudaryono. Sudaryono itu adalah wakil menteri pertanian yang menyatakan bahwa Presiden memerintahkan para mentrinya untuk memperbaiki komunikasi publiknya, itu diratas tanggal 24 Maret. Tapi Pram tadikan lu sudah menyinggung soal pertemuan pemret ya? Sudah ada 2 kali. Yang pertama banyak

		<p>sekali pemret tanpa disiarkan atau dipublikasikan, Yang ke 2 adalah ada 7 pemret yang mewawancarai Prabowo. Nah banyak yang ngejapri gue juga dimedia sosial kenapa Tempo tidak hadir?, apakah Tempo tidak diundang. Pram menjawab — yang pertama Tempo memang tidak diundang dalam acara itu dan Presiden memang berhak untuk mengundang siapapun walaupun juga kemudia wajar kalau public bertanya – Tanya kenapa yang diundang hanya bagian itu. Kami sendiri tidak mempermasalahkan hal itu kok, dan Tempomemang sudah berulang kali meminta permintaan wawancara kepada Presiden Prabowo. Bahkan dari sebelum dilantik nih, sejak bulan Februari waktu masih CAPRES statusnya itu tapi sampai sekarang belum mendapatkan persetujuan dari pihak Prabowo. No problem yang penting kita terus berjalan saja. Pram bertanya kepada Hussen kenapa Prabowo sampai mengundang pemret, Hussen menjawab — nah kemaren kan ada wawancara Prabowo ada skitar 3,5 jam, nah jadi Pram, Ca, Prabowo kan mengundang sejumlah jurnalis senior gitu ya kerumahnya untuk mewawancarai dia, nah gue Tanya keorang yang mengetahui lh soal kenapa sih hanya</p>
--	--	--

		<p>segitu saja pilet – pemet yang diundang?. Nah nanti katanya konon akan ada yang digilir, nanti ada yang second batch gitulah istilahnya gelombang kedua gitu. Ya karena selama ini atau sebulan terakhir Pemerintahan dan DPR itu sangat dikritik oleh public ya banyak hal – hal yang istilahnya barang goib gitu dalam artian nah, lu enggak tahu nih apa yang sebetulnya terjadi. Misalnya, Revisi UUD TNI kan yang lempar – lempar dan pernah kita tulis dimajalah Tempo. Yang mana bahwa ini adalah keinginan Prabowo tapi di public ngang ngeng ngong, atau dalam artian bukan Prabowo yang salah, Bukan Prabowo yang mengajukan begitu. Tapi wawancara kita dengan Bambang eko dan ketika itu dia mengakui bahwa ini barang milik Prabowo, keinginan Prabowo, dan Prabowo sendiri kemarin juga sudah membenarkan ya dalam wawancara itu. Nah, karena ada krisis komunikasi ini makanya dibuatlah sesi khusus untuk mewawancarai Prabowo, dan banyak sekali juga kan yang dibahas disana. Nah, sebelum ada wawancara dengan para pemrekitu juga ada pertemuan dengan sejumlah pemet yang lebih banyak ya dulu.!</p>
--	--	--

Menit 4.33 – 5.06



Menit 13.13 – 13.59



Ideologi Transparansi & Anti-Manipulasi Informasi

Menit 4.33 – 5.06 — Tempo memang tidak diundang dalam acara itu, dan Presiden memang berhak untuk mengundang siapapun gitu ya. walaupun kemudian wajar kalau publik bertanya – tanya kenapa yang diundang hanya sebagian gitu. Tapu kami tidak apa – apa, kami tidak mempermasalahkannya itu. Dan Tempo sudah berulang kali mengajukan Permintaan wawancara kepada Presiden Prabowo bahkan sebelum dilantik dari bulan february waktu masih CAPRES statusnya, tapi sampai sekarang tidak mendapatkan persetujuan dari pihak Prabowo.¶

Ideologi Pembelaan Kebebasan Pers

Menit 13.13 – 13.59 — Sebenarnya Prabowo juga kalau kita lihat disitu dalam wawancara itu juga tidak mengkritik ya orang yang kemudian melemparkan Teror atau tidak menunjukkan ketidak tegasan atas teror yang menimpa Tempo dan ini sebenarnya bukan hanya Tempo saja ya, bukan soal Temponya tapi soal Persnya Kebebasan persnya ada ancaman yang luar biasa mau itu Tempo, mau itu media lain gitu harusnya seorang Presiden bisa

Menit 26.36 – 27.22



memberikan kritiknya ketika kemudian ada orang – orang mengganggu atau mengancam kebebasan pers. Francisca juga menambahkan – gue sih berharap alis – alih Prabowo menyampaikan kalau teror ini sebagai adu domba gitu ya. Gue berharap Prabowo mengecam bentuk – bentuk teror terhadap pers, kalau memang Prabowo memang tidak anti kritik terhadap pers.

Idiologi Anti – Otoritarianisme & Politik Komando

Menit 26.36 – 27.22 bagaimana sikap tempo dengan pola komunikasinya Prabowo dan anak buahnya – pertama tentu saja kita melihat kekacauan komunikasi ini sebenarnya merupakan wajah dari manajemen atau pemerintah Prabowo itu sendiri. Ketika komunikasinya kacau, ya kita bisa melihat dan menyimpulkan sendiri kekacauan Pemerintahnya juga terjadi gitu loh. Ini merupakan dampak dari politik komando Prabowo, walaupun dia sudah membantah menjalankan politik komando, tapi ini lah yang kemudian diterjemahkan oleh anak buahnya mereka tidak berani ngomong, mereka selalu menunggu sikap Presiden sebelum menyampaikan kepada public

		<p>gitukan, sehingga kemudian komunikasi menjadi tersendat. dan Prabowo mungkin mencoba untuk memperbaiki komunikasinya ya, tapi perubahan apapun itu tidak akan terjadi ya kalau Prabowo tidak membuka dirinya, tidak memberikan akses kepada anak buahnya untuk bertemu dengannya. Dia tidak mau menerima masukan dari luar dan hanya akan ada blander – blander baru dari Pemerintah.¶</p>
<p>2.</p>	<p>Intimidasi Penentangan Revisi UU TNI</p> 	<p>Ideologi Pro-Demokrasi & Anti-Militerisme (Anti Dwi Fungsi ABRI)</p> <p>Menit 5.16 – 5.25 — Keberanian itu muncul karena saya sebagai generasi muda tidak ingin bangkit kembali mengenai Dwifungsi ABRI yang mana itu terjadi pembahasan dari substansi RU TNI yang waktu itu dibahas. Nah, jadi ada tanggung jawab moral baik diri sendiri maupun secara kelembagaan. Terlebih lagi pendiri kontras Munir Said Thalib itu memiliki concerns secara khusus untuk melakukan reformasi sector keamanan dalam konteks ini dalam instusi militer atau TNI agar militer tidak masuk keranah sipil.¶</p>
	<p>Host : Rymundus Rikang</p> <p>Narasumber 1 : Andrie Yunus</p> <p>Narasumber 2 : Hussien Abry Dongoran</p> <p>Menit 5.16 – 5.25</p> 	

Menit 8.05 – 8.29



Menit 17.00 – 18.15



Ideologi Anti – Otoritarianisme

Menit 8.05 – 8.29 — Jadi sebetulnya kami mempertanyakan yak e para anggota Komisi 1 di DPR, kok bisa kewenangan yang semestinya dia laksanakan dalam pengawasan Undang – undang dalam konteks ini operasi militer selain perang mau – maunya diserahkan kepada satu kekuasaan, yakni kekuasaan Presiden dan itu bisa berpotensi kekuasaan yang absolut gitu kan. Absolut dan bisa terjadi bias. Hussen mengatakn dengan narasi — Pantes nih Kontras didatengin mobil gitu. Ternyata keras banget mengkritik undang – undang TNI yang baru begitu. H

Idiologi keberpihakan pada kelompok Rentan dan Masyarakat Sipil

Menit 17.00 – 18.15 — apa yang terjadi atau yang dialami oleh temen – temen dari kontras ini ya juga dialami oleh aktivis – aktivis yang vocal dan lantang menolak revisi UUD TNI. Dalam laporan majalah Tempo yang tentu saja bisa dibaca di link deskripsi itu kita juga menulis bahwa teror serupa dialami oleh Julius Ibrani dari Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia. Kepada Tempo Julius bercerita bahwa dia

	<p>mendapatkan panggilan dari nomor yang lagi – lagi sama nomor tidak dikenal. Dan mulanya Julius mengabaikan panggilan atau kiriman pesan ini. Tapi kemudia karena panggilan itu berturut – turut masuk lalu daladeni oleh Julius. Setelah itu pengirim pesan mengajak untuk bertemu disebuah cafe di pajaten Jakarta selatan. Dalam pertemuan itu dimana pengirim pesan mengaku sebagai seorang tentara pewira ya, mengatakan atau mempertanyakan alasan Julius memprotes atau menentang revisi undang – undang TNI. Jadi sama seperti yang dialami oleh teman – teman kontras. Jadi teror atau intimidasi yang terjadi selama kurun waktu pembahasan atau pengesahan revisi itu sama – sama mempertanyakan nih kenapa aktivis – aktivis Pro – Demokrasi mempersoalkan revisi UUD TNI yang sedang bergulir di DPR pada waktu. Hussen juga bercerita bahwasanya — ada cerita juga dari Husein Ahmad wakil ketua Imparsia. Dia sekitar Kamis tanggal 20 Maret abis berbuka puasa, abis mengikuti podcast disalah satu lembaga survey. Nah, dia pulang bersama teman – temanya, tiba – tiba mobilnya itu di ikutin oleh pengendara lain dan diberhentikan. Ciri – ciri orangnya</p>
--	--

berbadan tegap nah sempat ditanya tuh, — Anda orang berinisial R enggak?||, gak jelas siapa R itu tapi mobilnya sempat difoto. Setelah itu Husaind Ahmad sering diteror nomornya kaya Andri ini, dan polanya mirip – mirip. Setelah itu ada pola yang sama seperti Andri, Husaind Ahmad dan Jevier tadikan datang juga ikut menggrebek hotel di Senaya itu saat pembahasan.||



Idiologi Hak Asasi Manusia & Kebebasan Sipil

Menit 32.12 – 32.44 sikap tempo terhadap teror kepada orang – orang kritis — bahwa teror yang dialami oleh masyarakat sipil, aktivis maupun jurnalis dalam rentang pembahasan revisi Undang – Undang TNI ini menunjukkan dan semakin menegaskan bahwa kebebasan sipil, kebebasan berpendapat di Indinoseia yang katanya adalah Negara Demokrasi itu semakin menyempit. Kritik pendapat itu adalah nyawa dari Demokrasi dan setiap orang menyatakan setuju atau tidak terhadap suatu kebijakan pemerintah misalnya dalam hal ini revisi UUD TNI itu merupakan kebebasan seseorang, kebebasan warga sipil untuk bersikap dan menyatakan apakah dia setuju atau tidak setuju.

Menit 32.12 – 32.44



		<p>Dengan adanya teror atau intimidasi terhadap orang – orang yang dianggap bersebrangan dengan sikap pemerintah atau sikap lembaga – lembaga tertentu menunjukkan bahwa orang atau warga sipil seolah – olah tidak boleh lagi berbeda pendapat dalam negara Demokrasi ini, jadi bagi personil anggota, siapapun yang kemudian teridentifikasi oleh bukti – bukti yang sudah dikompilasi oleh masyarakat sipil yang mereka turun kelapangan datang ke kantor Kontra itu mesti diusut dan diberi sanksi. Karena jika tidak, maka praktik kekerasan, praktik intimidasi, praktik represi serupa akan terulang. Dan yang kedua tentu adalah dalam hal militer tidak boleh dipakai sebagai alat untuk membungkam suara – suara kritis yang menolak kebijakan pemerintah dalam ini revisi UUD TNI. Tapi kita juga agak sulit mengharapkan Presiden Prabowo bersikap atau kemudian meminta intimidasi represi ini dihentikan. Karena dalam wawancara dengan paea pemimpin redaksi Sri Prabowo mengaku bahwa revisi UUD TNI itu adalah keinginannya. Jadi kita tidak mungkin berharap lagi kepada Presiden, Tapi kita Juga mendesak bahwa kekerasan intimidasi, represi terhadap masyarakat sipil yang kritis</p>
--	--	--

<p>3.</p>	<p>Gejala Represif Pemerintah Prabowo</p>  <p>Host : Raymundus Rikang Narasumber 1 : Bivitri Susanti Narasumber 2 : Hussien Abry Dongoran</p> <p>Menit 1.55 – 5.43</p> 	<p>tidak boleh terjadi lagi.</p> <p>Ideologi Anti – Militarisme & Penolakan Dwi Fungsi TNI</p> <p>Menit 1.55 – 5.43 ini persoalan militrerisme dimana 1 persoalan mengenai pengangkatan beberapa jendral – jendral yang ada di kementerian dan lembaga, dan juga bagaimana represi yang masih terjadi juga ke teman – teman aktivis dan juga mahasiswa setelah revisi UUD TNI. — kalau saya sih melihatnya benar – benar memakai kaca mata helicopter view ya, ini gejala menurut saya ini gejala fasisme. Mungkin agak ekstrim ya tapi kan fasisme itu digambarkan seperti itu. Ketika benar – benar ada sistem yang membuat tidak ada seseorang pun yang bisa berbicara bebas disebuah negara dan ada penundukan yang berlebihan, dimana warga sipil dibuat tunduk sekali gitu. Nah, sebenarnya kan ini sisa Orde Baru bangkan sisa masa lalu ya, bah wa semisal kita coba cek aja kalau bukan korea utara, mana sih sekolahan yang tiap senin murid – muridnya harus hormat bendera upacara kan dikita nih begitu. Jadi mungkin ini residu yang masih tersedia sampai sekarang. Tapi setelah Presiden Prabowo menjadi</p>
-----------	---	---

		<p>presiden lebih kelihatan gitu, lebih diperlihatkan secara telanjanglah gitu. Bahkan sebenarnya sejak dia jadi Menteri Pertahanan ya, mulai dari adanya komponen cadangan itukan sebenarnya 2019 loh ini undang – undang tentang Pengembangan Sumber Daya Nasional Bidang Pertahanan (PSDN), 2019 sudah mulai nah kemudian setelah itu ada UU TNI. Tapi kalau diperhatikan yang terjadi sekarang lebih menggila gitu ya. Ada penunjukan Dirjen, bahkan say abaca di Tempo tuh ada 4.000 an yang sudah ditempatkan di kementerian dan lembaga. Belum lagi calon BUMN juga kan, belum lagi yang MBG itu juga ada rekrutmen dan merka juga mendapatkan pelatihan di barak militer. Menurut saya masalahnya ada 3 hal nih, yang pertama adalah kompetensi. Ada asumsi yang keliru bahwa kalau Tentara maka dia akan serba bisa mulai dari menanam singkong dan padi sampai ke memimpin BUMN, sekedar Karena dia bisa baris berbaris dan push up gitu kan misalnya. Kemudian yang ke 2 potensi pelanggaran Undang – Undangnya besar sekali karena penunjukan –penunjukan Dirjen dan lain sebagainya kan harusnya ada undang – undang ASN nya yang</p>
--	--	--

Menit 9.27 – 14.16



membuat Presiden dengan segala jajarannya harusnya memenuhi prosedur tertentu, dan yang saya dengan Prabowo juga menginginkan dan akhirnya ini menjadi pelanggaran undang – undang. Dan bahaya yang ke tiga, jangan lupa kalau tentara aktif masuk dalam pemerintahan, kalau dia melakukan tindak pidana apapun ya, korupsi kek, penipuan kek, kan dia masuknya pengadilan militer bukan pengadilan umum seperti yang seharusnya kita alami kalau kita melanggar gitu. Jadi, ada ketidak setaraan dalam penegakan hukum pidana itu yang pidananya harusnya normal begitu ya. Tapi karena hanya bisa dilakukan di pengadilan militer, maka bisa jadi ada keistimewaan, enggak setara dengan pejabat lainnya.

Idiologi Kritis Terhadap Otoritarian & Fasisme

Menit 9.27 – 14.16 — fenomena seperti itu (fasisme) seringkali baru disadari karena baru dianalisis belakangan kan, sama aja kalau orang menganalisis —oh Indonesia Demokrasinya sudah regresil kata orang – orang Australia National di beberapa tahun yang lalu. Tapi kan waktu itu orang gak sadar baru


belakangan ini mereka sadar oh iya ya itu satu ya. Kemudian yang kedua ketika membaca situasi yang pakai label besar seperti itu pasti kita membaca gejala, nah, gejalanya itu sebenarnya sudah kelihatan. Tanpa kita sadari dengan lebih banyaknya militer di jabatan – jabatan sipil aktif ya, militer aktif! Kalau gak aktif ya oke lah kita bisa perdebatkan lagi ya. Tapi kalau aktif itu kan yang jadi masalah.¶

Idiologi Keberpihakan Pada Masyarakat Sipil

Menit 20.09 – 23.15 — tapi diluar kita kan juga lagi menelusuri represi kepada aktivis yang kritis terutama setelah revisi UUD TNI. Husen menceritakan bawasanya — kemaringue di Polda ketemu Bang Utsman Hamid Trisakti kebetulan dia yang menjadi jembatan lah ya untuk membebaskan belasan mahasiswa trisakti itu. Dan disitu gue Tanya ini kenapa sih mereka ditangkap polisi?. Yang pertama memang terjadi ya di Balai Kota ada mahasiswa masuk kemudian ditutup dari situ emang ada keributandan polisi memegang banyak buku disitu, tapi masalahnya adalah yang diteriakkan oleh para teman –teman mahasiswa Trisakti ini ada isu – isu

Menit 20.09 – 23.15



	<p>Menit 23.46 – 25.59</p> 	<p>Reformasi termasuk menolak soeharto menjadi pahlawan gitu. Nah, mereka juga bertanya – Tanya kok yang isu reformasi dan menolak pahlawan sedemikian rupa dilakukan oleh aparat begitu. dan gue juga sempet wawancara dengan teman – teman Kontras, mereka juga lagi – lagi mendapatkan intimidasi dari TNI. dengan bentuk kantornya didatangi oleh dua maung. Dan kontras itu merupakan salah satu yang menggugat Undang – undang TNI.¶</p> <p>Idologi Perlawanan Terhadap Demokrasi Semu</p> <p>Menit 23.46 – 25.59 – kayaknya saya pernah baca deh salah satu opininya yang soal Kompetitif Otoritarianisme. Nah, menurut saya ini udah kesitu, yang artinya sebenarnya sudah otoritarian tapi masih pura – pura Demokrasi. Makanya dia kompetitif dalam artian kompetitif orang – orang yang elitnya itu sebenarnya berkompetisi gitulah intinya. Jadi yang dialami sekarang menurut saya bukan udah regresi dulu 3 tahun yang lalu Tom Powers dan kawan – kawan ngomongin itu, sekarang sudah menjadi otoritarian bahkan cenderung menunjukkan gejala –</p>
--	---	---

	<p>gejala Fasisme. Jadi yang terjadi masyarakat sipil ya satu hal, tapi kemudian juga ke soal berpendapat bahkan oleh orang – orang yang menggunakan media massa. Seperti yang detik, itu juga sebagian ada yang penakut banget sih cuman digituin, tapi kan dalam sebuah Negara Demokrasi bahkan enggak ada yang di teror, ditendang motornya segala macam, karena itu pikiran dan dia punya kompetensi untuk itu. Jadi dia bukan orang yang nyeletuk di media sosial tapi ini pikiran yang terstruktur dalam opini. Saya kira ini kita memang perlu lebih melihatnya lebih jernih bahwa ini memang ada betul – betul sudah dibusukkan gitu Demokrasinya, lagi – lagi kita atau banyak orang yang enggak merasa ya karna gak langsung kelihatan. Tapi sebenarnya dengan hilangnya kontrol dari warga dengan cara – cara seperti itu sebenarnya tidak Demokratis lagi. Karena dilain sisi yang lembaga formal seperti DPR kan juga enggak ada kontrol.]]</p>
--	--

3. Independensi Program Investigatif Bocor Alus Media Tempo dalam Mengimplementasikan Prinsip Ideologis Jurnalisme Sesudah teror Kepala Babi & Bangkai Tikus

Pada bagian ini Peneliti menganalisis data rumusan masalah pertama yaitu bagaimana Independensi program investigatif Podcast Bocor Alus Politik Media Tempo dalam Mengimplementasikan Prinsip Ideologis Jurnalis Sesudah teror kepala babi dan bangkai tikus dengan cara menganalisis data yang dilakukan secara bertahap dan berkesinambungan sejak proses pengumpulan data hingga penyusunan temuan penelitian dengan menggunakan 4 komponen yaitu, pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan dan verifikasi. Dalam konteks penelitian ini, Peneliti menganalisis prinsip ideologis yang dilakukan terhadap enam episode Podcast Bocor Alus Politik Tempo, yang meliputi tiga episode sebelum terjadinya teror dan tiga episode sesudah peristiwa teror kepala babi dan bangkai tikus.

Data ini memaparkan hasil penelitian mengenai bagaimana peneliti memandang bahwa peristiwa teror yang dialami Tempo tidak dapat dimaknai semata sebagai gangguan keamanan, melainkan sebagai momentum pengujian terhadap keteguhan ideologis redaksi. Oleh karena itu, peneliti menganalisis apakah setelah teror terjadi perubahan orientasi, pelunakan sikap kritis, atau justru penguatan komitmen jurnalistik.

Analisis dilakukan dengan membandingkan pola pemberitaan sebelum dan sesudah teror, serta mengaitkannya dengan indikator independensi menurut McQuail yang meliputi akurasi, otonomi redaksi, tanggung jawab kepada publik, dan keberanian mengawasi kekuasaan.

a. Keberlanjutan Fungsi Watchdog terhadap Kekuasaan

Indikator pertama dari prinsip ideologis jurnalisme adalah fungsi media sebagai pengawas kekuasaan. Peneliti menempatkan aspek ini sebagai pintu masuk utama, sebab intimidasi umumnya bertujuan melemahkan kritik terhadap aktor politik dan negara.

Pada periode sebelum teror, episode Bocor Alus Politik berjudul “*Misteri Dalang Pembuatan Pagar Bambu*” menampilkan investigasi yang secara terbuka mempertanyakan aktor di balik proyek pagar laut. Tempo tidak hanya menyajikan informasi permukaan, tetapi juga menelusuri kepentingan ekonomi – politik yang bermain. Menurut peneliti, sikap tersebut mencerminkan keberanian redaksi untuk menempatkan diri berhadapan langsung dengan pusat kekuasaan.

Yang menjadi temuan penting peneliti adalah bahwa pola tersebut tidak berubah sesudah teror. Dalam episode “*Komunikasi Buruk Presiden Prabowo dan Para Mentrinya*”, Tempo tetap mengkritik pemerintah secara eksplisit, termasuk membuka kembali isu Revisi UU TNI dan potensi kembalinya dominasi militer. Peneliti tidak menemukan tanda penghalusan diksi, pengurangan intensitas kritik, maupun pengalihan topik ke isu yang lebih aman.

McQuail menegaskan bahwa independensi pers tercermin ketika media tetap menjalankan fungsi kontrol meski berada di bawah tekanan. Berdasarkan temuan tersebut, peneliti menyimpulkan bahwa teror tidak berhasil menggeser posisi ideologis Podcast Bocor Alus Politik Media sebagai media pengawas kekuasaan. Justru, keberlanjutan kritik menunjukkan adanya keteguhan moral redaksi.

Dengan demikian, aspek keberlanjutan fungsi *watchdog* ini merepresentasikan indikator independensi dari tekanan eksternal sekaligus integritas ideologis dalam kerangka berpikir penelitian ini. Konsistensi kritik terhadap kekuasaan menunjukkan bahwa intimidasi tidak menggeser posisi redaksional maupun nilai profesional yang dianut. Peneliti menemukan bahwa fungsi *watchdog* Podcast Bocor Alus Politik Media tetap berjalan sesudah teror memiliki sejumlah implikasi strategis. Menurut peneliti, keberlanjutan peran pengawasan ini tidak hanya berkaitan dengan keberanian redaksi, tetapi juga menyangkut kualitas ruang publik dan kesehatan demokrasi. Oleh karena itu, peneliti merumuskan implikasi pada tiga level: bagi publik, bagi praktik jurnalistik, dan bagi relasi media - kekuasaan.

b. Konsistensi Jurnalisme Berbasis Fakta dan Verifikasi

Prinsip ideologis berikutnya adalah orientasi pada fakta yang diverifikasi. Peneliti berasumsi bahwa jika teror memengaruhi independensi, maka metode kerja jurnalistik akan bergeser menjadi lebih aman, elitis, dan minim liputan lapangan.

Sebelum teror, jurnalis Tempo turun langsung ke Teluk Jakarta, mewawancarai nelayan Kronjo, serta merekonstruksi kronologi pemasangan pagar laut. Praktik ini menunjukkan bahwa produksi informasi tidak bergantung pada narasumber resmi semata.

Sesudah teror, metode serupa tetap dipertahankan. Dalam liputan mengenai gejala represif pemerintah, Tempo menghadirkan suara aktivis Kontras, akademisi, dan kelompok masyarakat sipil. Menurut peneliti, keberlanjutan pola ini menandakan bahwa standar verifikasi

tidak dikompromikan oleh rasa takut. Redaksi tetap memilih jalan yang paling berisiko tetapi paling sesuai dengan etika jurnalistik.

Dalam kerangka McQuail, akurasi dan verifikasi adalah fondasi independensi. Peneliti menilai bahwa konsistensi metode liputan lapangan membuktikan bahwa ideologi profesional Tempo tetap berjalan sebagaimana sebelum teror. Temuan peneliti menunjukkan bahwa Sesudah teror, program Bocor Alus Politik tetap mempertahankan mekanisme verifikasi dan liputan berbasis fakta lapangan.

Menurut peneliti, konsistensi ini memiliki implikasi penting karena verifikasi merupakan benteng utama independensi. Apabila proses pencarian fakta melemah, maka independensi ideologis akan berubah menjadi sekadar klaim normatif tanpa dasar empiris. Aspek ini menunjukkan terpenuhinya indikator otonomi redaksional serta integritas ideologis. Keputusan untuk tetap menggunakan metode verifikasi lapangan dan sumber alternatif membuktikan bahwa redaksi tidak mengalami intervensi eksternal dalam menentukan standar kerja jurnalistiknya.

c. Keberpihakan pada Kepentingan Publik

Independensi ideologis juga diukur dari kepada siapa media berpihak. Peneliti meneliti apakah sesudah teror terjadi pergeseran dari kepentingan publik menuju kepentingan penguasa atau korporasi.

Sejak awal, Podcast Bocor Alus Politik Media Tempo menempatkan warga sebagai subjek utama. Dalam liputan pagar laut, nelayan digambarkan sebagai korban kebijakan. Sesudah teror,

orientasi ini justru dipertegas melalui pernyataan host bahwa Tempo —tetap bekerja untuk kepentingan publik dan tidak akan berhenti.

Peneliti menafsirkan pernyataan tersebut sebagai bentuk reafirmasi ideologis. Alih - alih mundur, redaksi menggunakan ruang siaran untuk menegaskan kontrak sosialnya dengan masyarakat. McQuail menyebut media independen tidak netral terhadap kepentingan publik. Berdasarkan analisis peneliti, Bocor Alus Politik tetap memosisikan diri sebagai representasi suara warga.

Salah satu temuan utama peneliti adalah bahwa sesudah teror, program Bocor Alus Politik tetap menempatkan publik sebagai orientasi utama pemberitaan. Temuan ini secara langsung merepresentasikan indikator akuntabilitas publik, di mana media tetap memosisikan masyarakat sebagai orientasi utama pemberitaan meskipun berada dalam situasi intimidatif. Menurut peneliti, keberpihakan ini merupakan inti dari prinsip ideologis jurnalisme yang membedakan media independen dari media yang berorientasi kekuasaan. Oleh karena itu, implikasi keberpihakan publik menjadi elemen penting dalam menjawab rumusan masalah pertama mengenai independensi ideologis sesudah teror.

d. Sikap Anti – Otoritarian yang Tetap Tegas

Teror umumnya bertujuan menumbuhkan ketakutan agar media melunak terhadap negara. Oleh karena itu, peneliti menguji intensitas kritik sebelum dan sesudah peristiwa.

Sebelum teror, Tempo menggunakan diksi keras terhadap kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Sesudah teror,

nada kritik tidak menurun, bahkan menguat dalam episode yang membahas —gejala fasismel dan represi negara. Peneliti melihat adanya eskalasi keberanian, bukan sebaliknya.

Menurut McQuail, independensi berarti kemampuan menolak dominasi politik. Data menunjukkan bahwa intimidasi gagal menundukkan sikap kritis redaksi. Temuan peneliti menunjukkan bahwa Sesudah teror, program Bocor Alus Politik tetap mempertahankan bahkan memperkuat sikap anti - otoritarian dalam narasi pemberitaannya.

Aspek ini memperkuat indikator independensi dari tekanan eksternal dan integritas ideologis, karena sikap kritis terhadap negara tetap dipertahankan bahkan dalam kondisi teror. Menurut peneliti, sikap ini merupakan indikator paling nyata dari independensi ideologis, sebab teror pada dasarnya dirancang untuk menundukkan media agar lebih patuh terhadap kehendak kekuasaan. Oleh karena itu, keberlanjutan sikap anti - otoritarian memiliki sejumlah implikasi penting dalam menjawab rumusan masalah pertama.

e. Respon Redaksi terhadap Teror sebagai Sikap Ideologis

Menurut Peneliti Bagian ini penting karena membangunkan kesadaran bagaimana jurnalis memaknai teror terhadap dirinya.. Host mengakui adanya serangan siber namun menegaskan bahwa pekerjaan jurnalistik harus tetap berjalan. Peneliti memandang sikap ini sebagai praktik etika tanggung jawab sosial – bahwa kepentingan publik ditempatkan di atas rasa takut personal.

Respon redaksi terhadap intimidasi memperlihatkan terpenuhinya tiga indikator sekaligus, yaitu independensi dari tekanan eksternal, otonomi redaksional, dan akuntabilitas publik. Sikap tersebut menunjukkan bahwa independensi tidak hanya tercermin dalam konten, tetapi juga dalam posisi moral institusi. Dalam perspektif teori, pernyataan tersebut merupakan wujud otonomi moral media. Independensi tidak hanya tampak di konten, tetapi juga pada keberanian bersikap. Selain tercermin dari substansi pemberitaan, independensi ideologis Bocor Alus Politik Media Tempo sesudah teror juga tampak dari bagaimana redaksi merespons intimidasi yang mereka alami.

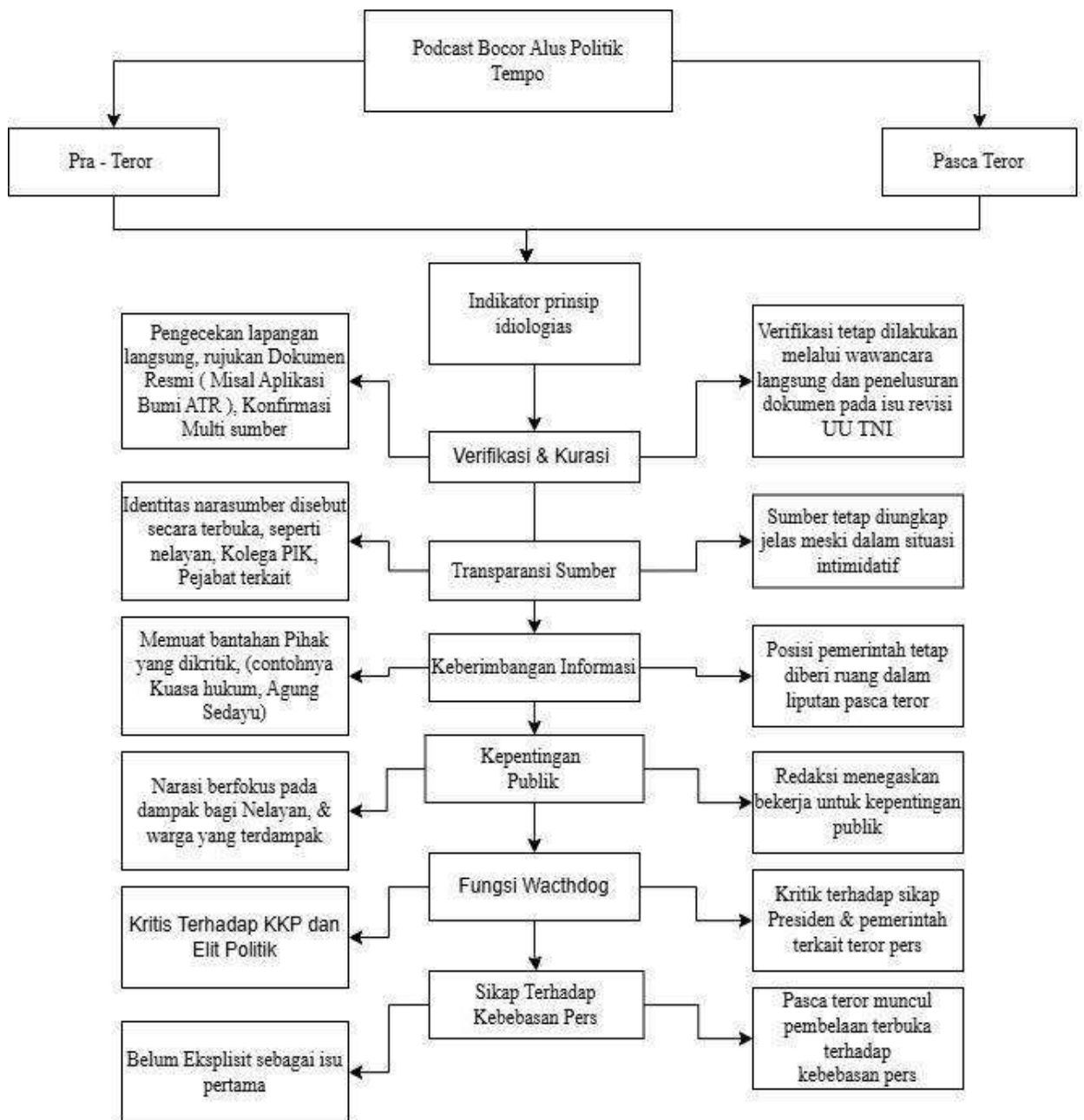
Peneliti memandang bahwa cara media memaknai dan menyikapi teror merupakan bentuk pernyataan ideologis yang sama pentingnya dengan produk jurnalistik itu sendiri. Respon redaksi bukan sekadar sikap organisasi, melainkan representasi komitmen terhadap prinsip jurnalisme.

1) Tabel Perbandingan Prinsip Ideologis Sebelum teror dan Sesudah teror

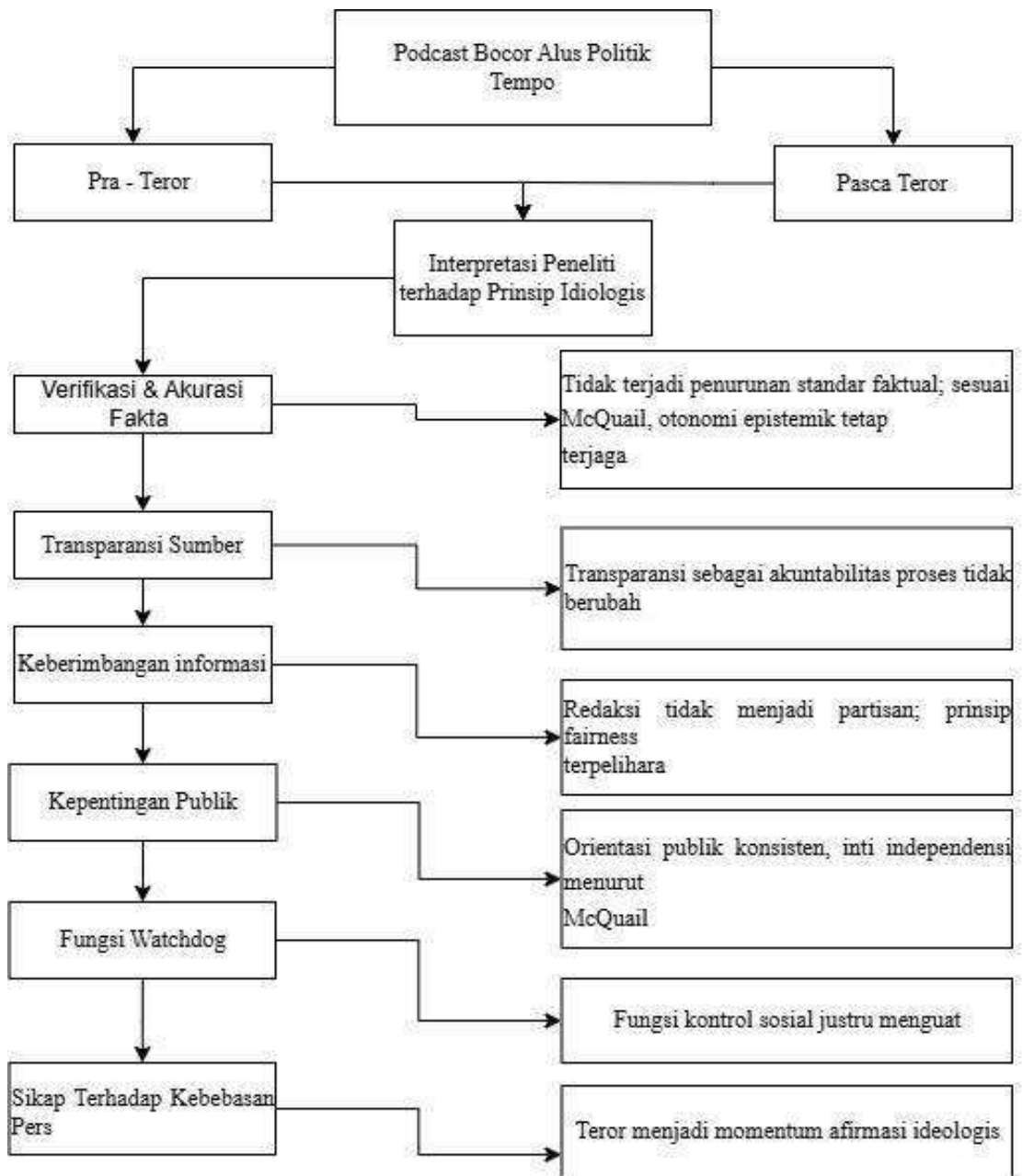
Untuk melihat secara lebih sistematis apakah terjadi perubahan independensi ideologis redaksi setelah peristiwa teror kepala babi dan bangkai tikus, peneliti melakukan perbandingan terhadap praktik pemberitaan Podcast Bocor Alus Politik Tempo pada periode sebelum teror dan sesudah teror. Perbandingan ini disusun berdasarkan indikator prinsip ideologis jurnalisme yang meliputi verifikasi, transparansi sumber, keberimbangan, orientasi kepentingan publik, fungsi watchdog, serta sikap

terhadap kebebasan pers. Analisis berikut dimaksudkan untuk menilai sejauh mana redaksi tetap mempertahankan otonomi editorial sebagaimana dipahami dalam kerangka independensi media menurut McQuail. Hasil perbandingan tersebut disajikan dalam tabel berikut.

Bagan 4.3



Bagan 4.4



Berdasarkan keseluruhan temuan peneliti terhadap konten tiga bulan pra teror dan tiga bulan Sesudah teror, dapat ditarik benang merah bahwa independensi ideologis Bocor Alus Politik Tempo tidak mengalami pelemahan substantif. Peneliti menemukan bahwa pola pemberitaan, pilihan isu, serta sikap redaksi tetap konsisten pada prinsip jurnalisme investigatif, meskipun berada dalam situasi intimidasi. Analisis ini disusun dengan mengaitkan data temuan dengan konsep independensi McQuail serta prinsip ideologis jurnalisme yang menjadi kerangka penelitian.

Peneliti menyimpulkan bahwa implementasi prinsip ideologis jurnalisme pada program Podcast Bocor Alus Politik Media Tempo tetap terjaga sesudah teror, yang tercermin melalui lima indikator utama: fungsi *watchdog*, jurnalisme berbasis fakta dan verifikasi, keberpihakan pada kepentingan publik, sikap anti - otoritarian, serta respon redaksi terhadap teror. Pada seluruh episode sesudah teror, peneliti masih menemukan pola kritik yang tajam terhadap kebijakan negara, terutama terkait revisi UU TNI, gejala militerisme, dan praktik komunikasi politik pemerintah. Hal ini menunjukkan bahwa fungsi pengawasan terhadap kekuasaan tidak mengalami penyimpangan akibat tekanan eksternal.

Dalam perspektif McQuail, independensi media menuntut berita yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan tanpa intervensi kekuasaan. Temuan peneliti menguatkan konsep tersebut, karena sesudah teror redaksi tetap mengedepankan verifikasi lapangan, menghadirkan narasumber beragam, serta memisahkan fakta dari opini. Tidak ditemukan indikasi bahwa teror mendorong perubahan standar verifikasi atau pelunakan diksi

kritis. Menurut peneliti, hal ini menandakan bahwa kualitas jurnalistik justru dipertahankan sebagai mekanisme perlindungan profesional.

Keberpihakan kepada kepentingan publik juga tetap menjadi poros utama pemberitaan. Peneliti melihat bahwa isu-isu yang diangkat setelah teror berorientasi pada perlindungan masyarakat sipil, kebebasan berpendapat, dan transparansi kebijakan. Redaksi tidak mengalihkan perhatian pada agenda yang lebih aman secara politik, melainkan tetap menempatkan warga sebagai subjek utama. Implikasinya, independensi Podcast Bocor Alus Politik Media Tempo bersifat independen karena berpijak pada kebutuhan publik, bukan pada kepentingan elite.

Lebih jauh, sikap anti – otoritarian menjadi bukti paling eksplisit dari ketahanan ideologis. Narasi yang mengkritik politik komando, potensi kembalinya dwifungsi militer, serta praktik represif negara justru menguat pada periode Sesudah teror. Peneliti menilai bahwa teror gagal menciptakan efek pembungkaman. Sebaliknya, ia mempertegas posisi Bocor Alus Politik sebagai ruang perlawanan simbolik terhadap otoritarianisme.


Respon redaksi terhadap teror juga mengandung makna ideologis yang penting. Pernyataan bahwa Tempo —tetap bekerja untuk kepentingan publikl serta penolakan untuk menjadikan teror sebagai pusat narasi menunjukkan etika jurnalisme yang matang. Menurut peneliti, independensi tidak hanya tampak pada teks pemberitaan, tetapi juga pada sikap kelembagaan yang menolak tunduk pada intimidasi.

1. Data Prinsip Dasar Pemberitaan 3 Bulan Sebelum Teror

Pada bagian ini peneliti mengumpulkan Data Prinsip Dasar Pemberitaan 3 episode sebelum teror dan 3 episode sesudah teror. Berdasarkan fokus penelitian yang telah dirumuskan, peneliti mengarahkan teknik pengumpulan data pada dua persoalan utama, yaitu independensi program investigatif Bocor Alus Politik Media Tempo dalam mengimplementasikan prinsip ideologis jurnalisme, serta independensinya dalam mempertahankan prinsip dasar pemberitaan sesudah teror kepala babi dan bangkai tikus. Dengan menggunakan metode pengumpulan data observasi isi untuk mengamati, menganalisis, dan menarik kesimpulan dari isi komunikasi Melalui observasi ini, peneliti mengumpulkan data mentah berupa narasi, kutipan, alur cerita, dan pilihan isu yang disampaikan host. Peneliti juga menggunakan studi dokumentasi dengan mengumpulkan berbagai dokumen tertulis atau rekaman digital yang berkaitan dengan topik penelitian.

Peneliti melakukan pengamatan langsung terhadap beberapa Episode Podcast Bocor Alus Media Tempo yang dirilis pada rentang waktu Maret hingga Agustus 2025, Yaitu pasca terjadinya insiden pengiriman kepala babi dan bangkai tikus.

Tabel 4.3

No	Judul Episode & Data	Pinsip Dasar Pemberitaan
1.	<p>Misteri Dalang Pembuat Pagar Bambu di Teluk Jakarta</p> 	<p>Akurasi & Verivikasi Fakta (Lapangan)</p> <p>Menit 3.19- 3.58</p> <p>— Egi sih sudah kelapangan, dia juga ngecek pagar laut nya disana menggunakan kapa l Nelayan.¶</p>
	<p>Host : Raymundus Rikang</p> <p>Narasumber 1: Erwan Hermawan</p> <p>Narasumber 2 : Francisca Christy Rosanalina</p> <p>Menit 3.19- 3.58</p>  <p>Menit 3.43 – 4.00</p> 	<p>Menit 3.43 – 4.00 — Menurut Warga jadi sekitar di akhir Oktober 2024 terutama didesa Kronjo itu dikejutkan oleh banyak mobil truk yang masuk ke Desa dengan membawa bambu, dan lucunya truk tersebut melewati pos Satpol Lairut (Kesatuan Polisi yang menjaga perairan).¶</p> <p>Prinsip Transparansi Sumber</p> <p>Menit 5.34 – 6.06 — Tempo sudah menulis juga mengenai proyek ini ketika masih panjang 7 – 10 KM, Artinya kan ini proyek bukan semalam tapi kemudian setelah viral lagi – lagi kebijakan setalh viral ditutup oleh Kementrian Kelautan dan Perikanan.¶ Francisca juga menambahkan — saya dan Erwan sudah ngecek ke beberapa instansi dan juga beberapa Narasumber yang juga koleganya PIK Memang sebetulnya proyek ini sudah mencuak sejak pertengahan 2024, dan</p>

Menit 5.34 – 6.06



Menit 7.41 – 8.12



sejumlah jurnalis tempo bernama busman sudah mengecek ke lokasi sejak oktober 2024, dan om busman sudah memberikan semacam rekomendasi untuk ditinjau ulang karena om busman mendapat informasi dari nelayan kalau mereka mendapatkan gangguan ketika melaut, jadi ketika nelayan ingin menjangkau lautan untuk mrnjaring ikan itu merka membutuhkan waktu 1 jam hingga 2 jam karena harus memutarl.

Menit 7.41 – 8.12 Kenapa masalah ini tidak ramai Francisca menjelaskan bahwa — Kemudian kenapa ini tidak ramai karena waktu Oktober itu sedang ada peristiwa Politik bertransisi Pemerintahan dan wilayah pengembangan PIK itukan bersinggungan dengan PSN dengan Proyek Strategis Nasional, nah di PIK 2 dan yang kita kenal sebagai Tropical Kosland. Karena ada peristiwa Politik itulah baru di akhir Desember itu ramai kembali, kaenapa, karena warga banyak yang videokan, kemudian Om Busman juga kesana lagi dan dari rekomendasi Om Busman untuk meninjau ulang itulah kemudian KKP baru bergerak, sebetulnya sudah sejak lama.¶

Menit 10.05 – 11.41



Menit 12.52 – 13.420



Prinsip Akurasi dan Berbasis Dokumen Resmi

Menit 10.05 – 11.41 — Nah kalau kita lihat di penelusuran Bumi ATR itu ya, di aplikasi Bumi ATR ternyata diwilayah pagar laut yang sepanjang 30 KM sudah ada HGB nya terutama di Daerah Desa Kohot|| Hussen juga memperjelas dengan narasi — Jadikan kita ngecek di aplikasi bumi ya dan sudah ada kaplingan – kapling HGB.||

Menit 12.52 – 13.20 — itu bentuknya petak – petak dan banyak, informasinya apa bahwa ada koordinat, kemudian nomor HGB, kemudian luasannya berapa luasnya nah yang perlu di cek satu – satu dan dihitung ya cuman ada informasi ya ratusan hektar itu totalnya. dan yang menarik adalah berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi MK, sebetulnya tidak boleh ada hak diatas laut itu ditahun 2010 dan ini malah sudah ada hak diatas laut gimana ajaib kan.||

Prinsip kepentingan public

Menit 7.09 – 7.25 — Om Busman mendapatkan laporan dari Nelayan kalau mereka mendapatkan gangguan ketika melaut. Jadi nelayan itu ketika

Menit 7.09 – 7.52



Menit 35.46 – 35.56



Menit 23.13 – 23.20



menjangkau lautan untuk menjaring ikan itu mereka membutuhkan waktu 1 jam sampai 2 jam karena harus memutar, sebetulnya ada rongga – rongga diantara belah – belah bamboo cuman lebarnya itu hanya 5 sampai 8 meter dan banyak kapal yang kemudian rusak.¶

Menit 35.46 – 35.56 — Nelayan – nelayan yang kita dapatkan ceritanya dari Egi ya, mereka juga terdampak betul terhadap proyek atau pekerjaan Pagar Laut ini. Mereka harus memutar ketika melaut, tangkapannya berkurang, dan mereka juga tidak diam saja kan? sebenarnya mereka sudah melapor ke pihak – pihak terkait (Pemerintah), nah kemudian kalau disini menteri kelautan tidak tahu alangkah lucunya Negeri ini.¶

Prinsip Keberimbangan Informasi

Menit 23.13 – 23.20 — Kami sudah cek juga ke koleganya Aguan, bahwa dia menyatakan bahwa ini bukan tidak ada hubungannya dengan PSN tapi ini bahwa pengembangan PIK mungkin saja, nah senyamang itu.¶

Menit 24.32 – 24.40 — Menurut penelisiran Egi kepala Desa mereka

	<p>Menit 24.32 – 24.40</p>  <p>Menit 34.51 – 35.13</p> 	<p>mendapatkan komisi dari penjualan, nah siapa yang menjual ini memang beberapa diantaranya utusan – utusannya PIK, meski sebenarnya kuasa hukum Agung sedayu itu membantah ya bahwa proyek pengurukan yang ada didarat, kemudian pemagaran laut itu berkaitan dengan Agung sudayo grup.¶</p> <p>Prinsip independensi Redaksi Menit 34.51 – 35.13</p> <p>– Kelucuan –kelucuan di Republik kita ini ya ini, kita juga mengkritik kementerian kelautan dan Periklanan (PIK) yang mengaku dan menggelengkan kepala serta tidak tahu siapa pemilik atau penggarap proyek ini. Dan tentu saja bagaimana kebiasaan atau pola pemerintah merespon kekacauan – kekacauan atas peristiwa yang terjadi, jadi mereka baru bergerak setelah adanya permasalahan yang viral.¶</p>
<p>2.</p>	<p>Aktor dan Lobi – lobi di Balik Revisi UU TNI</p> 	<p>Prinsip Verifikasi Fakta Menit 4.10 – 4.39 — jadi begini sebetulnya Revisi UUD TNI ini sudah mulai digodok Prabowo ketika dia masih menjadi Menteri Pertahanan (MENHAN) nah pasca dia menang</p>

Host : Stefanus Pramono

Narasumber 1 : Hussein Abri

Narasumber 2 : Francisca Christy

Rosana

Menit 4.10 – 4.39



Menit 7.10 – 7.36



sebagai Presiden terpilih di Februari itu ada pembahasan di internal KEMHAN jadi ini bisa gak di selesaikan diakhir jabatannya dia sebagai Metri Pertahanan. Nah, ini cerita Bambang Eko ya, jadi ketika itu Bambang Eko itu sebagai staf khusus atau asisten khusus Prabowo di Menteri Pertahanan, sekarang Bambang Eko adalah wakil menteri sekretaris Negara. Nah, intinya adalah di periode itu tidak memungkinkan lah istilahnya dan juga masih masa transisi. Prabowo lalu bilang — yasudah kita bahas di bulan – bulan pertama kita berada di Istanah.!

Prinsip Akurasi Berbasis Data Dokumen

Menit 7.10 – 7.36 — Sebetulnya Pram sejak tahun lalu sejak ada Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) yang keluar dari pemerintahan, ini sudah dibahas di internal Balai Legislatif (BALEG) Revisi UUD TNI ini. Nah, DIM yang saat itu beredar di Baleg adalah DIM yang dipegang oleh teman – teman Masyarakat Sipil yang ada 2 pasal yang bermasalah, yang pasal 47 misalnya yang memperluas peran TNI di berbagai Kementerian dan Lembaga yang tidak terbatas jumbla lembaga yang bisa dimasuki sama TNI ada pengecualian

kebijakan Presiden gitulah. Lalu ada juga pasal 39 misalnya yang membolehkan TNI berbisnis gitu dan sebetulnya senyampang itu ya dengan apa permasalahan di internal Baleg waktu itu. Pemerintah waktu itu atau Prabowo sudah menyiapkan beberapa Perwira gitu untuk di sekolahkan di Universitas Pertahanan (UNHAN) untuk menambah kualitas dan kapabilitas di sektor Bisnis.¶

Menit 8.50 – 9.22



Menit 8.50 – 9.22 — itukan draft yang lama, kemudian ini di bahas di draft yang baru gitu? Betul ada DIM baru jadi memang ada tarik menarik dulu antara ini mau dibahas di Baleg atau di Komisi 1. PDIP itu menolak Revisi UUD TNI dibahas di Baleg, karena kenapa ada 2 pasal iini jadi Megawati sudah bertitah nih jangan sampai ada Dwi Fungsi, kalau sudah dibahas di Baleg khawatirnya 2 pasal ini lolos begitu saja. Nah, kemudian DIM yang beredar sampai diawal bulan Maret itu masih DIM yang lama itu.¶

Menit 12.14 – 13.01



Prinsip Transparansi Sumber

Menit 12.14 – 13.01 — Nah, jadi backgroundnya beberapa hari sebelum DIM itu keluar, Prabowo memanggil seorang petinggi Gerindra di Istana detailnya ada di

Majalah Tempo. Dispel sedikit lah ya jadi saat itu di minggu – minggu itu Masyarakat Sipil itu sudah menentang Revisi UU TNI , kenapa karena ada kekhawatiran mengembalikan Dwi Fungsi TNI atau ABRI. Lalu Prabowo bertanya kepada koleganya di Gerindra itu, — sebetulnya apa yang ditentang oleh Masyarakat Sipil, ya 2 pasal ini yang paling kursial. Nah, kemudian Prabowo minta petinggi Gerindra turun gunung membereskan. Jadi keluarlah DIM baru versi timnya Prabowo yang sudah mempersempit peran TNI di berbagai Kementerian dan Lembaga tadi, itu informasi yang kita dapatkan.¶

Menit 26.58 – 27.14



Menit 26.58 – 27.14 — Nah, gue ngobrol yama mantan Gubernur Lembaga Ketahanan Sosial Agus Wijoyo dan Andi Wijayanto, nah pasal perpanjangan usia ini akan membuat pusing bagian SDM nya TNI karena akan mengganggu Piramida TNI. Karena kan bagaimana pun di TNI itu sistemnya adalah dari bawah, gemuk – gemuk lalu bintang 4, bahkan Agung Wijoyo ini ngeledekin nanti karir TNI itu seperti pasar malam ya serba mendadak gitu, tidak ada lagi ritme – ritme yang bisa di prediksi ole

Prajurit TNI karena selama ini kalau misalkan lu mau naik Jabatan, itukan 1 tahun ada 2 kali yaitu di 1 April di Bulan Oktober 110 istilahnya.nah, kalau misal ada perpanjangan masa usia jabatan ini artinya semua ritme yang ada itu bakal berubah dan mereka pasti bakal pusing tuh bagian SDM nya. Dan sangat mungkin terjadi penumpukan Perwira. Hitungan Andi Wijayanto itu ada nanti bisa menambah sekitar 300 Perwira menengah yang non job.¶

Menit 13.23 – 13.32



Prinsip Keberimbangan

Menit 13.23 – 13.32 — mereka berasumsi bahwa Bulan Ramadhan penuh berkah Masyarakat gak marah – marah, ya siapa yang gak marah lu mengembalikan Dwi Fungsi TNI. Ini faktanya lo Pram jadi mereka berasumsi bahwa namanya bulan puasa Gejolak Masyarakat nih gak terlalu tinggi tapi faktanya adalah Masyarakat Sipil di sejumlah Daerah protes keras gitu, Mahasiswa juga.¶

Menit 18.07 – 18.40



Menit 18.07 – 18.40 — Prabowo sempat bertanya kepada Mentri Pertahanan Safri Samsudin meupun Bambang Eko, — ini apasih yang terjadi kok rebut – rebut¶ ya intinya Prabowo minta ke anak – anak

Menit 21.07 – 22.20



buahnya ini untuk menjaring ataupun merangkul para Masyarakat Sipil lah, yang dimau mereka ini apa saja gitu. Nah, terus Bambang Eko cerita juga bahwa Prabowo sangat konsen terhadap sejumlah hal, titik temunya adalah Prabowo tidak mau bergeser soal masa pension TNI.¶

Prinsip Kepentingan Publik

Menit 21.07 – 22.20 —jadi dipasal 7 yang operasi Militer selain perang tadi, ada perluasan tugas pokok TNI, pertama nih awalnya ada TNI itu mengawasi dan menanggulangi Narkotika ikut campur tangan, lalu ada juga yang TNI itu nanti ikut mengawasi soal keamanan ciber. Sebetulnya pasal 7 itu sudah di setujuin di konsinyering lalu dihari senin 2 hari setelah konsinyering, wakil ketua umum DPR itu ketemu dengan Masyarakat Sipil ada perwakilan Masyarakat Sipil salah satunya dengan Bang Usman Hamid Direktur Amnesty Internasional ya, dan bang Usman menyampaikan berbagai hal kenapa keberatan masyarakat sipil dengan perluasan tugas pokok TNI dan peran TNI di berbagai Kementrian dan lembaga salah satunya juga adalah yang menyoroti soal Narkotika dan Cyber. Karena Narkotika itu bisa benturan




dengan Polisi, Cyber itu nanti bisa nih orang – orang yang mengkritik Pemerintah di media sosial tiba – tiba diatas oleh TNI. Lalu pasal yang Narkotika itu dipasal 7 diayat 17 waktu itu, itu di take out. Lalu cyber itu ditambahkan 1 diksi yaitu pertahanan cyber yang nanti TNI hanya mengurus dibagian hulunya tidak ke prodak maupun ke pelaku dibawahnya.¶

Menit 32.59 – 33.15



Prinsip Akuntabilitas Kekuasaan

Menit 32.59 – 33.15 — Sebenarnya ada perubahan yang menyangkut soal substansi misalnya soal usia pension terutama di bintang 3, nah itu di minta Prabowo langsung kepada Pimpinan Komisi 1 ketika di Istanah Negara H – 1 sebelum disahkan Revisi UUD hari Rabu gitu. Jadi perubahan dimalam hari sebelum pengesahan padahal sudah di tetapkan diputuskan tingkat satu.¶

<p>3.</p>	<p>Seru dan Lucu Diskusi, 100 Hari Prabowo Bareng Inaya Wahid dan Cak Anam</p> 	<p>Prinsip Kepentingan Publik Menit 3.33 – 3.58 — Kemarin kami ngobrol dan mendapatkan informasi bahwa di Universitas Brawijaya ada demonstrasi, wah luar biasa gak salah milih tempat kita ternyata ya, tempat perlawanan ini. Dan pedan kami jangan lupakan teman – teman di sekitar kita ada banyak orang – orang yang membutuhkan suara dari teman – teman, kalian ini adalah voice of the voiceless. Ada banyak orang yang membutuhkan kalian.¶</p> <p>Fungsi Kontrol Sosial Menit 4.38 – 5.11 — Kita datang ke Malang khususnya di UB karena Tempo sendiri 2 pekan yang lalu itu membuat liputan khusus mengenai 100 hari Pemerintahan Prabowo, dan disitu tentu banyak catatan mengenai menguatnya Militerisme, bagai mana situasi Demokrasi kebebasan akademik juga semakin mengendur gitu ya, dan saya rasa itu perlu di diskusikan gitu.¶</p> <p>Independensi Terhadap Kekuasaan Menit 6.07 – 6.15 — lalu kita juga melihat disisi lain Pemerintah kita ini Prioritasnya berbeda gitu loh, kenapa kemudian ditengah krisis anggaran Pemerintah malah beli pesawat gitu ya, loh mau perang sama siapa?</p>
	<p>Host :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Francisca Christy Rosalina 2. Hussein Abry Dongoran 3. Stefanus Pramono 4. Raymundus Rikang <p>Narasumber 1 : Cak Anam Narasumber 2 : Inaya Wahid</p> <p>Menit 3.33 – 3.58</p>  <p>Menit 4.38 – 5.11</p>  <p>Menit 6.07 – 6.15</p>	



Menit 35.08 – 36.16



Sama rakyatnya sendiri?.

Keberpihakan pada Korban & Kelompok Rentan

Menit 35.08 – 36.16 — Tapi bagi Institusi pengawas kaya KOMNAS, kaya KOMPOLNAS, atau Institusi Pengawas yang lain, perjalanan Dina situ adalah pertemuan antara korban dan Lembaga, pertemuan antara fakta di Masyarakat dengan Lembaga Pengawas. Lah, kalau perjalanan Dinasnya dipoong bagaimana kita bertemuinya?. Lah, itu problem banget, apa lagi misalnya kalau di Malang di kota – kota besar mungkin enggak kebayang orang gampang kan bisa di video call, bisa zoom, bisa macam – macam. Coba kalau ada di Papua, ada di plosok Kalimantan yang tanahnya mungkin kena *Food Estate* (lembung pangan), yang tanahnya kena tambang, yang tanahnya kena macem – macem. Bagaimana mereka bisa memperjuangkan Hak nya kalau dia enggak bisa berkomunikasi dengan Lembaga Pengawas. Lebih dari itu keberadaan lembaga pengawas di tengah masyarakat bisa bertemu langsung menjadikan faktanya lebih jernih dan psikologi korban lebih nyaman kalau dijumpai langsung. Dia lebih merasa terlindungi negara

hadir, jadi perjalanan Dinas sebagai lembaga pengawas itu sebenarnya menghadirkan Negara. Lah, kalau itu dipangkas artinya memang Pemerintah sedang tidak ingin Negara hadir untuk melindungi warga Negeranya lah terus untuk apa?. —

Ruang Partisipasi Publik

Menit 50.01 – 52.15 — sebelum kita lanjut ke pembahasan publik kita menampilkan video tapi nilai – nilai tadi kita ngasih nilai berpa kang?, tapi kayanya Tempo enggak ngasih nilai, kita serahkan pada publik bukan pada survei. Narasi isi cuplikan vidinya

— Penguasa HOKG versi dunia nyata kami mahasiswa bukan anak buah Danzo yang siap tunduk begitu saja . KATANYA DEMOKRASI TAPI KRITIK MALAH GENJUTSU, BUKA SUARA SEDIKIT MALAH KENA SHAWDOW POSSESSION JUTSU. Kami ini seperti Naruto jaman dulu penuh harapan tapi kok realita malah kaya Sasuke penuh dendam dan tekanan. Katanya pendidikan prioritas yang utama tapu yang diprioritaskan malah yang punya kuasa, kami disuruh rajin belajar katanya demi masa depan yang cerah tapi cari kerja susah kaya

Menit 50.01 – 52.15



Menit 57.27 – 58.06



rasanya jadi Roly yang kalah. Kami bukan sasuke yang bisa kabur dari Desa kami Naruto setia sama Negeri meski sering terluka. Jadi tolong wahai penguasa jangan buat kami semua jadi seperti anak sasuke yang kecewa dan memberontak nantinya




Kritik Tanpa Penghinaan Personal

Menit 57.27 – 58.06 —Menghina Person itu bukan bagian dari Demokrasinya, bukan itu yang ingin kita cari saya tidak sedang menghina Mas Gibran. Saya respect pada Mas Gibran yang saya kritik adalah bagaimana beliau kemudian mendapatkan jabatannya, hal – hal yang sebenarnya melanggar Demokrasi sendiri. Itu yang sebenarnya harus dan perlu kita jadikan ceng – cengan. Jadi kalau ada yang pelanggaran – pelanggaran terhadap Demokrasi ini yang harus kita kejar terus, jadi bukan personnya karena ini nanti mendistraksi karena tujuan kita bukan itu, kita bukan untuk menghancurkan person tapi mempermasalahkan bahwa ada jalan – jalan yang salah. Dan jangan di pikir itu jadi sesuatu yang simpel yang saya kesel itu sebenarnya adalah, bahwa kemudian dengan cara yang menelikung kanan kiri sehingga kemudian mendapat jabatannya itu

		<p>dengan mempermainkan undang – undang itu tidak kecil. Kita menormalisasi kecurangan – kecurangan, kita menormalisasi banyak hal yang menyimpang nantinya di masyarakat. Kalau mau jaga Demokrasi itu bukan ketika gue nyampai di jabatan itu maka nanti gue akan menjaga Demokrasi enggak bisa! Cara elu menjaga Demokrasi adalah, elu menaati peraturannya, menaati konstitusinya dengan tidak ikutan menjadi bagian yang curang ya Bran!.</p>
--	--	--

2. Prinsip Dasar Pemberitaan 3 Bulan Sesudah Teror

Tabel 4.4

No	Judul Episode & Data	Pinsip Dasar Pemberitaan
<p>1.</p>	<p>Komunikasi Buruk Presiden Prabowo</p> 	<p>Prinsip Kepentingan Publik Menit 2.32 – 2.41 — Yang pasti Tempo akan terus bekerja untuk kepentingan public. Kita gak akan berhenti apapun kondisinya kita akan berupaya memberikan yang terbaik, laporan terbaik, terverifikasi untuk publik.¶</p>
	<p>Host : Stefanus Pramono</p> <p>Narasumber 1 : Francisca Christy Rosana</p> <p>Narasumber 2 : Hussien Abry Dongoran</p> <p>Menit 2.32 – 2.41</p>  <p>Menit 4.25 – 4.41</p> 	<p>Prinsip Independensi Redaksi Menit 4.25 – 4.41 — Banyak yang ngejapri gua di media social kenapa Tempo tidak hadir ataukah Tempo tidak diundang?,¶ Pram menjawab — ya pertama Tempo memang tidak diundang dalam acara itu dan Presiden memang berhak untuk mengundang siapapun walaupun juga wajar kalau public bertanya – Tanya kenapa yang di undang hanya sebagian gitu.¶</p> <p>Prinsip verifikasi & Akurasi Menit 6.36 – 6.51 — misalnya Revisi undang – undang TNI yang pernah kita tulis juga di Majalah Tempo yang mana ini sebetulnya keinginan Prabowo, tapi di publik ngang neng ngor. Artiya bukan Prabowo yang salah, bukan Prabowo yang ngajukan begitu ya. Tapi wawancara kita</p>

Menit 6.36 – 6.51



Menit 6.24 – 6.32



Menit 8.47 – 8.55



dengan Bambang ketika itu mengakui bahwa ini barang milik (keinginan) Prabowo, dan Prabowo juga sudah membenarkan dalam wawancara itu.¶

Fungsi Kontrol Sosial

Menit 6.24 – 6.32 — Nah jadi sebulan terakhir kan memang Pemerintah atau DPR itu juga sangat dikritik oleh publik. Banyak hal – hal istilahnya barang goib gitu dalam artian, nah lu gak tau nih apa yang sebetulnya terjadi.¶

Menit 8.47 – 8.55 karna memang ada kegentingan komunikasi ini makanya dibentuk tim – tim khusus karena Hasan Hasbi ini tidak bisa berfungsi terhadap Penetrasi Komunikasi Publik dan Tempo melihat bahwa memang Hasan Hasbi melakukan berbagai blunder waktu itu menyebutkan —Dimasak ajal ini membuat gerah Prabowo. Hussen menjawab — yang soal dimasak saja itu bahkan dalam suatu ratas sempat disinggung tuh, bukan komunikasi yang patut dan bagus lah untuk mengatasi sebuah krisis. Karena omongannya Hasan Hasbi (kepala kik kik kik) itu menjadi berita juga di Internasional, karena kepala babi terus komunikasi presiden malah

Menit 2.09 – 2.23



Menit 13.28 – 13.43



bilang dimasak saja.¶

**Keberpihakan Pada kebebasan
Pers & Anti – Intimidasi**

Menit 2.09 – 2.23 — Tempo memang diserang dengan serangan cyber di dossing, dan juga teror sebenarnya masih berlanjut termasuk juga melanjutkan teror yang sebelumnya kurang lebih seperti itu.¶

Menit 13.28 – 13.43 Pemerintah dianggap tidak sikapnya tidak tegas atas teror yang menimpa Tempo — dan ini sebenarnya bukan hanya Tempo saja ya bukan soal Temponya tapi soal kebebasan Pers nya. Ini ada ancaman yang luar biasa mau itu Tempo, mau media lain harusnya seorang Presiden bisa memberikan kritiknya Kemudian ada orang – orang yang mengganggu atau mengancam kebebasan pers.¶ Francisca juga menambahkan — alih – alih Prabowo menyampaikan kalau teror ini sebagai adu domba, gue sih berharap Prabowo mengancam bentuk – bentuk teror terhadap Pers kalau memang Prabowo tidak anti kritik terhadap Pers.¶

Prinsip Transparansi Terhadap Audiens

Menit 1.18 – 1.35 ajakan membaca

	<p>Menit 1.18 – 1.35</p> 	<p>laporan Tempo dan membeli Majalah versi cetak — dan untuk teman – teman yang ingin membaca laporan Tempo, silahkan klik di link deskripsi. Bagi kalian yang ingin membeli Majalah Tempo versi cetak kalian bisa klik link ini juga.¶</p>
<p>2.</p>	<p>Intimidasi Aktivis Penentangan Revisi UU TNI</p> 	<p>Prinsip Kepentingan Publik Menit 1.51 – 2.12 — untuk teman – teman yang mau mendukung Jurnalisme berkualitas hari ini yang mau kita bahas dengan Andri adalah laporan panjang dari teman – teman di Politik yang sudah terbit. Jadi teman – teman yang ingin membaca versi cetak dan digital edisi hari ini bisa klik link yang ada di deskripsi.¶</p>
	<p>Host : Rymundus Rikang Narasumber 1 : Andrie Yunus Narasumber 2 : Hussien Abry Dongoran</p> <p>Menit 1.51 – 2.12</p> 	<p>Prinsip Verifikasi & Testimoni Langsung Menit 3.17 – 4.30 — pertama kali kita dapat Informasi terkait pelaksanaan kosinyering panja DPR RI dan panja Pemerintah itu hari Kamis malam. Tersebar satu undangan 1 lembar yang isinya roundonw dan lokasi. Setelah itu kami bahas di salah satu kanal grup komunikasi dan kemudain dibahas juga berkenaan dengan kita harus mendatangi Hotel Fermon untuk menuntut penghentian proses pembahasan. Nah kita baru mulai itu dihari Jumat kita adakan meeting dan eksekusinya itu dihari Sabtu sekitar</p>

Menit 3.17 – 4.30



Menit 5.16 – 5.47



pukul 1 siang. Kami menyiapkan beberapa poster termasuk juga undangan meliput walau ketika itu kami belum mendapatkan informasi secara pasti ruangan, kemudian siapa yang ikut terlibat, dan berapa orang itu belum kami ketahui. Baru kemudian setelah kita mendapat informasi dari rekan – rekan Jurnalis juga dilapangan yang meliput terlebih dahulu di Fermon, akhirnya kami putuskan untuk masuk ke ruang rapat, membuka pintu, membentangkan poster, sekaligus meneriakkan menghentikan proses pelaksanaan pembahasan karena ini dilakukan secara tertutup di hari libur dan di Hotel mewah.!

Prinsip Independensi Terhadap Kekuasaan

Menit 5.16 – 5.47 — keberanian ini muncul saya sebagai Generasi Muda tidak ingin bangkit kembali mengenai Dwifungsi ABRI yang mana itu jadi bahasan dari Subtansi RUU TNI yang waktu itu dibahas. Nah, jadi ada tanggung jawab moral baik diri sendiri maupun secara kelembagaan, terlebih lagi pendiri Kontras Munir Said Thalib itu memiliki concerns secara khusus untuk melalukan reformasi sector keamanan. Dalam konteks ini dalam

Menit 32.12 & 33.15



Institusi Militer atau TNI biar militer tidak masuk ranah sipil seperti jaman Orde baru.¶

Prinsip Akuntabilitas & Hak Jawab

Menit 32.12 & 33.15 — teror dan intimidasi yang di alami oleh masyarakat sipil, aktivis maupun jurnalis dalam rentan pembahasan revisi UUD TNI ini menunjukkan dan semakin menegaskan bahwa kebebasan sipil, kebebasan berpendapat di Indonesia yang katanya adalah lembaga negara demokratis itu semakin menyempit. Kritik, pendapat itu adalah nyawa dari demokrasi dan setiap orang menyatakan setuju atau tidak terhadap suatu kebijakan pemerintah misalnya dalam hal ini revisi UUD TNI itu merupakan kebebasan seseorang, kebebasan warga sipil untuk bersikap dan menyatakan apakah dia setuju atau tidak. Dengan adanya teror dan intimidasi terhadap orang – orang yang dianggap bersebrangan dengan sikap pemerintah atau sikap lembaga – lembag tertentu, menunjukan bahwa orang atau warga sipil seolah – olah tidak boleh lagi berbeda pendapat dalam negara demokrasi ini. Jadi, bagi personil – personil anggota atau

siapapun yang kemudian teridentifikasi oleh bukti – bukti yang sudah dikompilasi oleh masyarakat sipil yang mereka turun kelapangan, datang ke kantor kontras itu mesti diusut dan diberi sanksi. Karena jika tidak, maka praktik kekerasan, intimidasi, praktik represi serupa akan terulang.¶

Prinsip Keberimbangan

Menit 33.49 – 34.07 — Tapi kita juga agak sulit mengharapakan Presiden Prabowo bersikap, atau kemudian meminta intimidasi represi ini dihentikan. Karena dalam wawancara dengan para pemimpin redaksi Sri Prabowo mengaku bahwa revisi UUD TNI itu adalah keinginannya. Jadi kita tidak mungkin berharap lagi pada Presiden. Tapi kita juga mendesak bahwa kekerasan intimidasi, represi terhadap masyarakat sipil yang kritis tidak boleh terjadi lagi.¶

Prinsip Perlindungan Demokrasi & HAM

Menit 31.09 – 31.40 apakah mereka berhasil meredam suara – suara kritis terhadap pemerintah dan DPR ujar Hussen, Andri menjawab — jadi teror terhadap kantor kontras yang didatangi oleh 2 mobil 5 kali

Menit 33.49 – 34.07



Menit 31.09 – 31.40



		<p>kekantor, termasuk juga laporan Polisi terhadap saya & Javier itu sama sekali tidak menyurutkan kami untuk terus menyuarakan penolakan UU TNI, itu dibuktikan dengan masifnya berbagai aksi di Daerah untuk menolak hal yang sama. Jadi menuntut kami teror ini gagal dilakukan, alih alih terbungkam suara kritisnya namun justru menjadi membesar dan semangat perlawanan.¶</p>
<p>3.</p>	<p>Gejala Represif Pemerintah Prabowo</p> 	<p>Prinsip Kepentingan Publik</p> <p>Menit 1.55 – 2.10 disini membahas salah satunya tentang Militerisme 1 soal tentang pengangkatan beberapa jendral – jendral yang ada di kementerian dan lembaga, dan juga bagaimana represi yang masih terjadi juga dikalangan teman – teman dan mahasiswa setelah revisi UU TNI. Mbak Bibib menjawab — kalau saya sih melihatnya benar – benar memakai helicopter view ya, ini gejala menurut saya gejala fasisme mungkin agak ekstrim ya? Tapi kan fasisme digambarkannya seperti itu ketika benar – benar ada sistem yang membuat tidak ada seorang pun yang bisa berbicara bebas di sebuah negara da nada penundukan yang berlebih – lebih.¶</p>
	<p>Host : Raymundus Rikang Narasumber 1 : Bivitri Susanti Narasumber 2 : Hussien Abry Dongoran</p> <p>Menit 1.55 – 2.10</p> 	

Menit 3.37 – 3.57



Menit 8.37 – 8.45



Menit 7.28 – 7.38



Prinsip Verifikasi & Berbasis Fakta

Menit 3.37 – 3.57 — Nah, setelah itu ada UUD TNI, tapi kalau diperhatikan yang terjadi sekarang ini lebih menggila gitu ya.ada penundajng Dirjen, bahkan saya baca di Tempo ada 4.000 – an yang sudah ditempatkan di kementerian dan lembaga. Belum lagi calon yang BUMN kan Aman pernah nulis dari Ekonomi, belum lagi juga yang MBG, ada juga requitmen dan mereka juga mendapatkan pelatihan di barak militer.||

Menit 8.37 – 8.45 — ya begitulah yang terjadi akhir – akhir ini paling tidak dan kita semua punya evidence – nya gitu ya daftarnya, dan jadi sekali lagi memang kalau kita melihat peraturan atau aturan mainnya kita benar – benar mesti lihat sampai ke detailnya tuh tanggal berapa mengundurkan diri, bagaimana prosedurnya dipenuhi atau tidak untuk jabatan tertentu.||

Prinsip Independensi Redaksi

Menit 7.28 – 7.38 — Tapi yang saya tau bebrapa jabatan yang baru – baru ini itu dilakukan setelah penunjukan, jadi benar – benar dipaksakan supaya maunya Prabowo itu benar – benar

Menit 6.52 – 7.05



Menit 24.27 – 24.50





bisa dilaksanakan.¶

Fungsi Kontrol Sosial

Menit 6.52 – 7.05 — Jadi seakan – akan legal kan, karena prosedurnya dipenuhi tapi sebetulnya pemenuhan prosedur itu dilakukan belakangan supaya legal saja. Itu terjadi di beberapa jabatan lah. Bahkan sebelum ramai – ramai ini tuh ada beberapa kali tuh pas penunjukan pejabat kepala daerah 2022 an gitu kira – kira, ada beberapa kasus yang mirip kaya gini. Kalau dilacak waktunya kira – kira sehari sebelum penunjukan baru mundur gitu ya.¶

Menit 24.27 – 24.50

Di menit ini menyinggung masalah kritik terhadap intimidasi pada penuli opini dan aktivis — jadi yang terjadi masyarakat sipil itu satu hal, tapi kan kemudian ke soal berpendapat bahkan oleh orang – orang yang menggunakan media massa. Tapi kan dalam negara demokratis bahkan tidak boleh kan kalau ada yang diteror, ditendang motornya segala macam.¶

<p>Menit 2.03 – 2.21</p> 	<p>Prinsip Transparansi Sumber Menit 2.03 – 2.21 audiens diberikan akses untuk mengecek sumber asli —</p>
<p>Menit 26. 05 – 26.13</p> 	<p>Prinsip Akuntabilitas & HAM Menit 26. 05 – 26.13 — masyarakat sipil harus tetap menyuarakan untuk membuat makin banyak orang yang menyadari dari situasi ini.¶</p>

3. Independensi Program Investigatif Bocor Alus Media Tempo dalam Mempertahankan Prinsip Dasar Pemberitaan Sesudah teror Kepala Babi & Bangkai Tikus

Memasuki rumusan masalah kedua, peneliti tidak lagi berfokus pada aspek ideologis jurnalisme secara umum, melainkan pada bagaimana prinsip dasar pemberitaan tetap dipertahankan setelah terjadinya teror terhadap Tempo. Pada bagian ini Peneliti menganalisis data rumusan masalah kedua yaitu bagaimana Independensi program investigatif Bocor Alus Politik Media Tempo dalam Mempertahankan Prinsip Dasar Pemberitaan sesudah teror kepala babi dan bangkai tikus dengan cara menganalisis data yang dilakukan secara bertahap dan berkesinambungan sejak proses pengumpulan data hingga penyusunan temuan penelitian dengan menggunakan 4 komponen yaitu, pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan dan verifikasi. Dalam konteks penelitian ini, Peneliti menganalisis prinsip dasar pemberitaan yang

dilakukan terhadap enam episode Podcast Bocor Alus Politik Tempo, yang meliputi tiga episode sebelum terjadinya teror dan tiga episode sesudah peristiwa teror kepala babi dan bangkai tikus.

Berdasarkan teori McQuail (2006), independensi media tercermin dari kemampuan redaksi menjaga kualitas berita melalui akurasi, verifikasi, keberimbangan, serta orientasi pada kepentingan publik tanpa tunduk pada tekanan eksternal. Oleh karena itu, peneliti menganalisis temuan data sebelum dan sesudah teror untuk melihat apakah terjadi perubahan pola kerja redaksi pada Podcast Bocor Alus Politik Tempo.

a. Prinsip Kepentingan Publik

Peneliti menemukan bahwa sejak periode sebelum teror, Podcast Bocor Alus Politik Media Tempo menempatkan dampak kebijakan terhadap warga sebagai pusat narasi. Pada liputan pagar laut, misalnya, dijelaskan bagaimana nelayan harus memutar hingga dua jam dan mengalami kerusakan kapal (menit 7.09–7.25; 35.46–35.56). Sudut pandang ini menunjukkan keberpihakan pada kelompok rentan, bukan pada aktor pemilik modal.

Sesudah teror, orientasi tersebut dipertegas melalui pernyataan redaksi bahwa Tempo akan terus bekerja —untuk kepentingan publik— dengan laporan terverifikasi (menit 2.32–2.41). Bagi peneliti, konsistensi ini relevan dengan gagasan McQuail bahwa media independen adalah media yang menentukan agenda berdasarkan kebutuhan warga, bukan preferensi kekuasaan atau rasa takut. McQuail

menyebutnya sebagai *public interest orientation* yang menjadi inti legitimasi sosial pers.

Dengan demikian, peneliti menilai bahwa prinsip kepentingan publik tidak mengalami pergeseran Sesudah teror. Temuan ini menguatkan proposisi McQuail bahwa independensi terwujud ketika media tetap menjadikan warga sebagai rujukan utama dalam penentuan isu.

b. Verifikasi dan Akurasi Fakta

Indikator berikutnya adalah disiplin verifikasi. Sebelum teror, jurnalis Tempo melakukan pengecekan langsung ke lapangan menggunakan kapal nelayan (menit 3.19–3.58) serta menelusuri dokumen resmi melalui aplikasi Bumi ATR (menit 10.05–11.41). Prosedur ini memperlihatkan mekanisme *fact checking* berlapis.

Sesudah teror, pola yang sama tetap terlihat, misalnya pada episode tentang revisi UU TNI ketika Tempo mengonfirmasi informasi melalui wawancara langsung dengan narasumber kunci (menit 6.36–6.51). McQuail menekankan bahwa independensi mensyaratkan otonomi epistemik, yakni kemampuan memproduksi kebenaran faktual tanpa intervensi. Menurut peneliti, keberlanjutan verifikasi ini menunjukkan bahwa otonomi epistemik Bocor Alus Politik Media Tempo tidak runtuh oleh intimidasi.

Oleh sebab itu, peneliti menyimpulkan bahwa standar akurasi dan verifikasi tetap menjadi fondasi produksi berita, sesuai dengan konsep McQuail tentang independensi berbasis kualitas faktual.

c. Transparansi Sumber

Pada aspek transparansi, Podcast Bocor Alus Politik media Tempo sejak awal secara terbuka menyebut identitas dan posisi narasumber mulai dari nelayan, kolega PIK, hingga data institusional (menit 5.34–6.06). Keterbukaan ini memberi ruang bagi publik untuk menilai kredibilitas informasi.

Sesudah teror, redaksi tetap menyebut sumber secara eksplisit, termasuk dalam isu komunikasi Presiden dan polemik UU TNI. McQuail menyatakan bahwa independensi memerlukan akuntabilitas proses, yaitu kesediaan media membuka jejak produksi berita kepada audiens. Peneliti melihat praktik Bocor Alus Politik sejalan dengan prinsip tersebut dan tidak menunjukkan gejala penutupan sumber akibat rasa terancam.

Pada aspek transparansi, Bocor Alus Politik sejak awal secara terbuka menyebut identitas dan posisi narasumber mulai dari nelayan, kolega PIK, hingga data institusional (menit 5.34–6.06). Keterbukaan ini memberi ruang bagi publik untuk menilai kredibilitas informasi. Sesudah teror, redaksi tetap menyebut sumber secara eksplisit, termasuk dalam isu komunikasi Presiden dan polemik UU TNI. McQuail menyatakan bahwa independensi memerlukan akuntabilitas proses, yaitu kesediaan media membuka jejak produksi berita kepada audiens. Peneliti melihat praktik Bocor Alus Politik sejalan dengan prinsip tersebut dan tidak menunjukkan gejala penutupan sumber akibat rasa terancam. Maka, dapat disimpulkan bahwa transparansi sumber tetap terpelihara, mengafirmasi tesis McQuail bahwa independensi bersifat prosedural sekaligus etis.

d. Keberimbangan Informasi

Peneliti juga menemukan keberimbangan tetap dijaga. Pada sebelum teror, Tempo memuat bantahan kuasa hukum Agung Sedayu terkait proyek pagar laut (menit 24.32–24.40). Sesudah teror, redaksi tetap menyertakan posisi pemerintah dalam isu revisi UU TNI (menit 33.49–34.07).

McQuail memandang keberimbangan sebagai mekanisme untuk mencegah media berubah menjadi alat propaganda. Independensi, menurutnya, tercermin dari kemampuan memberi ruang bagi berbagai klaim yang relevan meski berseberangan dengan sikap editorial. Peneliti menilai praktik Bocor Alus Politik konsisten dengan kerangka ini. Dengan demikian, keberimbangan tetap menjadi norma kerja redaksi dan menandakan bahwa teror tidak menjerumuskan media pada sikap partisan sempit.

e. Akuntabilitas Kekuasaan dan Fungsi Wachtog

Pada dimensi kontrol sosial, sebelum teror Tempo mengkritik KKP yang mengaku tidak mengetahui pemilik proyek pagar laut (menit 34.51–35.13). Setelah teror, kritik diarahkan pada sikap Presiden yang tidak tegas terhadap serangan pada pers (menit 13.28–13.43).

McQuail menegaskan bahwa media independen harus menjalankan fungsi *watchdog*, yakni mengawasi penyalahgunaan kekuasaan demi kepentingan publik. Peneliti melihat keberlanjutan kritik struktural ini sebagai bukti bahwa Bocor Alus Politik tetap

memegang peran pengawas, bukan sekadar penyalur informasi netral. Karena itu, peneliti menyimpulkan bahwa fungsi akuntabilitas kekuasaan justru menguat sesudah teror, selaras dengan konsep watchdog McQuail.

f. Perlindungan Demokrasi dan Kebebasan Pers

Indikator yang menonjol setelah teror adalah artikulasi pembelaan terhadap kebebasan pers. Tempo secara terbuka meminta Presiden mengecam teror dan menegaskan bahwa persoalan ini menyangkut masa depan pers nasional (menit 13.28–13.43).

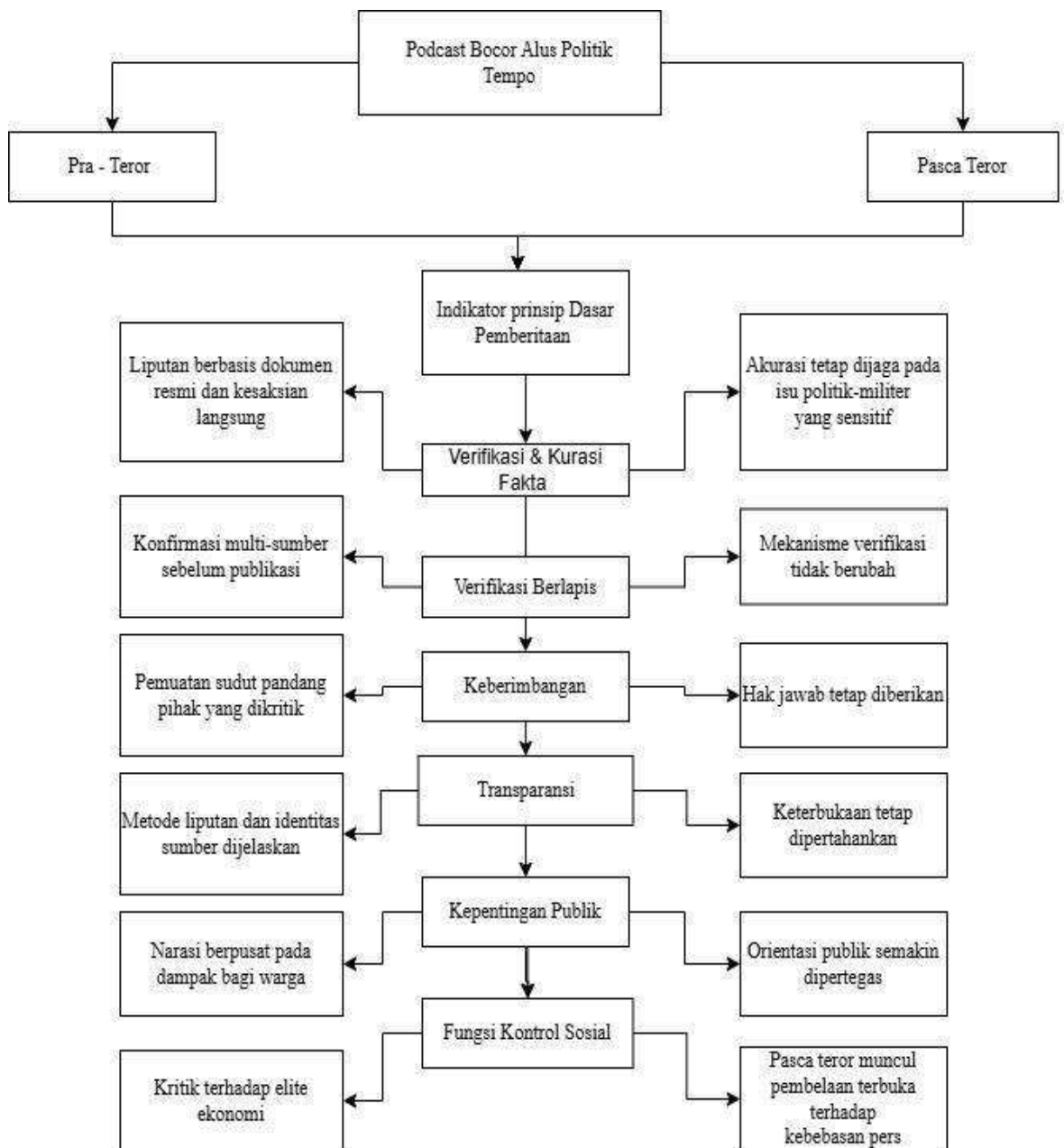
Dalam perspektif McQuail, independensi tidak hanya soal teknik pemberitaan, tetapi juga komitmen normatif pada demokrasi. Media yang independen berhak membela ruang kebebasan sebagai prasyarat kerja jurnalistik. Peneliti menilai sikap Bocor Alus mencerminkan dimensi normatif tersebut. Dengan demikian, Sesudah teror terjadi penguatan kesadaran demokratis redaksi yang justru memperkokoh independensi.

1). Tabel Perbandingan Prinsip Dasar Pemberitaan Sebelum Teror dan Sesudah teror

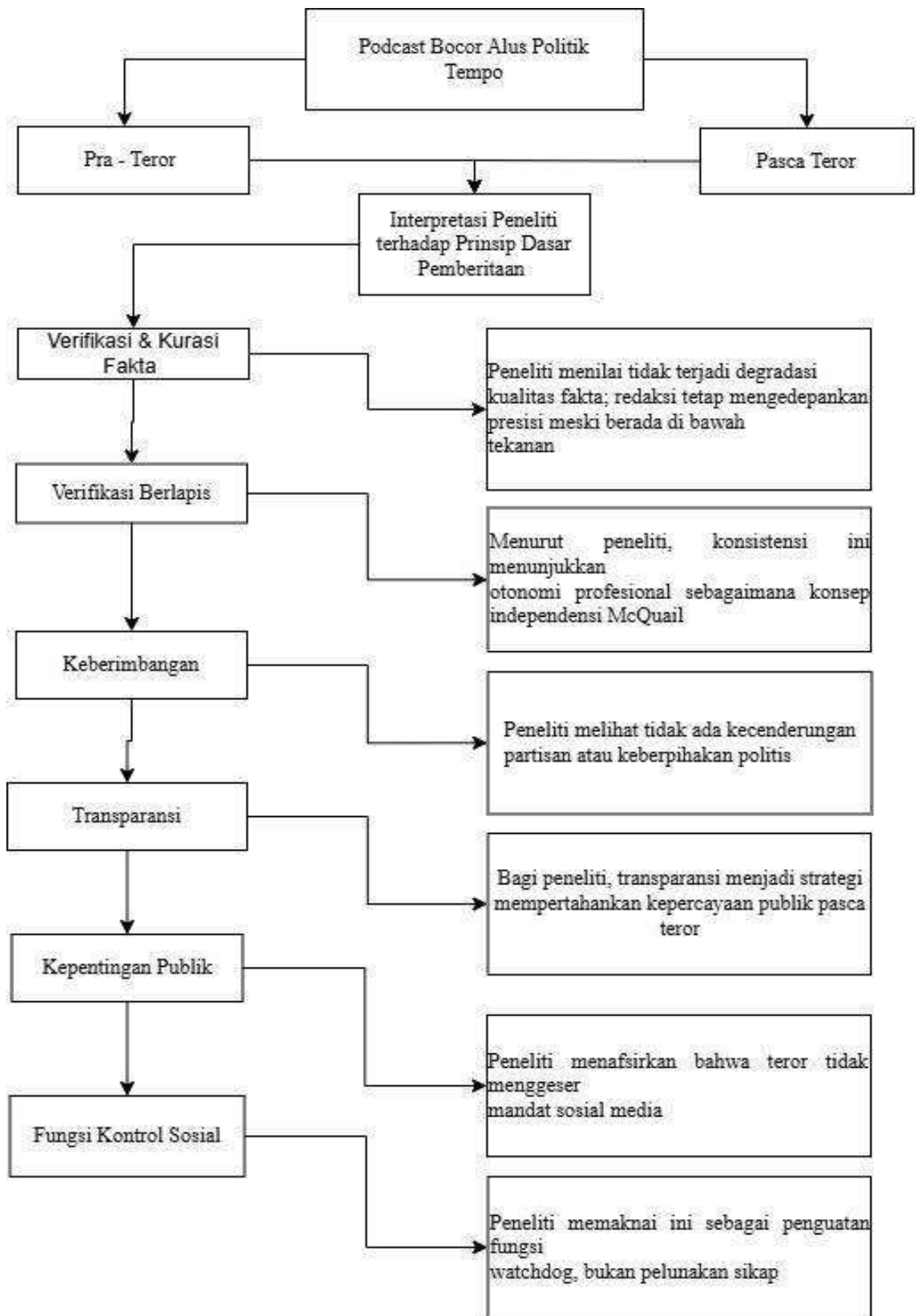
Untuk melihat secara lebih sistematis apakah terjadi perubahan independensi ideologis redaksi setelah peristiwa teror kepala babi dan bangkai tikus, peneliti melakukan perbandingan terhadap praktik pemberitaan Podcast Bocor Alus Politik Tempo pada periode sebelum teror dan sesudah teror. Perbandingan ini disusun berdasarkan indikator prinsip ideologis jurnalisme yang meliputi verifikasi, transparansi sumber,

keberimbangan, orientasi kepentingan publik, fungsi watchdog, serta sikap terhadap kebebasan pers. Analisis berikut dimaksudkan untuk menilai sejauh mana redaksi tetap mempertahankan otonomi editorial sebagaimana dipahami dalam kerangka independensi media menurut McQuail. Hasil perbandingan tersebut disajikan dalam tabel berikut.

Bagan 4.5



Bagan 4.6



Berdasarkan keseluruhan analisis, peneliti menyimpulkan bahwa independensi Program Investigatif Podcast Bocor Alus Politik Media Tempo dalam mempertahankan prinsip dasar pemberitaan tidak mengalami pelemahan sesudah teror kepala babi dan bangkai tikus. Teror yang menyasar institusi Tempo tidak mengubah orientasi redaksi dalam memproduksi informasi yang berlandaskan verifikasi, akurasi, keberimbangan, transparansi sumber, serta keberpihakan pada kepentingan publik. Praktik jurnalistik yang ditampilkan tetap menunjukkan konsistensi profesional tanpa tanda-tanda kompromi terhadap tekanan eksternal.

Menurut pandangan peneliti, situasi Sesudah teror justru menjadi momentum afirmasi independensi. Redaksi tidak terjebak pada *self-censorship*, melainkan semakin menegaskan fungsi kontrol sosial terhadap kekuasaan dan keberpihakan pada kebebasan pers. Hal ini selaras dengan pemikiran McQuail (2006) bahwa independensi media bukan diukur dari ketiadaan ancaman, tetapi dari kemampuan mempertahankan otonomi editorial dan standar etik ketika berada di bawah tekanan politik maupun intimidasi. Dengan demikian, peneliti menilai bahwa independensi Bocor Alus bersifat substantif dan resilien. Independensi tersebut terwujud melalui keberlanjutan prosedur verifikasi, keberanian mengkritik kebijakan publik, serta komitmen membuka informasi secara transparan kepada audiens. Teror tidak menggeser mandat jurnalistik Tempo sebagai media watchdog, melainkan memperkuat identitasnya sebagai ruang informasi yang berpijak pada kepentingan publik dan tanggung jawab demokratis.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Penelitian ini bertujuan menjawab dua rumusan masalah mengenai independensi Program Investigatif Podcast Bocor Alus Politik Media Tempo, baik pada aspek prinsip ideologis jurnalisme maupun prinsip dasar pemberitaan setelah terjadinya teror kepala babi dan bangkai tikus. Berdasarkan analisis terhadap konten podcast tiga bulan sebelum teror dan tiga bulan sesudah teror, peneliti menarik beberapa kesimpulan utama sebagai berikut.

Pertama, terkait rumusan masalah tentang independensi dalam mengimplementasikan prinsip ideologis jurnalisme sesudah teror, peneliti menyimpulkan bahwa orientasi ideologis Bocor Alus tetap berada pada jalur jurnalisme publik. Fungsi watchdog, sikap anti-otoritarian, keberpihakan kepada kepentingan publik, serta tanggung jawab sosial tidak mengalami pergeseran makna setelah teror terjadi.

Secara empiris, sebelum teror fungsi watchdog tampak pada kritik terhadap ketidaktegasan institusi Negara dalam kasus pagar laut (menit 34.51–35.13), sementara keberpihakan pada publik terlihat pada penggambaran dampak kebijakan terhadap nelayan yang harus memutar hingga dua jam dan mengalami kerusakan kapal (menit 7.09–7.25; 35.46–35.56). Sesudah teror, fungsi kontrol sosial tetap dijalankan melalui kritik terhadap sikap Presiden yang dinilai tidak tegas dalam merespons teror terhadap pers (menit 13.28–13.43), serta penegasan komitmen redaksi

untuk tetap bekerja demi kepentingan publik (menit 2.32–2.41). Temuan ini menunjukkan bahwa tekanan eksternal tidak menggeser orientasi ideologis redaksi, melainkan justru mempertegas identitasnya sebagai media yang menjalankan fungsi pengawasan kekuasaan. Hal ini sejalan dengan pandangan McQuail bahwa independensi media tercermin dari kemampuan mempertahankan otonomi moral dan profesional meskipun berada dalam tekanan eksternal.

Kedua, pada rumusan masalah mengenai independensi dalam mempertahankan prinsip dasar pemberitaan, peneliti menemukan bahwa standar kerja jurnalistik Podcast Bocor Alus Politik Media Tempo tetap konsisten antara periode sebelum dan sesudah teror. Dari sisi verifikasi dan akurasi, sebelum teror redaksi melakukan pengecekan langsung ke lapangan menggunakan kapal nelayan (menit 3.19–3.58) serta penelusuran dokumen resmi melalui aplikasi Bumi ATR (menit 10.05–11.41). Sesudah teror, pola verifikasi tetap terlihat melalui konfirmasi langsung kepada narasumber dalam isu revisi UU TNI (menit 6.36–6.51).

Dalam aspek keberimbangan, sebelum teror redaksi memuat bantahan kuasa hukum pihak yang dikritik (menit 24.32–24.40), dan sesudah teror tetap menyertakan posisi pemerintah dalam isu kontroversial (menit 33.49–34.07). Sementara pada aspek transparansi sumber, identitas dan posisi narasumber disebutkan secara terbuka baik sebelum maupun sesudah teror (menit 5.34–6.06). Temuan-temuan berbasis waktu tayang tersebut menunjukkan bahwa tidak terdapat indikasi self-censorship ataupun pelunakan kritik terhadap kekuasaan. Dengan demikian, kualitas pemberitaan tetap bertumpu pada verifikasi, akurasi, keberimbangan, dan

akuntabilitas kepada publik. Hal ini menguatkan konsep McQuail bahwa independensi media tercermin dari kualitas berita yang dapat dipertanggungjawabkan serta dari jarak profesional media terhadap kepentingan politik maupun ekonomi.

Secara keseluruhan, peneliti menyimpulkan bahwa teror yang dialami Tempo tidak melemahkan independensi program Podcast Bocor Alus Politik Media Tempo, baik pada level ideologis maupun pada praktik pemberitaan. Bukti-bukti empiris pada menit tayang sebelum dan sesudah teror menunjukkan konsistensi orientasi kepentingan publik, keberlanjutan fungsi watchdog, serta tetap diterapkannya prinsip verifikasi dan keberimbangan. Independensi yang terjaga tersebut menunjukkan resiliensi institusi pers dalam demokrasi Indonesia, sekaligus menegaskan bahwa legitimasi media bukan bersumber dari kedekatan dengan kekuasaan, melainkan dari kesetiaan pada fakta dan kepentingan publik. Dengan demikian, Podcast Bocor Alus Politik Media Tempo tetap menjalankan mandatnya sebagai ruang kontrol sosial yang kredibel dan bertanggung jawab kepada masyarakat.

B. SARAN

Berdasarkan kesimpulan penelitian yang menunjukkan bahwa independensi ideologis dan prinsip dasar pemberitaan Podcast Bocor Alus Politik Media Tempo tetap terjaga sesudah teror, peneliti memandang perlu adanya beberapa rekomendasi strategis. Saran berikut disusun untuk memperkuat praktik jurnalisme investigatif, perlindungan kebebasan pers, serta pengembangan kajian akademik mengenai independensi media di Indonesia.

1. Saran Praktis bagi Redaksi Tempo & Media Investigatif

Dari sisi praktis, peneliti merekomendasikan agar redaksi Podcast Bocor Alus Politik Media Tempo terus memperkuat sistem keamanan jurnalis dan infrastruktur digital, mengingat teror yang terjadi menunjukkan tingginya kerentanan kerja investigatif. Transparansi proses jurnalistik kepada audiens juga perlu terus dipertahankan sebagai strategi membangun kepercayaan publik pasca intimidasi. Selain itu, dokumentasi sistematis mengenai bentuk-bentuk tekanan terhadap pers penting dilakukan sebagai basis advokasi kebebasan pers dan perlindungan jurnalis di Indonesia.

2. Saran Bagi pemerintah dan Pemangku Kebijakan

Peneliti juga memandang perlunya peran negara yang lebih tegas dalam menjamin kebebasan pers. Pemerintah dan aparat penegak hukum diharapkan mampu menindak pelaku intimidasi terhadap media secara transparan dan akuntabel, serta membangun mekanisme perlindungan yang efektif bagi jurnalis investigatif. Tanpa jaminan

tersebut, independensi media akan selalu berada dalam situasi rentan meskipun redaksi telah berupaya menjaga profesionalisme.

3. Saran Bagi Peneliti Selanjutnya

Bagi penelitian selanjutnya, peneliti menyarankan agar kajian tidak hanya bertumpu pada analisis konten, tetapi juga dilengkapi dengan wawancara mendalam terhadap jurnalis dan pengelola redaksi untuk melihat dinamika internal sesudah teror. Perbandingan dengan media lain yang mengalami intimidasi serupa juga penting dilakukan agar diperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai ketahanan independensi pers di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- A., C., 'Associated Press Fakes', *Science*, 25.638 (1907), pp. 469–469, doi:10.1126/science.25.638.469-c
- Abdul Pirol, 'Teori Media Dan Masyarakat', *Jurnal Al-Tajdid*, 4.4 (2010), pp. 0–9.
- Abdul Pirol, 'Institusi Media Massa Dan Pengaruhnya Terhadap Masyarakat', *Al-Tajdid*, III (2009), p. 12.
- Agus Handoko, 'Analisis Kejahatan Terorisme Berkedok Agama', *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I*, 6.2 (2019), pp. 155–78, doi:10.15408/sjsbs.v6i2.11041.
- Ahmad Salman Farid, and Muhammad Ardiansyah, 'Peran Jurnalis Investigatif Dalam Mengungkap Kasus Narkoba: Analisis Tantangan Dan Hambatan Investigasi Jurnalisme', *MUKASI: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 2.3 (2023), pp. 186–95, doi:10.54259/mukasi.v2i3.1787
- Aidil Haris and Asrinda Amalia, 'MAKNA DAN SIMBOL DALAM PROSES INTERAKSI SOSIAL (Sebuah Tinjauan Komunikasi)', 29.1 (2018), pp. 16–19.
- A J I Denpasar and others, 'JURNAL ILMU KOMUNIKASI HINDU', 2023, pp. 484–93.
- Amir, Sholihat, and Shakira, 'Implikasi Hukum Pidana Pers Dalam Kasus Pengiriman Kepala Babi Ke Redaksi Tempo : Analisis Terhadap Kebebasan Pers Dan Batasan Ekspresi'.
- Amir, Salma Najla, Dewina Mutiara Sholihat, and Neyla Rida Shakira, 'Implikasi Hukum Pidana Pers Dalam Kasus Pengiriman Kepala Babi Ke Redaksi Tempo : Analisis Terhadap Kebebasan Pers Dan Batasan Ekspresi', 2025
- Anastasya Meyva Lensun, Nolly S Londa, and Leviane J Lotulung, 'Independensi Pemberitaan Media Online Di Kota Manado Pada Pemilihan Gubernur Sulawesi Utara', *Acta Diurna Komunikasi Independensi*, 3.3 (2021), pp. 1–12
<<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/actadiurnakomunikasi/article/view/34387>>.
- 'Analisis Data Kualitatif Teori Konsep da (1)'
- Andi Edwin Rewira, 'Jurnalistik : Antara Jurnalisme Dan Idealisme Di Tengah Pusaran Dinamika Global', 22.2 (2024), pp. 57–67.
- Anita Nim, *SKRIPSI STRATEGI MEDIA ONLINE PIJAR NEWS DALAM PROGRAM STUDI JURNALISTIK ISLAM*, 2024.
- Apriani, Kadek Dwita, 'Demokrasi Tanpa Demos', 2021, pp. 245–46
- Aqila, Shafina Ayuningdhiyani, Shavira Ayunaida, and Kanaya Cinda Angelina, 'Penurunan Nilai Kemanusiaan Dengan Ancaman Simbolik : Studi Kasus

- Pengiriman Bangkai Tikus Ke Redaksi Tempo', no. 1 (2025), pp. 1–11
- Ari Cahyo Nugroho, 'Representasi Agenda Media Dalam Isu High-Taste Content', *Jurnal Studi Komunikasi Dan Media*, 18.1 (2014), p. 105, doi:10.31445/jskm.2014.180106.
- Archellie, Reynaldo De, 'Diplomasi Publik Rusia Di Indonesia: Pendekatan, Aktor, Dan Instrumen', 1.March (2022), doi:10.7454/multikultura.v1i1.1083
- Aula, Siti Khodijah Nurul. "Potret Diskriminasi terhadap Kelompok Minoritas Ahmadiyah di Media Online." *RELIGI: Jurnal Studi Agama-Agama* 17.2 (2021): 1-16.
- Basudiwa Supraja Sangga Buana and Syamsul Rijal, 'Kekerasan Terhadap Pers Melalui Serangan Siber: Studi Kasus Pada Media Online Tempo.Co', *Jurnal Studi Jurnalistik*, 3.2 (2021), pp. 1–20, doi:10.15408/jsj.v3i2.22983.
- Buku Ajar Metode Penelitian Kualitatif (1)
- Dasar dasar Riset Pemasaran Edisi 4 jili
- Denpasar, A J I, and others, 'JURNAL ILMU KOMUNIKASI HINDU', 2023, pp. 484–93
- Detik News. (2025, Maret 20). Wartawannya diteror kepala babi, Pemred Tempo serahkan CCTV ke polisi. Detik News. Retrieved April 30, 2025, from <https://news.detik.com/>
- Dudi Sabil Iskandar, 'Konstruksi Pers Dalam Membangun Informasi Sehat Memperkokoh Ketahanan Nasional', *Kontruksi Pers Dalam Membangun Informasi Sehat Memperkokoh Ketahanan Nasional*, 2015, p. h.42-52.
- Dyananto, Fika Soraya. "Netralitas Media Dalam Pemberitaan Tentang Kebijakan Pemerintah (Studi Analisis Isi Tentang Netralitas Media dalam Pemberitaan tentang Kebijakan Pemerintah Terkait Isu Kenaikan Bahan Bakar Minyak pada Surat Kabar Harian Kompas dan Suara Merdeka Edisi 1 M." (2013).
- Fatmawati, Endang. "Kebebasan informasi kalangan milenial dalam bermedia sosial." *Jurnal Perpustakaan Universitas Airlangga* 10.2 (2020): 94-103.
- Fadia Nazwari, Cris Kuntadi, and Dede Liawati, 'Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Audit : Independensi , Etika Auditor Dan Pengalaman Kerja', *Jurnal Rumpun Manajemen Dan Ekonomi*, 1.2 (2024), pp. 50–56.
- Federal State Unitary, Headquarters Moscow, and Andrey Kondrashov, 'History 1902', no. December 1902 (1904).
- Gemiharto, Ilham, 'Teknologi 4G-Lte Dan Tantangan Konvergensi Media Di Indonesia', *Jurnal Kajian Komunikasi*, 3.2 (2015), pp. 212–20, doi:10.24198/jkk.vol3n2.10
- Hadi, Ido Prijana dkk, *Buku Ajar Komunikasi Massa*, 2021 <<https://repo->

dosen.ulm.ac.id/bitstream/handle/123456789/17579/Buku_Ajar_Komunikasi_Bisnis_(ABKA_3208-2_SKS).pdf?sequence=1>

Harmonis, *‘Jurnalistik Investigasi’*.

Hasyim Ali Imran, *‘Media Massa, Khalayak Media, The Audience Theory, Efek Isi Media Dan Fenomena Diskursif’*, *Jurnal Studi Komunikasi Dan Media*, 16.1 (2013), p. 47, doi:10.31445/jskm.2012.160103.

Hamid, Izzuddin, *‘Mengukur Keseimbangan Konten Podcast Podcas Bocor Alus Politik Tempo Dalam Membahas Isu Pemilu Presiden 2024’*, 5.2 (2024), pp. 166–79

Handoko, Agus, *‘Analisis Kejahatan Terorisme Berkedok Agama’*, *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I*, 6.2 (2019), pp. 155–78, doi:10.15408/sjsbs.v6i2.11041

Haris, Aidil, and Asrinda Amalia, *‘MAKNA DAN SIMBOL DALAM PROSES INTERAKSI SOSIAL (Sebuah Tinjauan Komunikasi)’*, 29.1 (2018), pp. 16–19

Harmonis, *‘Jurnalistik Investigasi’*, *Jurnal Komunikasi*, 3.1 (2006), pp. 7–13 <<https://komunikologi.esaunggul.ac.id/index.php/KM/article/download/23/23>>

Ika Lenaini and others, *‘TEKNIK PENGAMBILAN SAMPEL PURPOSIVE DAN’*, 6.1 (2021), pp. 33–39.

Iksan, Khoirul, *‘Kebebasan Berekspresi Dalam Demokrasi : Perspektif on Liberty John Stuart Mill Terhadap Intimidasi Jurnalis Tempo’*, no. 1 (2025), pp. 87–104

Ilham Gemiharto, *‘Teknologi 4G-Lte Dan Tantangan Konvergensi Media Di Indonesia’*, *Jurnal Kajian Komunikasi*, 3.2 (2015), pp. 212–20, doi:10.24198/jkk.vol3n2.10.

Ilya Revianti Sudjono Sunarwinadi, *‘Budaya Sensor-Diri Dalam Kebebasan Pers Di Jepang’*, *Makara Human Behavior Studies in Asia*, 10.1 (2006), p. 15, doi:10.7454/mssh.v10i1.12.

Izzuddin Hamid, *‘Mengukur Keseimbangan Konten Podcast Podcas Bocor Alus Politik Tempo Dalam Membahas Isu Pemilu Presiden 2024’*, 5.2 (2024), pp. 166–79.

Imran, Hasyim Ali, *‘Media Massa, Khalayak Media, The Audience Theory, Efek Isi Media Dan Fenomena Diskursif’*, *Jurnal Studi Komunikasi Dan Media*, 16.1 (2013), p. 47, doi:10.31445/jskm.2012.160103

Iskandar, Dudi Sabil, *‘Konstruksi Pers Dalam Membangun Informasi Sehat Memperkokoh Ketahanan Nasional’*, *Kontruksi Pers Dalam Membangun Informasi Sehat Memperkokoh Ketahanan Nasional*, 2015, p. h.42-52

Jati, Wasisto R, *‘Politik Persuasif Media: Peran Media Dalam Pemilu Presiden Indonesia 2001-2009’*, *Jurnal Penelitian Politik*, 10.2 (2013), pp. 15–30

- Journal Presumption and O F Law, MEWUJUDKAN INDEPENDENSI PERS DI INDONESIA A . Pendahuluan Indonesia Merupakan Negara Yang Memprioritaskan Kedaulatan Rakyat Sesuai Dengan Dasar Pada Pancasila Sila Ke-4 , Laporan Pers Memiliki Peran Penting Sebagai Landasan Pertimbangan Dewan Perwakilan R^e, 7.April (2025), pp. 48–58; Dasar_dasar_Riset_Pemasaran_Edisi_4_jili’.
- Jurnal, Portal, Elektronik Universitas, and Kristen Satya, PENYIARAN DI INDONESIA (Mendambakan Penyiaran Radio Yang Beretika) Oleh ‘:’, pp. 522–46
- Jurnalistik, Program Studi, and others, DALAM PEMBERITAAN WABAH COVID-19’, 2023
- Kebijakan, Urgensi Perubahan, and Penegakkan Independensi Media, Urgensi Perubahan Kebijakan Untuk Penegakkan Independensi Media Di Indonesia’, *Jurnal Komunikasi*, 10.1 (2015), pp. 29–39, doi:10.20885/komunikasi.vol10.iss1.art4
- Kuesioner, Wawancara D A N, Teknik Pengumpulan Data’, 3.1, pp. 39–47
- Khoirun Nisa, Peran Literasi Di Era Digital Dalam Menghadapi Hoaks Dan Disinformasi Di Media Sosial’, *Impressive: Journal of Education*, 2.1 (2024), pp. 1–11, doi:10.61502/ijoe.v2i1.75.
- Khoirul Iksan, Kebebasan Berekspresi Dalam Demokrasi : Perspektif on Liberty John Stuart Mill Terhadap Intimidasi Jurnalis Tempo’, no. 1 (2025), pp. 87–104.
- Larisu, Zulfiah, and Abdul Malik, Tren Podcast Sebagai Media Alternatif Jurnalisme Independen : Studi Tentang Persepsi Audiens Terhadap Kredibilitas Dan Objektivitas’, 2.3 (2025), pp. 14–23
- Lenaini, Ika, and others, TEKNIK PENGAMBILAN SAMPEL PURPOSIVE DAN’, 6.1 (2021), pp. 33–39
- Lensun, Anastasya Meyva, Nolly S Londa, and Leviane J Lotulung, Independensi Pemberitaan Media Online Di Kota Manado Pada Pemilihan Gubernur Sulawesi Utara’, *Acta Diurna Komunikasi Independensi*, 3.3 (2021), pp. 1–12
<<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/actadiurnakomunikasi/article/view/34387>>
- Luhur, Universitas Budi, and others, Dilema Laporan Investigatif Dalam Perspektif Kebebasan Informasi’, 12.1 (2021), pp. 44–58
- M. Semma, Negara Dan Korupsi’, 2008, p. 4008.
- Maulana, Dimas Firli. 2025. Narasi Komunikasi Podcast Bocor Alus Politik Melalui YouTube Tempodotco Perspektif Wacana Kritis. Tesis Magister. Jakarta: Program Studi Magister Komunikasi dan Penyiaran Islam, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

- Muhammad Nadzirin and Anshari Nur, *Kebebasan Pers , Tanggung Jawab Dan Etika Jurnalistik Dalam Lingkungan Media Online Yang Kompetitif*, 6 (2024).
- Muhammad Amin Rais and others, *KEBERIMBANGAN BERITA DEMONSTRASI TOLAK RU KPK-RKUHP 2019 OLEH PORTAL BERITA DETIKCOM*, no. September (2019).
- Murtiningsih, Rr Siti, and Joko Siswanto. "Pembungkaman Pers Pada Masa Orde Baru (Refleksi Filosofis atas Kebebasan Pers Indonesia Masa Orde Baru)." *Jurnal Filsafat* 1.1 (1999): 57-65.
- Musfialdy, *Independensi Media: Pro-Kontra Objektivitas Dan Netralitas Pemberitaan Media*.
- Musfialdy, Musfialdy, *Independensi Media: Pro-Kontra Objektivitas Dan Netralitas Pemberitaan Media*, *Jurnal Riset Komunikasi*, 2.1 (2019), pp. 21–28, doi:10.24329/jurkom.v2i1.50
- Nadzirin, Muhammad, and Anshari Nur, *Kebebasan Pers , Tanggung Jawab Dan Etika Jurnalistik Dalam Lingkungan Media Online Yang Kompetitif*, 6 (2024)
- Nazwari, Fadia, Cris Kuntadi, and Dede Liawati, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Audit : Independensi , Etika Auditor Dan Pengalaman Kerja*, *Jurnal Rumpun Manajemen Dan Ekonomi*, 1.2 (2024), pp. 50–56
- Nim, Anita, *SKRIPSI STRATEGI MEDIA ONLINE PIJAR NEWS DALAM PROGRAM STUDI JURNALISTIK ISLAM*, 2024
- Nisa, Khoirun, *Peran Literasi Di Era Digital Dalam Menghadapi Hoaks Dan Disinformasi Di Media Sosial*, *Impressive: Journal of Education*, 2.1 (2024), pp. 1–11, doi:10.61502/ijoe.v2i1.75
- Nugroho, Ari Cahyo, *Representasi Agenda Media Dalam Isu High-Taste Content*, *Jurnal Studi Komunikasi Dan Media*, 18.1 (2014), p. 105, doi:10.31445/jskm.2014.180106
- Objektivitas and Media, *Seto & Morissan: Menilai Objektivitas Berita Media Televisi*.
- Objektivitas, Menilai, and Berita Media, *Seto & Morissan: Menilai Objektivitas Berita Media Televisi*, XII.01 (2013), pp. 132–48
- Oluwasola, Omolola, *The Normative Theories of the Press in the Digital Age: A Need for Revision*, *SSRN Electronic Journal*, 4.2 (2020), pp. 27–36, doi:10.2139/ssrn.3678282
- The Normative Theories of the Press in the Digital Age: A Need for Revision*, *SSRN Electronic Journal*, 2020, pp. 1–20, doi:10.2139/ssrn.3678282
- Putra, Robby Aditya, Mochamad Aris Yusuf, and Maulida Fitri. "Dakwah Communication: An Alternative Way For Children Caused By Broken Home." *KOMUNIKA* 6.1 (2023).

- Putra, Robby Aditya, et al. "Training Model Development: Transforming a Conservative Da'i to a Moderate by Leveraging Digital Tools." *Ishlah: Jurnal Ilmu Ushuluddin, Adab dan Dakwah* 6.1 (2024): 93-108.
- Putra, Robby Aditya, Exsan Adde, and Maulida Fitri. "MEDIA DAKWAH TIKTOK UNTUK GENERASI Z." *Ath-Thariq: Jurnal Dakwah dan Komunikasi* 7.1 (2023): 58-71.
- __Pengantar_Teori_Pers_Libertarian (1)‘
- __Pengantar_Teori_Pers_Tanggung_Jawab_Sosi‘
- Pirol, Abdul, __Institusi Media Massa Dan Pengaruhnya Terhadap Masyarakat‘, *Al-Tajdid*, III (2009), p. 12
- Portal Jurnal, Elektronik Universitas, and Kristen Satya, __PENYIARAN DI INDONESIA (Mendambakan Penyiaran Radio Yang Beretika) Oleh ‘:, pp. 522–46.
- , __Teori Media Dan Masyarakat‘, *Jurnal Al-Tajdid*, 4.4 (2010), pp. 0–9
- Presumption, Journal, and O F Law, __MEWUJUDKAN INDEPENDENSI PERS DI INDONESIA A . Pendahuluan Indonesia Merupakan Negara Yang Memprioritaskan Kedaulatan Rakyat Sesuai Dengan Dasar Pada Pancasila Sila Ke-4 , Laporan Pers Memiliki Peran Penting Sebagai Landasan Pertimbangan Dewan Perwakilan R‘, 7.April (2025), pp. 48–58
- Rahmi, __Bab I Pendahuluan اخص ب اي , *Galang Tanjung*, no. 2504 (2021), pp. 1–9
- Rais, Muhammad Amin, and others, __KEBERIMBANGAN BERITA DEMONSTRASI TOLAK RU KPK-RKUHP 2019 OLEH PORTAL BERITA DETIKCOM‘, no. September (2019)
- Rewira, Andi Edwin, __Jurnalistik : Antara Jurnalisme Dan Idealisme Di Tengah Pusaran Dinamika Global‘, 22.2 (2024), pp. 57–67
- Rengganis, Aulia Oktavia. *Tingkat Akurasi Pemberitaan Ancaman Resesi Global 2023 di Media Online Detik. Com*. BS thesis. Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2023.
- Reynaldo De Archellie, __Diplomasi Publik Rusia Di Indonesia: Pendekatan, Aktor, Dan Instrumen‘, 1.March (2022), doi:10.7454/multikultura.v1i1.1083.
- Sangga Buana, Basudiwa Supraja, and Syamsul Rijal, __Kekerasan Terhadap Pers Melalui Serangan Siber: Studi Kasus Pada Media Online Tempo.Co‘, *Jurnal Studi Jurnalistik*, 3.2 (2021), pp. 1–20, doi:10.15408/jsj.v3i2.22983
- Sarifah, Siti, and Purwanto Purwanto, __Jurnalisme Investigasi Televisi Di Kompas TV Jakarta (Studi Analisis Isi Kuantitatif Pada Naskah Berita —Berkas Kompas)‘, *Rekam*, 16.2 (2020), doi:10.24821/rekam.v16i2.4054
- Semma, M., __Negara Dan Korupsi‘, 2008, p. 4008

- Shafina Ayuningdhiyani Aqila, Shavira Ayunaida, and Kanaya Cinda Angelina, Penurunan Nilai Kemanusiaan Dengan Ancaman Simbolik : Studi Kasus Pengiriman Bangkai Tikus Ke Redaksi Tempo, no. 1 (2025), pp. 1–11.
- Subagio M. Warnosumarto, *Jueralisme Investigasi: Untuk Mahasiswa Komunikasi Dan Kalangan Umum* (PERPUSTAKAAN BARU PRESS, 2020)
- Sunarwinadi, Ilya Revianti Sudjono, Budaya Sensor-Diri Dalam Kebebasan Pers Di Jepang, *Makara Human Behavior Studies in Asia*, 10.1 (2006), p. 15, doi:10.7454/mssh.v10i1.12
- Susanto, Elik, Independensi Media Tempo Dan Pengaruh Ekonomi Politik Dalam Praktik Strukturasi, *Jurnal Pustaka Komunikasi*, 4.1 (2021), pp. 24–38, doi:10.32509/pustakom.v4i1.1314
- Susanto, Tri Agus, Podcast —Podcas Bocor Alus Politik Tempol: Podcast Tempo Versus Erick Thohir, *JOELS: Journal of Election and Leadership*, 4.2 (2023), pp. 110–19, doi:10.31849/joels.v4i2.15747
- Tempo.co, "Kronologi Detail Teror Kepala Babi dan Bangkai Tikus untuk Redaksi lempo," Tempo.co, 1 Agustus 2019.
- Tirto.id, "Terar Beruntun ke Tempo Diduga Dilakukan Secara Terencana," Tirtoid, 1 Agustus 2019
- Tri Agus Susanto, Podcast —Podcas Bocor Alus Politik Tempol: Podcast Tempo Versus Erick Thohir, *JOELS: Journal of Election and Leadership*, 4.2 (2023), pp. 110–19, doi:10.31849/joels.v4i2.15747.
- Unitary, Federal State, Headquarters Moscow, and Andrey Kondrashov, History 1902’, no. December 1902 (1904)
- Urgensi Perubahan Kebijakan and Penegakkan Independensi Media, Urgensi Perubahan Kebijakan Untuk Penegakkan Independensi Media Di Indonesia, *Jurnal Komunikasi*, 10.1 (2015), pp. 29–39, doi:10.20885/komunikasi.vol10.iss1.art4.
- Wawancara D A N Kuesioner, Teknik Pengumpulan Data, 3.1, pp. 39–47.
- Wasisto R Jati, Politik Persuasif Media: Peran Media Dalam Pemilu Presiden Indonesia 2001-2009, *Jurnal Penelitian Politik*, 10.2 (2013), pp. 15–30.
- Zulfiah Larisu and Abdul Malik, Tren Podcast Sebagai Media Alternatif Jurnalisme Independen : Studi Tentang Persepsi Audiens Terhadap Kredibilitas Dan Objektivitas, 2.3 (2025), pp. 14–23.

L

A

M

P

I

R

A

N



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH
Jalan Dr. AK Gani No. 1 Kotak Pos 108 Curup-Bengkulu Telp. (0732) 21010-7003044
Fax. (0732) 21010 Homepage <http://www.iaincurup.ac.id> E-mail: -

Nomor : 497 /In.34/FU/PP.00.9/12/2025 04 Desember 2025
Sifat : Penting
Lampiran : Proposal dan Instrumen
Perihal : **Surat Keterangan Izin Penelitian
Study Lapangan**

Dengan ini Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah menerangkan bahwa mahasiswa dibawah ini benar melakukan penelitian, atas nama:

Nama : Dita Naviana
NIM : 22521011
Prodi : Komunikasi dan Penyiaran Islam
Judul Skripsi : Analisis Independensi Program Investigatif Bocor Alus Media
Tempo Pasca Teror Kepala Babi Dan Bangkai Tikus
Waktu Penelitian : 04 Desember 2025 s.d 04 Maret 2026
Jenis Penelitian : Study Lapangan
Tempat Penelitian :-

Demikian surat ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.



Dt. Fakhruddin, M.Pd.I
NIP 19750112 200604 1 009



KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH
Nomor: 27/ Tahun 2025
Tentang

PENUNJUKAN PEMBIMBING I DAN PEMBIMBING II DALAM PENULISAN SKRIPSI
DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran penulisan skripsi mahasiswa perlu ditunjuk Dosen Pembimbing I dan II yang bertanggung jawab dalam penyelesaian penulisan yang dimaksud;
b. bahwa saudara yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu serta memenuhi syarat untuk diserahi tugas tersebut;
- Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Peraturan Presiden RI Nomor 24 Tahun 2018 tentang Institut Agama Islam Negeri Curup;
3. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 2 Tahun 2019 tentang STATUTA Institut Agama Islam Negeri Curup;
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 28 Tahun 2022 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Curup;
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 184/U/2001 Tentang Pedoman Pengawasan Pengendalian dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana dan Pascasarjana di Perguruan Tinggi
6. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 019558/B.II/3/2022 tanggal 18 April 2022 Tentang Pengangkatan Rektor IAIN Curup Periode 2022-2026;
7. Keputusan Rektor IAIN Curup Nomor : 0700/In.342/KP.07.6/09/2023 tanggal 29 September 2023 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri Curup;
- Memperhatikan : Berita acara seminar proposal Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam tanggal 09 Juli 2025

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
Pertama : Keputusan Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab Dan Dakwah
Menunjuk Saudara :
1. Robby Aditya Putra, MA. : 19921223 201801 1 002
2. Anrial, MA : 198101032023211021
Dosen Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup masing-masing sebagai Pembimbing I dan Pembimbing II dalam penulisan skripsi mahasiswa :
Nama : Dita Noviana
NIM : 22521011
Judul Skripsi : Analisis Independensi Program Investigatif Bocor Alus Media Tempo Pasca Teror Kepala Babi dan Bangkai Tikus
- Kedua : Proses bimbingan dilakukan sebanyak 8 kali pembimbing I dan 8 kali pembimbing II dibuktikan dengan kartu bimbingan skripsi;
- Ketiga : Pembimbing I bertugas membimbing dan mengarahkan hal-hal yang berkaitan dengan substansi dan konten skripsi. Untuk pembimbing II bertugas dan mengarahkan dalam penggunaan bahasa dan metodologi penulisan;
- Keempat : Kepada masing-masing pembimbing diberi honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- Kelima : Surat keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya;
- Keenam : Surat keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan berakhir setelah skripsi tersebut dinyatakan sah oleh IAIN Curup atau masa bimbingan telah mencapai 1 tahun sejak SK ini ditetapkan;
- Ketujuh : Apabila terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya sesuai peraturan yang berlaku;

Ditetapkan di Curup
pada tanggal 14 Juli 2025



- Tembusan :
1. Bendahara IAIN Curup;
 2. Kasubag FUAD IAIN Curup;
 3. Dosen Pembimbing I dan II;
 4. Prodi yang Berangkutan/
 5. Layanan Akademik
 6. Mahasiswa yang bersangkutan.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP

Jalan AK Gani No. 01 Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-21759 Fax. 21010
Homepage: <http://www.iaincurup.ac.id> Email: admin@iaincurup.ac.id Kode Pos 39119

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA	: Dika Noviana
NIM	: 2251011
PROGRAM STUDI	: Komunikasi dan Penyiaran Islam (KPI)
FAKULTAS	: Ilmu-Ilmu Adab dan Dakwah
PEMBIMBING I	: Dr. Rohay Aditya Putra, M.A
PEMBIMBING II	: Anriat, M.A
JUDUL SKRIPSI	: Analisis Independensi Program Investigatif Bocar Alus Media Tempo Pasca Teror Kepala Babi dan Bangsa Nusantara
MULAI BIMBINGAN	:
AKHIR BIMBINGAN	:

NO	TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	PARAF PEMBIMBING I
1.	7 Juli 2015	Revisi Latar Belakang & Rumusan Masalah	[Signature]
2.	10 Juli 2015	Acc Latar Belakang & Rumusan Masalah.	[Signature]
3.	17 Sep 2015	BAB I	[Signature]
4.	16 Nov 2015	BAB II	[Signature]
5.	1 Des 2015	Revisi Data Primer Bab III	[Signature]
6.	31 Des 2015	Revisi Bab 4	[Signature]
7.	1 Jan 2016	Revisi bagian data Penelitian	[Signature]
8.	2 Feb 2016	Revisi bagian hasil Analisis	[Signature]
9.			
10.			
11.			
12.			

KAMI BERPENDAPAT BAHWA SKRIPSI INI
SUDDAH DAPAT DIAJUKAN UJIAN SKRIPSI IAIN
CURUP

CURUP, 1 Agustus 2025

PEMBIMBING I,

[Signature]

Dr. Rohay Aditya Putra, M.A
NIP. 199212232014011002

PEMBIMBING II,

[Signature]

Anriat, M.A
NIP. 198101032023211012



IAIN CURUP

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP

Jalan AK Gani No. 01 Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-21759 Fax. 21010
Homepage: <http://www.iaincurup.ac.id> Email: admin@iaincurup.ac.id Kode Pos 30119

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA	...	Dika Hauliana
NIM	...	22151011
PROGRAM STUDI	...	Komunikasi dan Pengajaran Islam (KPI)
FAKULTAS	...	Ushuluddin Adab dan Dakwah
DOSEN PEMBIMBING I	...	Dr. Lukky Aditya Putra, MA
DOSEN PEMBIMBING II	...	Ancial, M.A
JUDUL SKRIPSI	...	Analisis Independensi Program Investigatif Bocar Alus Media Tempo Pasca Teror Kepala Babi dan Gangkai Titus
MULAI BIMBINGAN	...	
AKHIR BIMBINGAN	...	

NO	TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	PARAF PEMBIMBING II
1.	7 Juli 2025	Revisi latar belakang proposal	
2.	10 Juli 2025	Acc latar belakang	
3.	17 Sep 2025	Bab 1.	
4.	10 Nov 2025	Footnot bab 1	
5.	3 Des 2025	Revisi Bab III	
6.	30 Des 2025	Revisi bagian Bab 1	
7.	1 Jan 2026	Revisi hasil analisis di tulisan	
8.	2 Feb 2026	Acc skripsi	
9.			
10.			
11.			
12.			

KAMI BERPENDAPAT BAHWA SKRIPSI INI SUDAH
DAPAT DIAJUKAN UJIAN SKRIPSI IAIN CURUP,

PEMBIMBING I,

Dr. Lukky Aditya Putra, MA
NIP. 69210232018011002

CURUP, 9, Agustus 2025

PEMBIMBING II,

Ancial, M.A
NIP. 69101052023211012

- Lembar Depan Kartu Bimbingan Pembimbing I
- Lembar Belakang Kartu Bimbingan Pembimbing II
- Kartu ini harap dibawa pada setiap konsultasi dengan Pembimbing I dan Pembimbing II

DITA NOVIANA



CONTACT

☎ : +62 - 8953-2243-0166

✉ : ditanoviana90@gmail.com

🗣 : Dita Noviana

📷 : @ditnva_

📍 Perumahan Griya Stein, Jalan Dr. Aik Gani No. 51, Dusun Curup,
CURUP UTARA, KAB. REJANG LEBONG, BENGKULU, ID 39119

SKILLS

- Menulis Jurnalistik
- Public Speaking
- Copywriting
- Video Editing
- Photo Editing
- Repoter

TENTANG SAYA

Saya merupakan mahasiswa SI prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam, Institut Agama Islam Negeri Curup yang memiliki minat dan skill dibidang konten creator. Saya adalah seorang penulis freelance dengan minat dan keahlian dalam jurnalistik serta produksi konten digital. Berpengalaman dalam menulis artikel, berita, opini, dan konten informatif, saya memiliki kemampuan riset yang kuat dan mampu menyajikan tulisan yang menarik serta akurat. Sebagai seseorang yang teliti dan memiliki manajemen waktu yang baik, saya terbiasa mengerjakan proyek dengan tenggat waktu ketat tanpa mengorbankan kualitas. Kemampuan kerja sama tim juga menjadi salah satu keunggulan saya, memastikan komunikasi yang efektif dan hasil yang sesuai dengan harapan. Dengan pemahaman mendalam tentang media digital dan tren penulisan, saya siap memberikan kontribusi terbaik dalam setiap proyek yang saya tangani. Sebagai seseorang yang selalu mengikuti tren digital, saya siap membantu menciptakan konten yang tidak hanya menarik tetapi juga memiliki dampak kuat di dunia digital.

PENGALAMAN

Anggota LPM Gelora Parrhesia (2023 - 2024)

Sebagai Pimpinan Redaksi LPM Gelora Parrhesia (2023-2024) sekaligus wartawan peliputan, saya bertanggung jawab memastikan setiap berita tajam, akurat, dan berdampak. Memimpin tim wartawan bukan sekadar mengelola tulisan, tapi juga membangun jurnalisme yang kritis dan independen. Dalam setiap peliputan, saya berusaha menjadi mata dan suara publik, menyuarakan fakta yang perlu didengar.

Crew Jurnalis Humas IAIN Curup (2024)

Sebagai Wartawan Peliputan yang fokus terhadap informasi kegiatan internal kampus, dan Eksternal kampus. Setiap berita yang saya sajikan bukan hanya sekadar laporan, tetapi juga upaya menghadirkan informasi yang akurat, relevan, dan bermanfaat bagi civitas akademika serta masyarakat luas.

Crew Jurnalis Kitabah Buletin FUAD TV (2024 - 2025)

saya berfokus pada pemberitaan cetak dengan gaya penulisan yang relevan bagi generasi Gen Z.

Menjadi Kordinator Program KPI TV (2025)

Fokus pada program Berita Kampus, yang membahas tentang isu - isu Terkini, baik Nasional maupun Internasional. Dengan beranggotakan wartawan, repoter, dan editing.

Anggota Repoter Payolebar (PL) News

Jurnalis Payolebar (PL) News provinsi Bengkulu

EDUCATION

➤ SMA N Jayaloka
Jurusan IPS
(2018 - 2021)

➤ Mahasiswa Aktif IAIN Curup
Prodi Komunikasi
Penyiaran Islam
(2022 - sekarang)